Ainur Rofiq Al Amin

KONTRANARASI MELAWAN KAUM KHILAFERS

BACAAN PRAKTIS BAGI GEN Y DAN GEN Z

KONTRANARASI
MELAWAN KAUM KHILAFERS
Bacaan Praktis bagi Gen Y dan Gen Z

Ainur Rofiq Al Amin

KONTRANARASI MELAWAN KAUM KHILAFERS

BACAAN PRAKTIS BAGI GEN Y DAN GEN Z

CATATAN PENERBIT

IBARAT ARWAH yang gentayangan, kaum khilafers ada di mana-mana meskipun secara kelembagaan (HTI) sudah dilarang beraktivitas di Indonesia. Mereka nyatanya tetap aktif berdakwah dengan propaganda yang tak berubah: tegakkan khilafah! Khilafah itu solutip!

Propaganda mereka semakin masif dan beringas belakangan ini. Lihat saja di media sosial, dan terakhir ini mereka meluncurkan film *Jejak Khilafah di Nusantara*.

Sayangnya, propaganda mereka disertai narasi-narasi kebencian yang menjurus fitnah, terutama yang paling sering jadi sasaran adalah kalangan Islam moderat, pesantren dan NU, yang dinilainya paling kuat untuk dilawan, serta kelompok lokal dan minoritas.

Ainur Rofiq Al Amin yang mantan *hizbiyyin* ini tahu betul luar-dalam siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka rencanakan. Maka ketika menulis tentang khilafah dan kaumnya, dia tidak main-main, itu karena dia mengerti betapa berbahayanya mereka bagi kebangsaan kita.

Tulisan-tulisannya tidak sekadar mengkritik dan melawan, tapi disertai data dari kitab-kitab karya tokoh HT/HTI, dan pengalamannya selama berinteraksi dengan khilafers. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Akhi Rofiq yang tersebar di berbagai media. Ditulis secara ringkas dan padat, mudah dipahami, dan sangat pas sebagai bekal pengetahuan kalangan milenial Gen Y dan Gen Z. Buku ini menyediakan jawaban singkat dan praktis melawan propaganda kaum khilafers.

Sebagai kumpulan tulisan (91 tulisan), Anda bisa membacanya tidak harus berurutan dari tulisan pertama sampai tulisan terakhir. Anda bisa membacanya sesuai tema yang diinginkan, meskipun keseluruhan ide setiap tulisan tersebut saling terhubung satu dan lainnya.

Akhi Rofiq, terima kasih telah berkenan menyerahkan tulisanmu untuk kami publikasikan. *Jazakallahu khairan katsiran*.

Selamat menikmati!

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, syukur kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi SAW, keluarga dan sahabatnya, saya bisa mengumpulkan tulisan terserak, baik dari media sosial, harian *Kompas*, *Jawa Pos, plus* tulisan yang belum terpublikasi. Tentu saja masih perlu koreksi dan revisi agar ilmiah dan lebih lengkap.

Tulisan-tulisan dalam buku ini berkaitan dengan kajian radikalisme, negara Islam, dan khilafah, tentu dalam konteks NKRI, Pancasila, dan Islam yang rahmah dan ramah. Pembaca gen Y dan gen Z yang berkarakter kritis akan menemui tulisan di buku ini dalam koridor kajian kritis. Bagusnya, tulisannya banyak dikemas secara pendek dan ringan untuk dipahami, sekalipun ada juga yang butuh sedikit mengernyitkan dahi *plus* secangkir kopi. Pembaca juga akan menjumpai satu atau dua kalimat di beberapa halaman yang isinya sama, hal itu sebagai penekanan dan penguatan agar lebih melekat di memori kita.

Semoga buku ini bisa menjadi bacaan yang mencerah-kan bagi generasi milenial dan *centennial* sehingga tidak

larut dalam “kubangan” wacana pemikiran yang bisa menghambat gerak progresif mereka menuju Indonesia emas dan mempertahankan Islam yang rahmah dan ramah. Harapan lain, bagi *khilafers* (pengikut eks-HTI alias pengagum dan pengagung khilafah ala Hizbut Tahrir) dan bagi kelompok lain yang berpaham “radikal” semoga berkenan membaca buku ini sebagai bahan komparasi wawasan sehingga lebih terbuka bersedia untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi: NKRI.

Asrama Al-Hadi 2, Bahrul Ulum, Tambakberas,
Jombang

22 Oktober 2020

Ainur Rofiq Al Amin

DAFTAR ISI

MUHARAM 2019 DAN 2020 BAGI *KHILAFERS*

ADA DUA fenomena menarik setelah ormas HTI dibubarkan terkait bulan Muharam. Para *khilafers* masih getol menyuarakan isu pokok mereka sama-sama lewat medsos, dan sama-sama membuatnya *trending*. Bedanya masalah isu ikutannya.

Pertama, Muharam 1441 atau September 2019, kelompok itu *mentrendingkan* tegakkan khilafah (lihat gambar dan situs http://www.viva.co.id/digital/digilife/1177494-tahun-baru-hijriah-hashtag-tegakkan-khilafah-trending-twitter). Saya tidak heran dengan kelompok *khilafers* (pengikut eks-HTI alias pengagum dan pengagung khilafah ala Hizbut Tahrir) bisa mentrendingkan, karena mereka walau sedikit, tapi militan. Manakala pimpinan pusatnya memberi instruksi agar setiap simpatisan ikut mencuitkan, spontan jadi dech itu *trending*. Justeru yang mengherankan adalah kelompok *khilafers* dan elit politik yang stress tidak berteriak anti separatis, tapi justru merundung (*bullying*) Banser agar turun ke Papua untuk memerangi separatisme dan mengatasi kerusuhan yang terjadi. Lebih mengherankan lagi disebarkan isu hoaks bahwa warga Papua menuntut

agar Banser dibubarkan seperti baca situs: https://cekfakta.tempo.co/fakta/386/fakta-atau-hoaks-benarkah-papua-meminta-banser-dibubarkan.

Kedua, Muharram 1442 atau Agustus 2020 ini, kelompok *khilafers* melakukan promosi secara getol terhadap film *Jejak Khilafah di Nusantara* (JKDN). Promosi JKDN ini viral dan jadi *trending topic* di Twitter demikian pula film *Tilik*. Hanya saja "Kalau JKDN dari awal sudah dikondisikan, dan dicek, itu bot. Kalau film *Tilik* itu natural," kata *founder* Drone Emprit, Ismail Fahmi, baca di situs: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5150722/drone-emprit-popularitas-tilik-alami-jejak-khilafah-ketahuan-pakai-bot.

Lalu saat JKDN diblokir, mereka marah, terutama emak-emak *khilafers*nya berteriak yang tidak kalah seru sebagaimana kelompok emak-emak di film *Tilik*. Kemarahan emak-emak *khilafers* tertuang dalam situsnya: https://www.muslimahnews.com/2020/09/03/pemblokiran-film-jkdn-wajah-busuk-hipokrisi-demokrasi/.Jawaban atas kemarahan emak-emak ini bisa dibaca pada halaman berikutnya dari buku ini. []

SUTEKI: SAKSIKAN FILM JEJAK KHILAFAH

SAKSIKAN ATAU sangsikan ya untuk film itu? Saya sebenarnya ogah menanggapi film yang nampaknya disebarluaskan para *khilafers*, berhubung jelang Maghrib itu ada kiai dari sebuah pondok pesantren di Subang, Jawa Barat yang *japri* saya agar menanggapi film itu, maka saya menulis sambil lalu:

Pertama, saya ogah melihat film itu, sehingga tidak bisa menilai data historis yang mau disuguhkan. *Kedua*, hal yang jelas, film itu adalah upaya promosi khilafah. Pertanyaannya, khilafah yang mau dipromosikan adalah khilafah ala Hizbut Tahrir atau ala ISIS atau ala Khilafatul Muslimin atau yang lain?

Ketiga, sudah sering saya sampaikan, bila ada jejak Turki Usmani di Indonesia, lalu mengapa? Banyak jejak penguasa mancanegara ke Indonesia mulai dari Barat, Timur Tengah hingga Jepang, Mongol, India dan lain-lain. Jejak bukan sebagai dalil, sekali lagi, jejak bukan sebagai dalil atau perintah wajib bahwa kita harus mengubah NKRI menjadi khilafah.

Keempat, akan seru bila ada film yang dibuat dari data sejarah semisal kitab *Tarikh Al Khulafa,Tarikh Tabari, Al Bidayah wan Nihayah, Al Kamil fi al-Tarikh, Al Muntazam fi Tarikh Al Muluk wal Umam* dan kitab tarikh lainnya seperti yang dirujuk oleh Prof Nadirsyah Hosen dalam *Islam Yes, Khilafah, No?* Apa gunanya? sebagai penyeimbang dan penjelas bahwa pada masa khilafah Umayyah, Abbasiyyah dan dinasti lain ada jejak perilaku pemimpin yang baik, adil, terdidik tapi juga ada pemimpin yang urakan, peminum berat, sadis, raja tega dan kepemimpinannya diperebutkan dengan pertumpahan darah, serta pelanjutnya adalah anak turunnya, jadi yang bukan nasabnya tidak bisa menjadi khalifah. Itulah khilafah era dahulu yang mewujud dalam sejarah. []
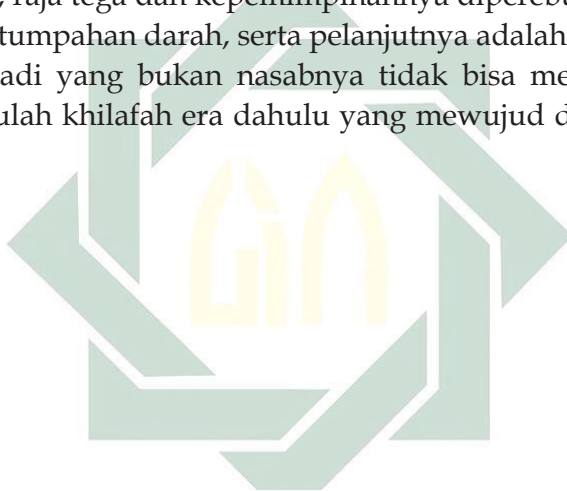
PERANG TOTAL UNTUK SEKADAR FILM

BAGI MEREKA, judul film yang ada muatan kata "khilafah" dan mereka sendiri yang menggarapnya, maka baginya sangat penting untuk menjaring kawula milenial dan *centennial* (gen Y dan gen Z) yang masih awam agama. Karena film bisa lebih melekatkan memori gen Y dan gen Z, entah film itu fiksi atau non-fiksi.

Maka seluruh tokoh dan simpatisan mereka dari berbagai bidang keahlian dan pekerjaan baik yang ASN maupun swasta (dengan dilabeli sebagai kiai, ajengan, profesor, pakar ini, ahli itu dan lain-lain) dimunculkan dan dimintai komentarnya tentang film itu. Selanjutnya disebar di media sosial agar diketahui banyak orang. Benar, sempat viral sampai saya dihubungi seorang perwira menengah dengan ditunjukkan nama-nama 20 tokoh, lalu sang perwira bertanya, "Para penggiat sistem khilafah ya Gus?" Saya jawab, "Benar".

Tentu harapan mereka dengan memunculkan *endorsement* para tokohnya bertujuan agar banyak gen Y dan gen Z yang tidak tahu apa-apa tapi mempunyai semangat

keagamaan bisa terbuai, terlena dan terperangkap, lalu bisa diajak masuk dalam lingkar jaringan kelompok itu.

Masalah klaim bahwa kerajaan di Nusantara berjejaring dengan khilafah seperti klaim mereka, biarkan ahli yang menjawabnya. Kalau saya akan akan bilang, bila semisal berjejaring dan berjejak terus kenapa? Jangankan hanya jejak, dalam kitab-kitab kuning -sebagaimana saya sampaikan di banyak forum- malah tertulis dan tersebar luas di pesantren-pesantren tentang bab imamah maupun *imam a'dham* ataupun *imamah udzma* atau khilafah. Namun selain tidak sama dengan khilafah ala Hizbut Tahrir, juga para kiai NU mempunyai nalar pemahaman sendiri. []

NEGARA DEMOKRATIS KOK MEMBLOKIR JEJAK KHILAFAH

PASCA NOBAR film *Jejak Khilafah di Nusantara* yang ditayangkan *live* di Youtube kanal *Khilafah Channel* pada Kamis 20 Agustus 2020, para simpatisannya tampak gembira sekali dan merasa menang serta khilafah tinggal di depan mata (persis kayak saat Hizbut Tahrir Suriah ikut memberontak bersama para pemberontak lainnya dan terjadi perang, maka Hizbut Tahrir Indonesia sudah gembar-gembor bahwa khilafah sudah hampir terpegang, ternyata malah Baghdady yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah, dan tentu itu ditolak oleh Hizbut Tahrir karena dianggap tidak sesuai dengan formulasi khilafah ala Hizbut Tahrir).

Kegembiraan pasca nobar ini bisa ditilik semisal dari puisi Fahmi Amhar yang bilang jejak khilafah ada di India, Turki, Mesir juga di Madinah dengan menyebut Tsaqifah Bani Saidah (salah dia menulis Saqifah (سقيفة) pakai huruf ts alias huruf ث . Kalau ingin tahu kata Saqifah silakan lihat semisal di *Tarikh Tabari* juz 4 yang mengisahkan tentang peristiwa Saqifah relatif panjang, ada 8 halaman).

Lalu saya juga baca status milik Doni Riw yang isinya, walaupun filmnya diblokir, tapi berhasil berkelit dalam tiga kali pemblokiran dan itu menurutnya adalah kemenangan perang gerilya *cyber* yang bahkan medan pertempurannya adalah milik kapitalis sendiri (kata Kang Rozan mantan aktivis Hizbut Tahrir, maling biasanya lebih pintar). Lalu si Doni mengatakan, film itu sekaligus menjadi tanda kekalahan peradaban sekuler yang sebentar lagi akan menjadi nyata.

Dua hal akan saya tanggapi tentang jejak dan demokratis. *Pertama*, masalah jejak khilafah yang ingin dikoarkan sampai berbusa-busa hingga perut lapar dan hampir pingsan itu andaikan benar ada jejak, tapi hal itu bukan dalil perintah wajib agar NKRI diubah menjadi khilafah. Bahkan dalam kitab *mutabannat* (kitab otoritatif milik HT, yang bila dalam BM: Bahtsul Masail NU disebut dengan *kutub mu'tabarah*) dijelaskan bahwa dalam fiqih, tarikh atau sejarah tidak boleh dijadikan sumber hukum (lihat kitab *Nizam al-Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani).

Kedua, nampaknya logika demokrasi HT adalah demokrasi liberal ala Barat dan sejenisnya dimana kebebasan total terjadi. Saya sudah kritik nalar saklek HT yang dipakai HT saat memahami demokrasi (baca artikel saya di Jurnal Islamica Pasca UINSA DOI: https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.28-58).

Demokrasi di Indonesia tentu beda dengan Barat. Perbedaan inilah yang menjadi ciri khas sebagai negara yang punya agama dan budaya adiluhung. Agama dan budaya adiluhung inilah yang menghasilkan kesepakatan bernegara yang disebut NKRI. Tentu kalau sudah

disepakati harus dijaga, kalau ada yang mau menggantinya pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghalanginya. Karena pengubahan tidak menghasilkan kemaslahatan tapi malah pertengkaran. Buktinya sekarang ini, di medsos muncul pertengkaran, belum lagi di dunia nyata dan di masyarakat.

Mari kembali sama-sama merawat NKRI wahai simpatisan, mari bareng-bareng kita sikat para petualang politik dan para koruptor. []
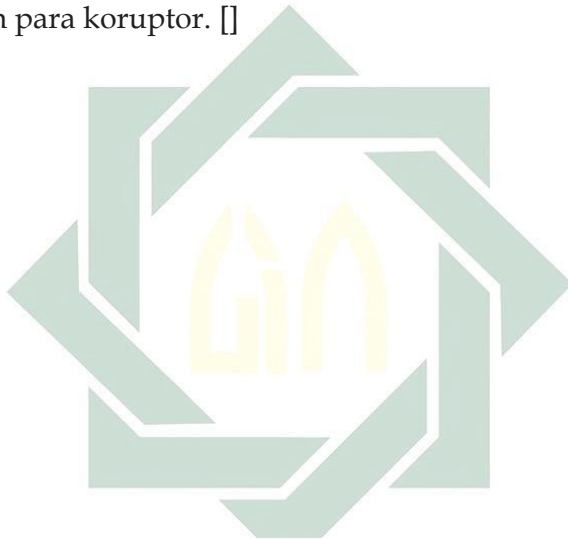
TURKI USMANI TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI KHILAFAH

DALAM KITAB kuning yang "biasa" dikaji di pesantren, syarat menjadi *imam a'dzam* atau khalifah salah satunya adalah harus berasal dari Quraisy. Hal itu dapat dilacak semisal dalam beberapa kitab tarikh seperti kitab *Tarikh Al Umam wa al Mulk* karya Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Tabari, juga kitab *Al Imamah wa al Siyasah* karya Al Imam Abi Muhammad Abdullah bin Muslim Ibn Qutaybah Al Dainuri, dan kitab *Tarikh Al Khulafa*' karya Al Hafidz Jalaluddin Al Suyuthi. Ketiga kitab tarikh di atas mengisahkan, saat terjadi perdebatan di Saqifah, tokoh Muhajirin berargumen keutamaan suku Quraisy di hadapan kaum Ansor.

Pentingnya suku Quraisy sebagai salah satu syarat menjadi khalifah ini ditegaskan lagi oleh Al Mawardi dalam fiqih siyasahnya *Al Ahkam al Sultaniyyah* bahwa syarat seorang imam yang ketujuh adalah bernasab Quraisy karena adanya nash dan ijmak. Al Mawardi mengajukan bukti historis bahwa saat di Saqifah, Abu Bakar menolak klaim khilafah atas Sa'ad bin Ubadah dengan memakai argumen hadis "الأئمة من قريش". Al Mawardi masih memungkasi supaya kita mengabaikan pendapat yang menyimpang dari

Dlirar yang membolehkan posisi imamah kepada seluruh manusia. Tidak hanya Al-Mawardi, Imam Ghazali dalam kitabnya *Al-Iqitshad fil I'tiqad* juga menegaskan hal sama dengan menggunakan dalil hadis di atas.

Kata kunci Quraisy untuk jabatan imam atau khalifah akhirnya menjadi baku dalam fiqih, semisal dalam kitab *Fathul Wahhab* dan kitab *Al-Bujayrami alal Khatib* juga *Hasyiyah Al Bajuri ala Ibn Qasim Al Ghuzi* dijelaskan salah satu syarat *imam a'dzam* adalah dari suku Quraisy karena adanya hadis dari Imam Nasai. Selanjutnya Syaikh Zakaria Al Ansori dalam *Fathul Wahhab* menjelaskan hierarki keterpilihan alternatif.

Lalu apa kaitan dengan Turki Usmani? Turki Usmani dalam penelusuran saya bukan dari klan Quraisy. Dalam buku *The Islamic Dynasties* karya Clifford Edmund Bosworth dan dalam buku *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* dijelaskan bahwa Turki Usmani berasal dari *Qayigh Clan* (suku Kayi) salah satu suku di Turki Barat. Maka dinasti Usmani yang begitu dipuja *khilafers* dan diratapi keruntuhannya bukan termasuk katagori khilafah bila mengacu kepada syarat ideal dalam perspektif kitab kuning.

Tidak hanya syarat yang tidak terpenuhi, klaim *khilafers* atas nusantara adalah negara vasal adalah tergugurkan. Dalam wikipedia, negara vasal adalah "negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Jika negara vasal dalam bahaya dan diserang negara lain, maka negara "pelindung" akan membantu negara vasal tersebut."

Dari peta kekuasaan Turki Usmani seperti dalam karya Albert Hourani yang berjudul *A History of The Arab Peoples*

tergambar peta kekuasaannya tidak sampai di nusantara. Demikian juga peta dari buku *The Cambridge History of Islam* peta puncak kekuasaan Turki Usmani tidak tercantum nusantara. Justeru peta negara Eropa yang dikusai Turki Usmani ditampilkan (lihat petanya).

Lebih jauh, Prof. Oman Fathurahman (dalam republika.co.id) meneliti manuskrip dan menjelaskan memang benar bila Aceh memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Turki Utsmani, tetapi tidak ada riwayat sebagai negara vasal. Pada abad ke-16 Aceh pernah mengajukan diri sebagai negara vassal dan pada abad ke-19 kembali meminta, tetapi Turki tetap menolak. Bagi Turki, tidak ada keuntungan signifikan jika menjadikan Aceh sebagai negara vasal. Apalagi Aceh juga beberapa kali dipimpin pemimpin perempuan (*sultanah*) yang bertentangan dengan prinsip kekhalifahan. Setidaknya, mulai abad ke-14, Aceh memiliki empat *sultanah*.

Memang benar penjelasan Prof. Oman bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah, juga menjadi hakim *mazalim* maupun gubernur dan lain-lain seperti dijelaskan oleh kitab otoritatif milik Hizbut Tahrir sendiri semisal kitab *Al Nizam al-Ijtima'i fil Islam* hal 81, kitab *Nizam Al Hukm fil Islam* hal 53, *kitab Nizam Al Islam* hal 104, kitab *Ajhizat Daulat Al Khilafah* hal 23.

Turki Usmani pernah berjaya dan membawa kemajuan sebagaimana sejarah dinasti muslim yang lain seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Safawi, Moghul ataupun kerajaan di Peureulak, Samudra Pase, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Ceribon, Madura, dan Mataram serta kerajaan muslim lain di Nusantara.

Turki Usmani semakin mundur setelah kalah perang dengan pasukan sekutu Kristen, juga pernah dikalahkan oleh Rusia walau bisa direbut kembali. Turki semakin lemah karena terjadi pemberontakan-pemberontakan. Prof. Ali Mufrodi dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam juga menyebut kemunduran Turki Usmani karena problem internal seperti Sultan Muhammad III dengan membunuhi semua saudara laki laki serta para janda bekas dari ayahnya. Kekuasaan memang terkadang kejam. []
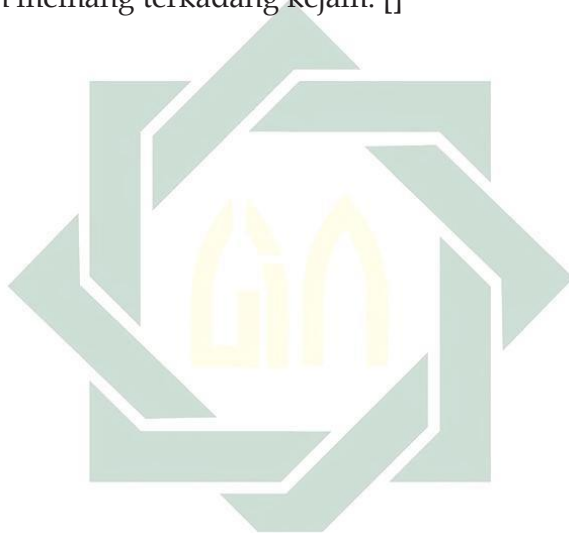
KEISLAMAN KITA KARENA KHILAFAH?

EMAK-EMAK *khilafers* begitu semangat dalam suatu acara *online* membahas jejak khilafah di Indonesia yang dihadiri 1.000 emak-emak penceramah se-Indonesia pada Ahad, 6 September 2020. Tampil seorang emak dari Banda Aceh berorasi bahwa kehadiran Walisongo tidak lepas dari khilafah karena mereka adalah utusan khalifah yang mengemban tugas politik sekaligus dakwah, hingga Islam menyebar di tanah Jawa dan lahir kekuasaan politik Islam yang menginduk pada khilafah.

Para emak juga berupaya menggiring kesimpulan bahwa berdasar fakta-fakta sejarah inilah agar umat Islam di Nusantara kembali berjuang menegakkan Khilafah. Karena dengan Khilafahlah bangsa Indonesia bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Seruan para orator emak-emak ini disambut para peserta dengan pekikan takbir dan kibaran panji Rasulullah *rayah-liwa* di tempatnya masing-masing. Lalu di akhir pemberitaan dinarasikan adanya suasana haru dan rindu melingkupi para peserta, terutama saat *shalawat asygil* dan nasyid Khilafah dikumandangkan (https://www.muslimahnews.com/2020/09/08/pesan-

liqo-muharram-mubalighoh-1442-h-tak-bisa-ditolak-islamnya-nusantara-karena-ada-peran-khilafah/).

Kalau kita jujur, klaim berupa keislaman kita karena adanya khilafah seperti acara yang diadakan emak-emak *khilafers* di atas adalah klaim sepihak dan tidak adil. Karena memang masuknya Islam di Indonesia ada beragam penjelasan.

Buku *Atlas Walisongo* karya Agus Sunyoto menjelaskan hal itu. Atau buku *Peran Dakwah Habaib/Alawiyin di Nusantara* yang di antara kontributornya adalah Habib Luthfi Yahya, Azyumardi Azra, Engseng Ho, Frode F. Jacobsen dan lain-lain, di mana dalam buku tersebut dipaparkan ada lebih 20 penelitian tentang sejarah diaspora "Habaib Hadramaut" di nusantara seperti karya Aboe Bakar Atjeh, Edward Alpers, A Gwyn Campbell and Michael Salman, Kazuhiro Arai, Naquib Al Attas, Azyumardi Azra, Van Den Berg, Michael Feener, Ulrike Freitag, Michael Gilsenan, Alwi jin Thahir Al Haddad, Engseng Ho, dan lain-lain.

Choirul Anam dalam karyanya *KH. Abdul Wahab Chasbullah Hidup dan Perjuangannya* mengatakan, "Untuk mengetahui sejak kapan Islam masuk dan menguasai nusantara Indonesia? Jawabannya hingga kini masih beberapa versi. Para sejarawan merasa resah jika ditanya: Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapa yang membawa, wirausahawan (pedagang) atau guru-guru sufi. Dari mana asal mereka, dan daerah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam? Problem kapan masuknya Islam ke Indonesia sangat sulit dipastikan oleh karena Indonesia sangat luas, dan letak geografis Nusantara berada di persimpangan jalan laut niaga antara Arab, India dan

Cina. Karena itu para sejarawan sendiri masih berselisih pendapat, ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke 11 atau ke 13 M dan dibawa oleh guru-guru tasawuf dari Gujarat. Tapi ada pula yang berpendirian pada abad ke 7 M dan dibawa langsung oleh pedagang-pedagang Arab. Ada lagi yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia dari Persi dan bermazhab Syiah. Masih banyak Iagi teori tentang masuknya Islam ke Nusantara Indonesia."

Anam juga memaparkan hasil seminar di Sumatera Utara tahun 1963, juga mengutip pendapat Van Den Berg, tidak ketinggalan pandangan L. Van Rick Vorsel, juga Habib Alwi bin Thahir Al Haddad. Habib Alwi bin Thahir Al Haddad menjelaskan Islam masuk ke Jawa zaman Khalifah Usman bin Affan.

Intinya, Islam masuk Nusantara memang beragam pendapat baik tahun, lokasi pulau yang dimasuki juga profesi pembawa dan asal negara pembawa. Lebih jelas lagi adalah paparan Prof. A. Hasimy dalam karyanya *Syiah dan Ahlussunnah: Saling Rebut Pengaruh dan Kekusaaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (terbitan Bina Ilmu 1983) mengatakan, "Dari catatan sejarah masuknya Islam ke Aceh dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di sana, dapatlah kita mengetahui bahwa sejak semula Partai Syiah dan Partai Ahlus Sunnah telah saling rebut pengaruh dan kekuasaan." Tentu pendapat Prof A. Hasimy ini memastikan bahwa kalau Syiah pernah berkuasa di Aceh pastinya bukan hanya khilafah yang membawanya tapi ada beragam pembawa Islam ke Nusantara. []

KHILAFAH DAN BUKU ZIZEK, *PANDEMIC COVID-19 SHAKES THE WORLD*

SEWAKTU SAYA menjadi maniak khilafah, apapun yang bisa saya *otak-atik-matuk* dari kejadian di dunia, maka akan saya jadikan amunisi-argumentasi untuk meyakinkan para calon korban agar ikut ke gagasan khilafah milik kami. Contoh yang saya ingat adalah ramainya negara Eropa untuk membentuk Uni Eropa pada tahun 1993 (awal saya kuliah di UNAIR). Maka realitas itu saya suarakan bahwa negara Barat yang kafir saja sadar untuk bergabung, masak kita yang muslim justeru negaranya terpecah dalam sekat nasionalisme dan negara bangsa. Maka argumen saya ini masuk ke otak korban yang masih imut Islam dan baru hijrah itu. Oh ya harap dicatat, Uni Eropa tidak menjadi satu negara lho, dan ternyata baru saja Inggris malah keluar dari Uni Eropa pada awal 2020 yang dikenal dengan *Brexit*.

Kalau yang di bawah ini bukan saya yang menggunakan, tapi Ismail Yusanto (jubir eks-HTI). Apa itu? Yakni adanya buku "*Mapping The Global Future*" yang dikeluarkan oleh NIC yang sebagian isinya adalah skenario fiksi berdirinya khilafah 2020 oleh cucu bin Laden. Yusanto menuduh saya sebagai orang telmi (telat mikir) karena saya

menolak gagasan khilafah Hizbut Tahrir (bahkan keluar dari Hizbut Tahrir). Padahal menurut Yusanto, NIC yang kafir saja berpikir rasional dan antisipatif akan berdirinya khilafah seperti di buku *Mapping the Global Future* tersebut.

Harap diketahui ya, kenyataannya sampai saat ini, yang berdiri adalah khilafah ISIS. Malah sekarang ini, di tahun 2020 ini, yang heboh di dunia bukan khilafah, tapi "penjajahan" makhluk kecil yang bernama covid-19.

Pada tahun 2020 ada buku baru karya filosof kontemporer, Slavoc Zizek. Sebagian isinya adalah penjelasan bahwa penyebaran corona juga memicu epidemi yang luas dari virus ideologis (*ideological viruses*) berupa berita palsu, teori konspirasi, dan ledakan rasisme. Tapi mungkin juga memunculkan virus ideologis lain berupa virus pemikiran masyarakat alternatif, masyarakat di luar negara-bangsa, serta sebuah masyarakat yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk solidaritas dan kerja sama global.

Tentu statemen di atas akan diotak-atik matuk dan *diramesi* oleh pecinta khilafah bahwa orang komunis pun juga berpikir progresif seperti di atas, yang hal itu juga selaras dengan semangat pejuang khilafah, yaitu pemikiran alternatif untuk masyarakat muslim agar bersatu secara mendunia dengan menghilangkan negara bangsa menuju negara khilafah. Tapi asal tahu ya, arah pikiran Slavoc Zizek adalah bukan khilafah tapi “..*reinvent Communism based on trust in the people and in science*. []

MENGKRITIK GUS BAHA, MEMUJI FELIX

JUMAT SORE 11 September 2020, saya dihubungi teman dosen UINSA dari Fakultas Syariah, Dr (*cand*) Wahid Hadi Purnomo (WHP). Intinya, beliau bertanya siapa orang di youtube yang disebut Gus Nawawi Pasuruan. Dengan secepat kilat saya jawab, karena saya bukan gus juga tidak *kemegus*, apalagi sekretaris *per-gus-an*, maka saya tidak kenal dia. Lalu Dr. WHP bilang di youtube yang tayang 13 Agustus 2020 itu, Nawawi begitu simpatik kepada Felix Siauw dan banyak memujinya (https://youtu.be/N_Otb7Li4oc).

Saya membuka video yang dikirimkan Dr. WHP, dalam video itu Nawawi mengaku kenal dengan Felix dari salah satu ustadz di Pondok Sidogiri. Dua poin youtube yang panjang yang saya ingat. *Pertama*, saat Nawawi bertanya dengan polosnya kenapa kalau khilafah adalah ajaran Islam, tapi dianggap sebagai momok menakutkan oleh yang lain? Felix dengan panjang lebar mengulas, dan intinya menurut Felix adalah karena adanya *framing* buruk atas khilafah. Silakan ikuti artikel di buku ini yang mengulas seputar khilafah bukan dalam bentuk *framing*, tapi bisa data dan fakta.

Kedua, Nawawi bertanya dengan nada kayak orang belum tahu sama sekali terhadap HTI, yakni apakah Felix *mentaghutkan* Pancasila dan mengkafirkan NKRI. Tentu Felix menjawab itu fitnah, lalu Felix mencoba mengurai sejarah Pancasila. Dia bilang menghormati kesepakatan atas NKRI. Namun kata Felix Indonesia masih kurang sempurna dan khilafah yang akan menyempurnakan dengan jalan dakwah.

Sayangnya Nawawi berhenti tidak melanjutkan bertanya dengan kritis bagaimana final proses dakwah khilafah di NKRI, dan bagaimana nasib NKRI saat itu? Malah Nawawi bertanya hal lain yang menekankan kalau memang khilafah adalah ajaran Islam, lalu kenapa ada orang bahkan ormas Aswaja yang anti khilafah, selain *framing*, apa penyebabnya? Felix yang menguasai medan diskusi dan konteks gerakan khilafah di Indonesia saat ini berusaha menurunkan *speed* obrolan dan obralan jawabannya.

Saya sudah menerka jawaban Felix, maka youtube yang masih panjang itu saya geser ke bagian akhir, dan Nawawi malah menyimpulkan seharusnya dengan yang beda sesama muslim bukan dipersekusi, tapi dinasehati, masak dengan kafir non-muslim malah bisa bagus dan manis muka, tapi dengan muslim tidak demikian. Itulah inti yang dilakukan Nawawi atas dialog dengan Felix.

Nawawi ini sama sekali tidak melakukan kritik, tapi malah mengapresiasi penuh terhadap Felix. Beda saat di youtube tayang 15 Juli 2020, dia cenderung "mencari kesalahan" Gus Baha (https://youtu.be/itbAz6naPNg).

Nawawi di awal video begitu mengagumi Gus Baha dengan sederet pujian. Namun di kalimat selanjutnya dia

memberi statemen bahwa saat kita mengagumi seseorang, jangan sampai kita kehilangan akal sehat lalu menjadi cinta buta.

Nawawi bilang bahwa ada suatu rekaman video di mana Gus Baha "menggembosi" UAS dan UAH. Inti videonya adalah ucapan Gus Baha terkait pondok NU atau lembaga NU yang mengundang UAS dan UAH karena si pengundang tidak tahu latar belakangnya. Lalu Gus Baha mengibaratkan dengan menjelaskan kajian epistemologi hukum Islam bahwa bila ada hukum global bertentangan dengan hukum detail, maka yang dimenangkan yang detail. Naifnya, sekarang ini malah ulama kita tahu ilmu detail, justru diajak ke ulama yang tahu ilmu global.

Saya membenarkan fenomena yang disinggung Gus Baha di forum tertutup, bukan ceramah umum itu. Kalau kita banyak mengkaji buku-buku keislaman dan menggunakan nalar kritis, akan bisa menyetujui statemen Gus Baha. Saat ini dengan fenomena hijrah superfisial, dan munculnya ustadz dadakan plus lahirnya artis yang beralih profesi sebagai pendakwah ataupun mereka yang sedikit-sedikit bilang kembali ke Alquran dan hadis adalah bukti nyata atas fenomena keberagamaan saat ini.

Lalu Nawawi menjelaskan kepada Gus Baha layaknya menerangkan kepada muridnya tentang siapa UAS dengan disebutkan banyak gelarnya, dan pengikutnya yang banyak, serta sekian penjelasan lain. Pertanyaan sederhana, apakah komunitas yang dimiliki Nawawi ini akan mengundang penceramah luar yang tidak satu gagasan dengan komunitasnya?

Statemen Nawawi tentang cinta buta terhadap tokoh jangan sampai kehilangan akal sehat, maka kita bisa ganti balik bertanya, apakah Nawawi pernah mengkritik sang junjungannya? Masak junjungannya seratus persen benar terus?

Iseng-iseng Saya mencoba *sowan* ke *google* ternyata ketemu Nur Sugik mengunjungi pengurus FPI Pasuruan dan di situ ada juga Nawawi (https://www.youtube.com/watch?v=IN1ce2C-anY&t=3s). Tampaknya tidak hanya Gus Baha, KH. Marzuqi Mustamar pun juga dia singggung di https://youtu.be/IN1ce2C-anY. Nawawi berupaya "meluruskan" statemen KH. Marzuqi Mustamar. []

FRAMING KHILAFERS TERHADAP TOKOH AGAMA

SAYA TEGASKAN bahwa jejak khilafah dalam kitab kuning pasti lebih "mutawatir" ketimbang jejak khilafah secara historis lalu dibuat film. Sebenarnya hampir seluruh pewaris kitab kuning alias santri juga tahu itu dan tidak mengingkarinya.

Saya kutipkan bagaimana Abu al-Hasan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menulis kata "khilafah" sebanyak 35 kali, kata "khalifah" 25 kali, kata "imamah" sebanyak 94 kali dan kata "imam" sebanyak 13 kali (semoga tidak ada yang kelewatan, karena hitung manual). Pun demikian kitab *Fathul Wahhab*, *Asnal Mathalib* dan *Minhajut Thullab* karya Syaikh Zakariya al-Anshari atau kitab *Rawdhatut Thalibin wa 'Umdatul Muttaqin* dan *Minhajut Thalibin* karya al-Nawawi, *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haytami, *Mughnil Muhtaj* karya Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Nihayatul Muhtaj* karya Imam al-Ramli dan lain-lain.

Alangkah naif bila *khilafers* menyebarkan poster Prof. Ahmad Zahro dengan melakukan *framing* (pembingkaian) seakan Prof. A. Zahro setuju dengan khilafah ala HTI.

Tentu ini efeknya bisa mengadu sesama tokoh NU, atau berharap agar umat tertipu sehingga pro dengan khilafah ala HTI. Saya memastikan bahwa Prof. A. Zahro tidak mau mengganti NKRI dengan khilafah seperti yang digemborkan oleh *khilafers*.

Terlepas poster itu statemen Prof. A. Zahro atau bukan, seperti yang saya jelaskan di atas bahwa para akademisi studi Islam dan para santri sudah tahu tentang wacana khilafah dalam kitab klasik (*turāts*) muslim. Apalagi bila kuliah di Prodi Pemikiran Politik Islam seperti di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINSA yang kebetulan saya juga mengajar di situ. Beragam sejarah politik dan sistem politik umat Islam dijelaskan dengan ratusan referensi yang lebih kaya.

Kiai Wahab dan Jejak Khilafah di Kitab Kuning

Kembali ke "kitab kuning" dan jejak khilafah. Para kader NU yang hidup sekarang ini ketika memahami teks-teks kitab kuning tentang imāmah atau *al-imam al-a'zham* jika tidak melewati konstruksi pemahaman ala KH. A. Wahab Chasbullah, maka akan mudah tertarik untuk ikut memperjuangkan khilafah ala Hizbut Tahrir.

Perlu diketahui, Kiai Wahab dalam pidatonya di parlemen pada tanggal 29 Maret 1954 yang dimuat dalam majalah "Gema Muslimin" dengan judul, "**Walijjul Amri Bissjaukah"** mengatakan:

> "Saudara2, dalam hukum Islam jang pedomannja ialah Qur'an dan Hadits, maka di dalam kitab2 agama Islam Ahlussunnaah Waldjama'ah jang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tertjantum empat hal tentang Imam A'dhom dalam Islam, jaitu bahwa Imam A'dhom di seluruh dunia Islam itu hanja satu. Seluruh dunia Islam

> jaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mupakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama Imam jang sah, jaitu bukan Imam jang darurat. Sedang orang jang dipilih atau diangkat itu harus orang jang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam jang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semendjak 700 tahun sampai sekarang…. Kemudian dalam keterangan dalam bab jang kedua, bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A'dhom jang sedemikian kwaliteitnja, maka wadjib atas ummat Islam di-masing2 negara mengangkat Imam jang darurat. Segala Imam jang diangkat dalam keadaan darurat adalah Imam daruri…….. Baik Imam A'dhom maupun daruri, seperti bung Karno misalnja, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah Walijjul Amri."

Pidato Kiai Wahab di atas setidaknya dapat ditarik tiga pemahaman: *Pertama,* bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam baik yang disebut dengan imamah maupun khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak menurut Kiai Wahab sudah tidak ada lagi semenjak 700 tahun sampai sekarang.

Kalau pidato Kiai Wahab itu pada tahun 1954, maka bila dikurangi 700 tahun hasilnya sekitar 1250-an Masehi, masa itu memang masa keruntuhan dinasti Abbasiyyah atau masa kemundurun Islam. Tahun 1250 adalah masa akhir periode klasik sejarah perkembangan peradaban Islam. Setelah masa itu dalam perspektif Kiai Wahab sudah tidak ada lagi orang berkaliber mujtahid yang merupakan syarat untuk menjadi imam a'dzam.

Kedua, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia berikut NKRI adalah sah secara hukum Islam.

Ketiga, pidato ini sekaligus menafikan pendapat bahwa Kiai Wahab bercita-cita menegakkan kembali khilafah dengan membentuk komite khilafah, karena terbukti Kiai Wahab menjelaskan bahwa sudah 700 tahun tidak ada orang yang setingkat mujtahid untuk menduduki kursi sebagai Imam atau khalifah. Lantas, apa logika Kiai Wahab dengan mengajukan argumen bahwa khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi sejak 700 tahun.

Kalau kita membuka lembaran "kitab kuning", semisal *al-Ahkam al-Sulthaniyah,* di situ dijelaskan bahwa *ahl al-imamah* (orang yang berkualifikasi menjadi imam) harus memenuhi syarat adil, berilmu yang mampu untuk berijtihad, selamatnya pancaindra dan fisik dari kekurangan, wawasan kepemimpinan yang luas, keberanian dan nasab Quraisy.

Poin tentang berilmu yang mampu untuk berijtihad inilah tampaknya yang dijadikan pijakan Kiai Wahab. Kalau ingin lebih jelas lagi dalam kitab *Fath al-Wahhab* langsung tertulis salah satu syarat menjadi *al-imam al-a'dzam*, di antara adalah muslim, mukalaf, merdeka, adil, dan seorang Mujtahid.

Menariknya lagi, dalam pidato tersebut, Kiai Wahab menjelaskan lebih lanjut bahwa karena syarat menjadi *imam a'dzam* (seperti dalam al-Mawardi) sudah tidak terpenuhi, maka Soekarno absah menjadi pemimpin RI sebagai *waliyyul amri ad-dharuri bisysyaukah*. Artinya, syarat pemimpin yang ideal diturunkan menjadi syarat minimal realistis. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan lain bahwa Gus Dur yang mempunyai kekurangan fisik juga

absah menjadi presiden, karena memang presiden tidak sama dengan *imam a'dzam* sehingga syarat ideal seperti dalam kitabnya Imam al-Māwardī tidak diperlukan.

Ahmadiyah dan Syiah lebih *"Gentle"*

Lebih jauh, jejak khilafah atau imamah dalam kitab kuning maupun dalam catatan historis tidak bisa langsung sebagai pembenar atas judul film *Jejak khilafah* yang dibuat dan didukung oleh *khilafers*. Karena memang beda pemahaman khilafah dalam kitab kuning dengan apa yang dipahami *khilafers*. Kalau Hizbut Tahrir bisa mengklaim gegara ada kajian khilafah atau imamah dalam kitab kuning, maka Ahmadiyah dan Syiah juga bisa mengklaim. Namun, tampaknya Ahmadiyah dan Syiah lebih "*gentle*" daripada *khilafers*. Mereka membuat formulasi sendiri tanpa harus mencari pembenar dalam kitab kuning atau sejarah Walisongo sekadar sebagai legalitas palsu dan menipu kaum awam lalu harapannya bisa menjadikan warga NU menjadi anggota mereka. []

TIDAK ADA NOMENKLATUR DAULAH KHILAFAH DALAM AWAL SEJARAH ISLAM

KITAB OTORITATIF Hizbut Tahrir karya Atha Abu Rashtah diberi judul *Ajhizat Daulah Khilafah*. Tentu kitab ini meyakini ada negara yang disebut *daulah khilafah*. Lalu di dalamnya disusun argumen untuk menjelaskan komponen-komponen dari ajaran Nabi yang dianggap sebagai bagian dari apa yang disebut dengan *daulah khilafah*.

Saya mencoba membuka kitab-kitab secara cepat seperti *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, *Tarikh Tabari* dan lain-lain. Saya tidak atau belum menjumpai dua kata itu bergandengan. Hanya ada kata khilafah yang saya temui. Apabila dijumpai kata khilafah, dalam hemat saya, bermakna "penggantian" atau "kepemimpinan" atau "pemerintahan". Misalnya dalam *Tarikh Tabari* jilid 4 tertulis (ذكر أمر ابي بكر فى اول خلافته) Atau dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* saat menjelaskan tentang imamah sebagai (موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا).

Demikian juga dalam kitab *Al-Imamah wa Al-Siyasah* karya Ibn Qutaybah saat menyebut kata khilafah maknanya juga bukan negara khilafah:

ولما توفي ابو بكر وولي عمر وقعد فى المسجد مقعد الخلافة، اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين

Tidak ketinggalan, dalam *Tarikh Al Khulafa'* karya Al Suyuthi, kata khilafah juga bukan bermakna negara, contohnya ada bab (فصل فى بيان أن الأئمة من قريش والخلافة فيهم) . Lalu beliau menyebutkan hadis hadis dari berbagai jalur dan beragam redaksi semisal:

الأئمة من قريش, الملك فى قريش, الخلافة فى قريش, الامراء من قريش

Atau dalam bab selanjutnya dari karya Al Suyuthi yakni bab (فصل فى مدة الخلافة فى الاسلام) , lalu beliau menyitir hadis:

الخلافة ثلاثون عاما، ثم يكون بعد ذلك الملك (اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره)

Saya baru saja mendapatkan kitab dari situs *khilafers* yang katanya manuskrip tulisan Imam Jalaluddin as Suyuthi berjudul *Al-Inafah fi Ratbatil Khilafah*. Itupun maknanya juga bukan *Daulah khilafah*. Tercantum redaksi di mukaddimah:

ودار البحث بيني وبينه في (أشياء)، فكان مما سألني عنه الخلافة هل لها أصل في الشرع (و) وردت بها الأحاديث أو هي أمر (عرفي) (اصطلح) عليه الناس؟

Dengan demikian, kalau meminjam istilah khas kaum Wahabi jika ditanya "Adakah *daulah khilafah* dalam sejarah awal Islam?" Tentu dia akan menjawab, "Tidak ada itu *daulah khilafah*, dalilnya mana? bidah itu!"

Bagi *khilafers* jangan mengira saya Wahabi, dan juga jangan bertanya, "Masak Syaikh Taqiyuddin Al Nabhani

tidak boleh berijtihad?" Jawaban saya adalah silakan saja berijtihad siapa yang melarang. Namun bagi para tokoh NU seperti KH. Wahab Chasbullah dalam konteks sistem politik yang disebut kepemimpinan agung atau *imamah udzma*, ijtihad sudah tidak berlaku karena mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi semenjak 700 lalu.

Namun jangan beranggapan bangunan fiqih dalam kitab kuning yang diacu dalam Bahtsul Masail NU stagnan, tidak, malah progressif. Buktinya dalam Bahtsul Masail NU mengatakan maslah khilafah adalah ijtihadiyah dan malah para ulama sudah menetapkan NKRI adalah hasil kesepakatan. Tentu ini bukti progresivitas tokoh tokoh NU.[]

PRESIDEN SEBAGAI "KHALIFAH" KECIL

KONSTRUKSI APIK (seperti diuraikan sebelumnya) dicetuskan Mbah Kiai Wahab Chasbullah dalam berpegang kitab kuning yang tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Konstruksi itu adalah berkaitan dengan wacana *imam a'dzam* (pemimpin agung dunia Islam). Dalam kitab kuning yang merupakan pegangan para kiai, dijelaskan bahwa untuk menjadi *imam a'dzam,* syaratnya harus seorang mujtahid (baca semisal *Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibn Qasim Al Ghuzi* dan *Al Ahkam Al Sultaniyyah* serta *Fathul Wahhab*).

Keapikannya terlihat dimana Kiai Wahab konsisten merujuk kitab kuning tentang wacana *imam a'dzam*, saat mau membingkai keabsahan Soekarno sebagai presiden dalam pranata negara bangsa (baca artikel saya di situs: https://arrahim.id/ana/framing-eks-hti-seolah-kh-a-wahab-hasbullah-dan-prof-ahmad-zahro-pro-khilafah-versi-hti/ atau di situs: https://alif.id/read/ara/eks-hti-penuh-manipulasi-melintir-pidato-mbah-wahab-hingga-mencatut-prof-ahmad-zahra-b232284p/ atau di situs: https://www.nu.or.id/post/read/43446/mbah-wahab-nu-dan-khilafah-sebuah-koreksi).

Alasan Mbah Kiai Wahab berupa kualifikasi orang sebagai mujtahid yang sudah tidak ada semenjak 700 lalu menjadikan adanya peluang alternatif tentang kriteria seseorang pemimpin. Kemudian Soekarno disemati sebagai "*waliyyul amri al daruri bi al syaukah*" setelah sebelumnya Mbah Kiai Wahab berdiskusi dengan para kiai di beberapa pesantren. Dengan demikian, hemat saya, presiden Indonesia bisa disebut minatur dari khalifah alias Khalifah kecil. Pun demikian, NKRI adalah khilafah kecil.

Begitulah kelenturan kiai pesantren dalam melihat konstelasi politik. Mereka tidak hanya terpaku satu konstruksi politik yang menjadikan tidak ada alternatif lain, kayak yang dialami Hizbut Tahrir.
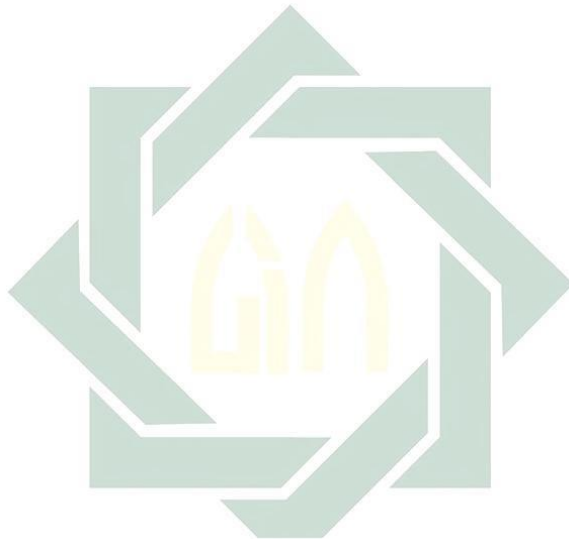
Saya contohkan wacana lain tentang kelenturan tapi masih berkelindan dengan kepemimpinan politik. Dalam *Hasyiyah Al Bajuri ala Ibn Qasim* dijelaskan bahwa imamah (pemimpin dalam politik) bisa legal melalui; *pertama*, dengan baiat oleh *ahlul halli wal aqdi*. Maupun *kedua*, dengan penunjukan imam sebelumnya atas seseorang yang mempunyai kualifikasi menduduki jabatan imamah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa juga dengan cara *ketiga* seperti kutipan di bawah ini:

إستيلاء شخص مسلم ذى شوكة متغلب على الامامة ولو غير اهل لها كصبي وامراة وفاسق وجاهل فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa di kitab kuning tetap menyediakan gagasan alternatif bila terjadi hal yang tidak "diinginkan" dalam gagasan ideal. Beda dengan Hizbut Tahrir yang kaku dengan gagasannya. Namun

anehnya mengklaim khilafah agung telah berjalan terus menerus sejak masa Nabi hingga 1924 (baca Taqiyuddin an Nabhani dalam karyanya "*Al-Dawlah al Islamiyyah*" hal 135-140). []

DARI IMAM-QURAISY KE IMAM MAHDI

MASIH TERKAIT dengan seorang *imam a'dzam*, kali ini beranjak kepada syarat lain dari *imam a'dzam* berupa harus berasal dari suku Quraisy. Syarat Quraisy ini juga secara ideal akan menggugurkan klaim HTI bahwa khilafah telah berlangsung sejak masa sahabat Nabi hingga Turki Usmani (baca artikel saya di situs: https://sangkhalifah.co/2020/08/28/perspektif-kitab-kuning-turki-usmani-tidak-memenuhi-kualifikasi-sebagai-khilafah/ atau di situs: https://arrahim.id/ana/justru-dalam-perspektif-kitab-kuning-turki-usmani-tidak-memenuhi-standar-kualifikasi-kekhilafahan/).

HTI tidak mengharuskan gagasan khalifahnya dari suku Quraisy dan mujtahid. Bagi mereka, kalau bisa khalifah sebagai seorang mujtahid dan dari suku Quraisy, maka itu adalah afdhol, tapi bila tidak pun, juga tetap absah. Statemen ini bisa ditelusuri dalam karya otoritatif mereka seperti kitab "*Nizam Al Hukm fi Al Islam*" halaman 55-56 dan kitab "*Ajhizat Dawlat Al Khilafah*" halaman 25.

Dalam rancangan UUD Hizbut Tahrir disebutkan bahwa khalifah yang penting adalah pria, muslim,

merdeka, baligh, berakal, adil, dan mampu (lihat UUD HT pasal 31 dalam kitab "*Nizam Al Islam*" halaman 95). Dalam UUD HT yang ada di kitab "*Al Dawlah Al Islamiyyah*" karya Taqiyuddin an Nabhani di halaman 258 pada pasal 30 dan 31 malah disebutkan tidak disyaratkan khalifah yang akan dibaiat harus punya kualifikasi afdhol (seperti mujtahid dan Quraisy pen.), syarat dianggap cukup bila dia lelaki, muslim, merdeka, baligh, berakal dan adil (syarat mampu belum dicantumkan).

Di atas terlihat "keliberalan" Hizbut Tahrir. Bagi saya, wacana kualifikasi Quraisy dan mujtahid bagi seorang *imam a'dzam* tetap penting. Masalah mujtahid sudah dipecahkan oleh Mbah Kiai Wahab. Sedang masalah Quraisy hemat saya dapat memakai nalar berikut.

Perlu diketahui, hadis tentang Quraisy ini adalah mutawatir. Hal ini bisa diteliti dalam buku "*Nazmul Mutanatsir minal Hadits Al Mutawatir*" karya Al Faqih Al Muhaddits Abi Abdillah Sayyidi Muhammad bin Abil Faidl Maulana Jakfar Al Hasani Al Idrisi (Al Kattani).

Dengan demikian, di era kontemporer agar cita ideal *imam a'dzam* tetap berjalan sesuai dengan kitab kuning, maka penting dikaitkan dengan era futuristik, yakni masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah gagasan yang diterima mayoritas aliran-mazhab dalam Islam, bahkan agama lain juga mengakui dan tentu sesuai dengan konstruksi kitab pegangan mereka (baca di situs: https://www.antvklik.com/rehat/agama-agama-besar-dunia-isyaratkan-kemunculan-imam-mahdi).

Al Kattani menyebut hadis tentang Imam Mahdi juga mutawatir (lihat di halaman 236 tentang:

احاديث "خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي"

Walhasil, cukup bagi kita menunggu Imam Mahdi yang mutawatir hadisnya dan pasti dia Qurays untuk memimpin dunia. Kapan, dimana dan siapa? Bukan urusan kita. Bagi saya, kalau itu janji Tuhan, maka saat Tuhan menurunkan janjinya hati kita akan digerakkan olehNya untuk nantinya mengetahuinya.

Untuk saat ini yang penting kita *nguri-nguri* negara bangsa dengan pemimpin atau presiden yang *rule of game*nya telah disepakati bersama. Kita mengisi dan memperbaiki yang kurang sesuai kapasitas kita.
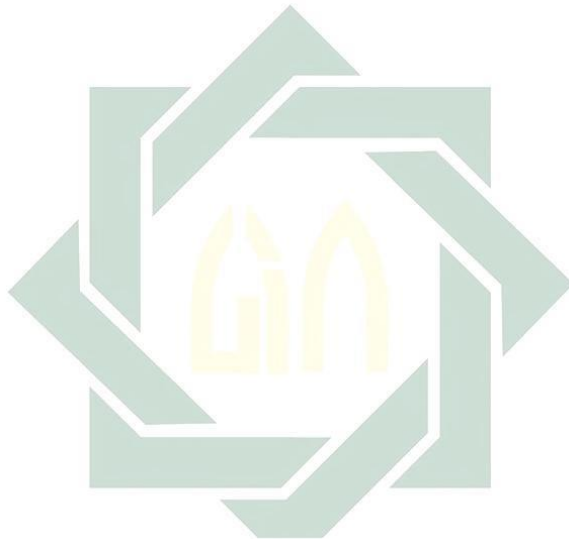
Dengan demikian, tidak akan menguras tenaga dan pikiran saling debat yang pro khilafah akan bilang, "Tanpa khilafah problem umat masih terus muncul dan tidak bisa diselesaikan." Sedang yang anti khilafah Hizbut Tahrir akan menjawab, "*Boro-boro* menyelesaikan problem umat, lha problem diri sendiri yakni mau mendirikan khilafah sudah puluhan tahun gagal dan banyak negara menolak. Kapan problem umat akan dipecahkan."

Untuk itu, wahai saudaraku tercinta dari *khilafers*, mari kita perbaiki bangsa ini bareng-bareng sebagaimana telah dirintis para pendiri bangsa.

Buat para pejabat, jangan korupsi sehingga tidak ada peluang bagi kelompok radikal untuk mencari celah bahwa banyak korupsi ini karena tidak diterapkannya khilafah. Walau sebenarnya pada masa khilafah tetap saja ada perilaku penguasa yang baik dan tidak baik.

Maaf untuk saudaraku non muslim, tulisan ini dalam rangka agar milenial NU tidak terpengaruh dengan gagasan khilafah HTI, dengan tetap berpegang kepada NKRI yang kita bangun bersama.

KHILAFAH AJARAN ISLAM?

SEBENARNYA KEYAKINAN Hizbut Tahrir bahwa khilafah adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam, sehingga harus diperjuangkan adalah sesuatu yang *debatable*. Karena kurang detailnya penjelasan yang dimaksud dengan klaimnya tersebut. Pernyataan di Buletin HTI "Al-Islam" edisi 856 (12 Mei 2017) bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, barang siapa yang menolaknya, maka sama dengan menolak Islam adalah kerancuan dalam berargumentasi yang disebut dengan *non-sequitur,* yakni argumen yang *jumping to conclusion.* karena khilafah adalah ajaran Islam, menolak khilafah sama dengan menolak Islam.

Kerancuan tersebut bisa ditinjau dari khazanah pemikiran politik Islam yang terdapat banyak wacana tentang konsep kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari makna dari imamah atau khilafah dan model keabsahan pengangkatannya yang berbeda-beda. Al-Mawardi dalam *Al Ahkam al-Sultaniyyah* mengartikan imamah sebagai posisi yang diproyeksikan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الد ين وسياسة الدنيا

Dalam kitab kuning seperti *Rawdat al-Talibin* dan *Fath al-Wahhab* dijelaskan bahwa jabatan ini absah bila dilakukan satu di antara tiga cara yakni, baiat (*bay'ah*), penunjukan (*istikhlaf*), maupun kekuatan (*al-qahr wa al-istila'*).

Sedang Murtadha Mutahhari dalam karyanya *Al-Imamah* mengartikan imamah sebagai kepemimpinan dalam masyarakat (*qiyadat al-mujtama'*), rujukan otoritatif dalam masalah agama (*al-marja'iyyah al-diniyyah*), serta rujukan spiritual (*al-wilayah*). Menurut para ulama Syiah Imamiyah seperti dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa penetapan seseorang menjadi imam adalah pilihan Tuhan semata. Atau dengan kata lain, seorang imam ditetapkan berdasarkan petunjuk teks suci dan ini hak prerogatif Allah.

Adapun Hizbut Tahrir tidak menjelaskan arti khilafah atau imamah. Hizbut Tahrir hanya mengartikan bahwa khalifah adalah negara atau *dawlah* itu sendiri. Adapun arti khalifah seperti tercantum dalam kitab *Ajhizat* adalah "Orang yang mewakili umat dalam mengurusi pemerintahan dan kekuasaan dan menjalankan hukum-hukum syariat. Satu-satunya metode yang absah dalam pengangkatan khalifah menurut Hizbut Tahrir adalah dengan baiat.

Hal di atas adalah uraian tentang makna khilafah atau imamah yang beragam. Apalagi kalau dikaji dari aspek teologi akan lebih terlihat keragamannya. Ja'far Subhani mengutip pendapat dari Imam Ghazali bahwa wacana imamah adalah masalah *fiqhiyyah*, demikian juga al-Amidi menganggap bukan masalah usuluddin. Adapun Syiah

memandang bahwa wacana imamah adalah masuk dalam ranah kajian usuluddin atau pokok agama.

Keberagaman tentang wacana imamah atau khilafah akan semakin berganda apabila dilihat dari apakah dalil tentang khilafah atau imamah ini bersumber dari akal (*aqli)* atau dari menukil teks suci atau *syara?* Menurut al-Mawardi para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang mengatakan bersumber dari akal, dan ada yang mengatakan bersumber dari syara'. Selanjutnya Al-Ghazali memilih bahwa dalil wajibnya pengangkatan imam ini adalah berdasar syara', bukan berdasar akal.

Dari penjelasan di atas, tentu dapat disimpulkan begitu beragamnya pendapat para ulama tentang khilafah atau imamah. Lalu yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir bahwa khilafah merupakan ajaran Islam itu yang yang mana?

Belum lagi apabila ditinjau dari realitas politik modern, banyak nomenklatur tentang hal tersebut. Saat sekarang ini kalau disebut imamah, maka konotasinya biasanya ke Syi'ah. Kalau disebut khilafah, maka konotasinya ke ISIS, Hizbut Tahrir, dan Al-Qaidah. Demikian pula apabila disebut kerajaan, maka akan berkonotasi dengan Maroko, Arab Saudi, Yordania dan lain-lain. Kalau dikatakan *wilayat al-faqih* atau republik Islam, maka konotasinya ke Iran. Tidak ketinggalan kalau dikatakan NKRI, maka pasti Indonesia. Semua nomenklatur modern tentang sistem politik dalam dunia muslim tentu bisa ditarik benang merahnya dengan ajaran Islamkah? []

KHILAFAH HIZBUT TAHRIR AJARAN ISLAM?

SUDAH SAYA tegaskan bahwa jejak khilafah dalam kitab kuning pasti lebih "mutawatir" ketimbang jejak khilafah secara historis lalu dibuat film. Hampir seluruh pewaris kitab kuning alias santri juga tahu itu dan tidak mengingkarinya. Namun ternyata masih ada yang "*ngeyel*" entah karena fanatik, atau karena belum paham implikasi logis dari penjelasan saya. Dia yang ngeyel itu berargumen, kalau khilafah tercantum di kitab kuning, berarti khilafah adalah ajaran Islam. Dengan demikian, konsekuensinya khilafah Hizbut Tahrir juga ajaran Islam. Begitulah arah keinginan mereka. Untuk itu perlu sedikit diurai lagi.

Sebelumnya kita bisa iseng bertanya kepada para *khilafers* apakah menurut mereka khilafah yang diklaim oleh khalifah pertama ISIS, yakni Abu Bakar al-Baghdady dengan teritorialnya ada di Irak dan Suriah juga termasuk ajaran Islam? Pun demikian apakah khalifah Ahmadiyah dengan khalifahnya yang sudah muncul menurut mereka apakah ajaran Islam? Tidak ketinggalan bagaimana juga dengan imamah Syiah mulai dari imamnya yang pertama yang kedua belas apakah juga ajaran Islam?
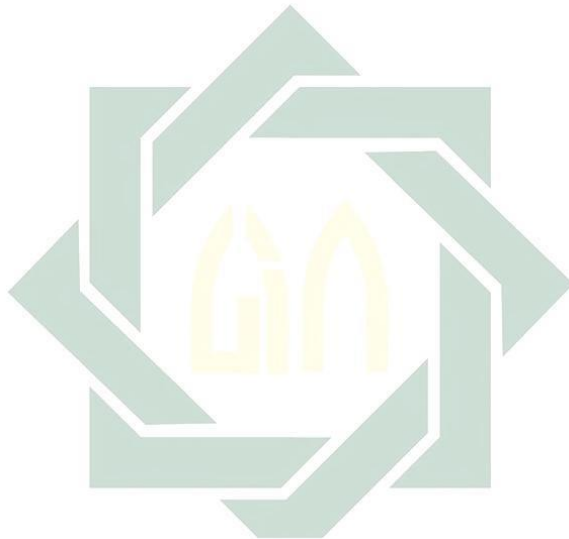
Hampir dapat dipastikan jawaban simpatisan *khilafaers* adalah menolak dengan memberi alasan karena tidak memenuhi rumusan ataupun syarat-syarat dari ulama mereka. Padahal syarat-syarat itu diformulasikan oleh para tokohnya masing-masing sesuai dengan kapasitas keilmuan khazanah *turats* Islam mereka.

Biasanya nantinya akan berakhir kepada penjatuhan pilihan wacana khilafah yang dianggap sesuai dengan pemahaman mereka serta menolak khilafah atau imamah lain dengan argumen *quwwat al-dalil* (lihat di Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah* jilid 1) atau atau bisa ditarik dalam kajian ushul fiqih tentang *mushawwibah* dan *mukhaththiah*. Perlu diketahui, hasil *quwwat al-dalil* tentu dalam konstruksi yang mereka pahami.

Bila demikian, maka kalau mau fair seharusnya para *khilafers* tidak bisa menuduh pihak yang menolak khilafah ala Hizbut Tahrir sebagai anti Islam sebagaimana Hizbut Tahrir juga tidak mau dituduh oleh pihak lain juga anti Islam karena menolak formulasi fiqih siyasi yang dipegang pihak lain itu.

Terakhir, seandainya kita terima khilafah ala Hizbut Tahrir sebagai ajaran Islam, maka kita juga harus mengakui bila NKRI ditelurkan juga dari ajaran Islam karena NKRI adalah sistem politik hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, NKRI adalah absah dalam pandangan Islam dan tidak bisa diganti dengan sistem politik lain. Dalam kaidah fiqih, terdapat kaidah "suatu ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain" atau dalam istilah Muhammad Al-Zarqa dalam kitabnya *Sharh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* "*Al-ijtihad la yunqadlu bimithlih*", atau menurut al-Suyuti dalam

Al-Ashbah wal Nazair "Al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad". Artinya, NKRI adalah hasil kesepakatan para ulama dan para pendiri bangsa yang lain, yang kemudian NKRI disebut dengan negara berdasarkan konsensus (*darul 'ahdi)*. Kesepakatan yang melibatkan para ulama ini merupakan hasil ijtihad, sehingga NKRI tidak bisa digugurkan dengan ijtihad pimpinan Hizbut Tahrir yang akan menggantinya dengan sistem khilafah. []

ANTI KHILAFAH BISA KENA PASAL PENODAAN AGAMA

POSTINGAN DI YOUTUBE yang beredar pada awal September 2020 menunjukkan ada Lembaga Bantuan Hukum yang mengatakan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan Islam adalah agama resmi yang dilindungi negara. Lalu kesimpulannya, siapa yang menyudutkan atau menentang khilafah, sama dengan melakukan penodaan agama dan bisa dijerat dengan UU Penodaan Agama.

Tentu ujaran di atas perlu ada kontranarasi, tidak dibiarkan mengudara di medsos. Selama mereka masih bebas berkeliaran, maka selama itu pula kita perlu melakukan kontranarasi. Karena buktinya beberapa tokoh ada yang terhanyut nalar HTI dan malah dimanfaatkan oleh HTI. Kita perlu menjaga generasi milenial dan *centennial, wabilkhusus* generasi muda NU dari asupan yang "menghasut" atas nalar waras mereka.

Di artikel sebelumnya sudah saya bantah argumen mereka tentang klaim mereka. Konklusi mereka bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan Islam adalah agama resmi yang diakui NKRI, lalu sesiapa yang menentang khilafah sama dengan menentang Islam dan bisa dihukum. Konklusi

ini bisa dipatahkan bila kita mau menelusuri jejak (sekali lagi jejak, tapi bukan jejak khilafah), yakni jejak perjalanan bangsa Indonesia.

Dalam majalah Al-Wa'ie milik *khilafers* terbitan tahun 2010 ada judul tulisan "SM Kartosoewirjo: Pejuang Syariah yang Teguh". Tulisan singkat itu mengapresiasi habis apa yang dilakukan Kartosuwiryo.

Kalau Kartosuwiryo dianggap oleh simpatisan Hizbut Tahrir sebagai pejuang syariah yang teguh, namun bagi para ulama, Kartosuwiryo malah dianggap *bughat*, lalu diperangi oleh negara. Selanjutnya apakah para ulama ini menentang syariah dan menentang Islam?

Padahal jelas Kartosuwiryo dalam UUD buatannya yang berjumlah 34 pasal menyebut Indonesia sebagai Negara Islam Indonesia, dan NII menjamin berlakunya syariat Islam, serta dasar dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Islam, serta hukum tertinggi adalah Alquran dan hadis sahih (baca buku *SM. Kartosoewirjo: Biografi Singkat 1907-1962* karya Ade Firmansyah).

Tapi Kartosuwiryo tetap dilabeli *bughat* oleh para ulama.Tentu para ulama tidak sembarangan, pasti ada acuannya.

Dalam kitab fikih dasar (apalagi yang *advanced*) yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyyah di pesantren, semisal "Fathul Qarib" sudah dijelaskan bab *bughat* sebagai kelompok muslim yang membangkang terhadap imam yang adil. Rasa-rasanya dari 18 kutub *mutabannat* (kitab otoritatif) milik Hizbut Tahrir yang menyinggung tentang politik semisal *Ajhizat Dawlat Al Khilafah*, *Nizam Al Hukm fi*

Al Islam, *Al Dawlah al Islamiyyah* hingga kitab tebal tentang UUD HTI yakni *Muqaddimah Al Dustur* tidak menyinggung *bughat*.

Mungkin mereka takut *dibughatkan* karena menentang negara-negara yang eksis saat ini. Hanya satu kitab yang bukan *mutabannat* seperti kitab *Nizam Al Uqubat* yang menyinggung tentang *bughat*. Sekalipun demikian, "menarik" penjelasan dalam kitab *Nizam Al Uqubat* itu bahwa termasuk dalam katagori *bughat* bagi mereka yang membangkang khalifah yang adil maupun khalifah yang zalim.

Lalu siapa ulama NKRI yang *membughatkan* mereka? Dalam buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah*, KH. Hasan berkisah bahwa suatu saat KH. Wahib Wahab memberikan kuliah fiqih siyasah di pondok Tambakberas dan beliau menjelaskan pengalamannya dahulu bagaimana pemerintah Soekarno gamang memerangi DI/TII karena mereka sesama muslim. Namun dengan tegas KH. Wahib Wahab (putra KH. Wahab Chasbullah) bicara bahwa pelaku makar harus diperangi.

Tidak hanya DI/TII, tapi juga pemberontakan Masyumi dan Permesta juga ditolak ulama. Masih di buku Tambakberas, KH. Abdul Mun'im menjelaskan bahwa suatu saat KH. Idham Chalid dipanggil Kiai Wahab Chasbullah. Kiai Wahab berkata, "Celaka Masyumi melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan sendiri dengan cara kekerasan dengan memproklamirkan PRRI di Sumatera Barat." Wah ini sudah Jelas *bughat*, tidak bisa dlbenarkan, lalu apa yang mesti kita lakukan Kiai? tanya KH. ldham Cholid. Kiai Wahab menjawab, "Kita harus

segera membuat pernyataan sikap, agar tidak didahului oleh kelompok *Syuyuiyyin* (PKI). Karena PKI akan memanfaatkan peristiwa ini untuk menggebuk Masyumi dan umat Islam semuanya. Karena itu, kita mengeluarkan pernyataan sikap ini dengan dua tujuan. *Pertama,* agar PKI tahu bahwa tidak semua umat Islam setuju dengan pemberontakan PRRI. *Kedua,* agar dunia lnternasional jangan sampai menganggap bahwa pemerintah pusat sudah sepenuhnya dikuasai PKI, sebagaimana dipropagandakan Masyumi dan PSI untuk menggalang dukungan internasional."

Dengan demikian, dalam sejarah Indonesia saja terbaca gamblang bagaimana mereka yang menggendong-gendong Islam dalam politik bisa *dibughatkan* oleh para ulama, dan para ulama itu tidak dianggap menentang syariah Islam. Belum lagi kalau kita membaca sejarah politik dunia Islam. Malah begitu banyak darah tertumpah karena masalah *bughat* ini.

Pertanyaannya, kalau 99 persen lebih rakyat Indonesia menentang khilafah ala Hizbut Tahrir, maka apakah akan dianggap menodai Islam dan akan dimasukkan penjara? Atau malah sebaliknya? Kenapa malah sangat tinggi percaya diri memasukkan penjara di sebuah penjara milik NKRI yang eksistensi sistem politiknya ditentang oleh para *khilafers* dan mau diganti dengan khilafah.

Hal yang pasti, *khilafers* telah menentang ajaran Islam berupa kesepakatan atas NKRI yang dibuat para pendiri bangsa termasuk para alim ulama. Kok bisa, mereka mau merubuhkan NKRI yang telah disepakati para pendiri bangsa dan ingin mengganti dengan khilafah ala Hizbut Tahrir.

Pernyataan terakhir, menentang suatu gagasan berbau Islam lalu dianggap menentang Islam, maka bisa dibayangkan kalau orang-orang seperti ini memegang kekuasaan politik dan memiliki kekuatan. []
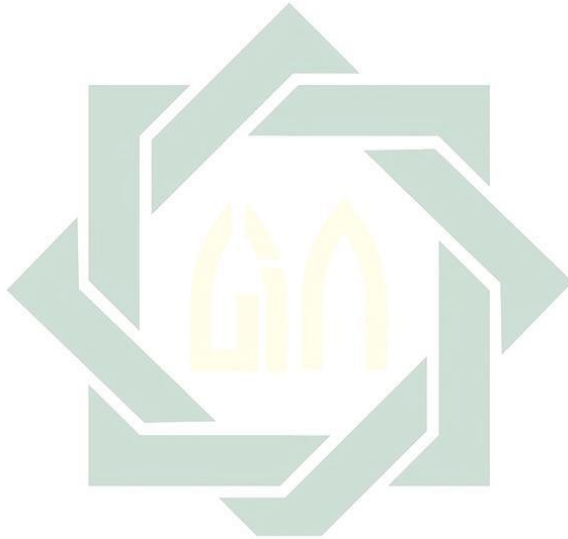
KELOMPOK RADIKAL POTENSIAL SEBAGAI *PROXY WAR* ASING

SAAT NU melepaskan diri dari Masyumi, karena Masyumi dianggap tidak adil dan sulit diajak diskusi, banyak pihak meragukan kemampuannya menjadi partai politik. Contohnya Isa Anshary, tokoh Masyumi yang bertanya kepada Kiai Wahab saat di meja makan kafetaria Parlemen RI, "Kiai, kalau NU menjadi partai politik, apakah sudah menyiapkan tokoh-tokoh untuk calon menteri. duta besar, gubernur dan sebagainya. Berapa NU memiliki Mr, Dr, Ir?"

Kiai Wahab menjadi ragu? Tidak, Kiai Wahab menjawab, 'Kalau saya akan membeli mobil baru, dealer mobil itu tidak akan bertanya, "Apa tuan bisa memegang kemudi?' Pertanyaan serupa itu tidak perlu, sebab andaikata saya tidak bisa mengemudikan mobil, saya bisa memasang iklan, 'mencari sopir'. Pasti nanti akan datang pelamar-pelamar sopir antre di muka pintu rumah saya... " Selain Isa Anshary, tokoh Masyumi yang lain, Jusuf Wibisono mengatakan bila NU dibiarkan memegang peranan dalam politik, maka politik akan jatuh ke tangan ortodoks.

Tidak hanya olokan, disebar berita hoaks tentang NU yang dituduh sebagai pemecah kesatuan. Dihembuskan

juga hoaks rapat PBNU tanggal 13/14 Mei 1952 di Surabaya, dihadiri oleh Kartosuwiryo. Akhirnya pada 19 Mei 1952, PBNU mengirim surat kepada Jaksa Agung agar mencegah dan memberantas berita-berita hoaks yang provokatif yang sengaja disebar di tengah masyarakat bahwa NU akan menjadi “Darul Islam" sebagaimana dulu Kartosuwiryo keluar dari Masyumi untuk mendirikan Darul Islam.

Perlu diketahui, fakta historis menunjukkan bahwa NU tidak berkeinginan memisahkan diri dari Indonesia, Justeru Masyumi yang memberontak bergabung dengan PRRI yang hal ini membuat Kiai Wahab kaget saat mendengar berita itu pada 15 Februari 1958. Akhirnya Kiai Wahab memerintahkan ke Kiai Idham Cholid agar segera membuat pernyataan sikap supaya tidak didahului PKI. Karena kalau didahului PKI, maka akan digunakan untuk menggebuk Masyumi, plus umat Islam yang lain.

Demikian pula, NU dalam sejarahnya tidak pernah ada keinginan memberontak penguasa sah. Justru Kartosuwiryo yang pernah menjadi wakil Masyumi untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang mendirikan DI/TII. Tidak hanya memberontak, tetapi juga menjadi *proxy war* dengan bersekutu dengan intelijen Angkatan Laut Belanda (Nefis). Tidak hanya itu, DI/TII juga bersekongkol dengan Westerling yang lari ke Jawa Barat setelah membantai 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan (https://historia.id/politik/articles/persekutuan-aneh-di-barat-jawa-PNedR).

Sama dengan DI/TII, pemberontak PRRI juga dijadikan *proxy war* negara asing. Diceritakan, pelatih militer Amerika datang ke area yang dikuasai PRRI di Sumatera, untuk

melatih para pemberontak, dengan berkedok sebagai pegawai perusahaan minyak Caltex (merek minyak bumi Korporasi Chevron). Sebelumnya dikisahkan, Herman Nicolas "Ventje" Sumual, Soemitro Djojohadikusumo, dan Ahmad Husein didatangi oleh agen-agen CIA untuk mendiskusikan masalah pemberontakan (https://tirto.id/peran-cia-di-balik-pemberontakan-sumatera-dan-sulawesi-ck6Z).

Dari kisah di atas bisa diambil pelajaran penting bagi gen Y dan gen Z. Adanya pemberontak, separatis maupun kelompok radikal dari agama dan kelompok manapun potensial dijadikan pion ataupun *proxy war* negara lain dengan beragam tujuan yang mereka agendakan. []
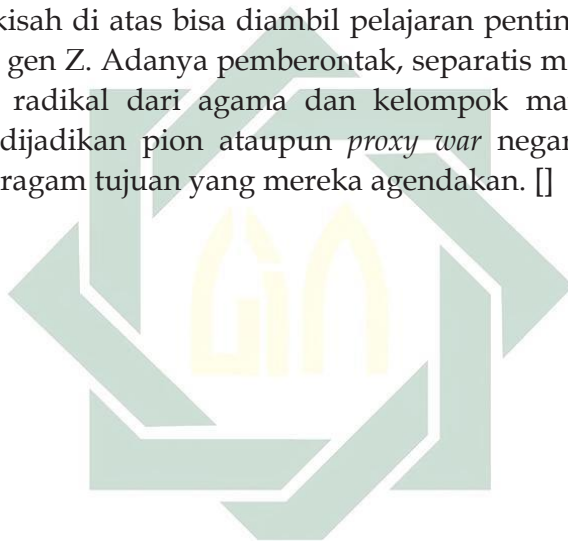
KHILAFERS DAN LEDAKAN DAHSYAT DI LEBANON

LEDAKAN DI BEIRUT terjadi pada 4 Agustus 2020. Setidaknya 190 orang tewas dan 6.500 lainnya terluka dan menciptakan kawah lebar dengan kedalaman 43 meter. Ledakan di Beirut dipicu meledaknya 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di salah satu gudang di pelabuhan. Mantan anggota Knesset Israel Moshe Feiglin menyebut, ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon adalah "hadiah" dari Tuhan tepat di hari festival Yahudi Tu B'Av.

Mantan ketua DPP HTI (sebelum dibubarkan), Hafidz Abdurrahman mengutip kantor berita Hizbut Tahrir Lebanon yang menjelaskan bahwa ledakan ini terjadi di wilayah, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan alutsista partainya Iran (Hizbullah). Karena banyak senjata dan bahan kimia sehingga ledakannya begitu eksplosif.

Diksi HT Lebanon dengan menyebut partai Iran untuk Hizbullah, dan menyimpulkan sebagai gudang penyimpanan senjata Hizbullah adalah bersifat tuduhan yang belum bisa dibuktikan. Karena Presiden Lebanon sendiri, Michel Aoun, mengaku tidak mempercayai teori
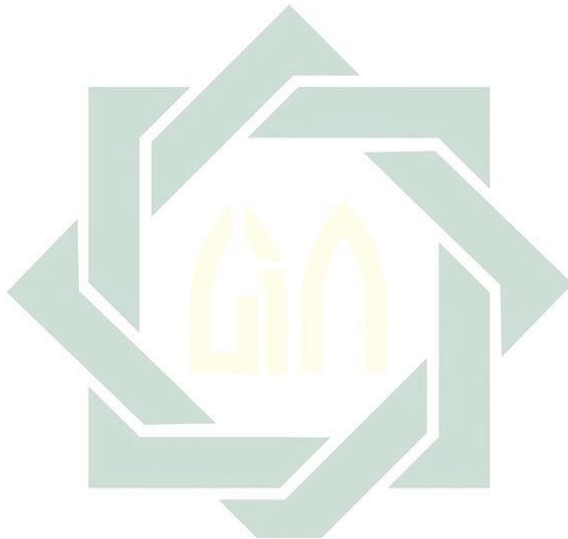
bahwa ledakan di Beirut dipicu letusan dari gudang senjata kelompok Hizbullah (https://dunia.tempo.co/read/1377077/presiden-lebanon-bantah-ledakan-di-beirut-dipicu-senjata-hizbullah). Lebih naif lagi, Hafidz Abdurrahman membuat catatan bahwa AS di belakang Iran, biasanya Hizbullah digunakan AS, melalui tangan Iran. (baca https://www.muslimahnews.com/2020/08/05/libanon-ledakan-di-tengah-krisis-ekonomi-dan-ketegangan-politik/).

Dulu saat *halaqah* (nama kajian ala HT), para *khilafers* melihat Iran hanya Islami di permukaan saja. Hal yang aneh dan menyebar di hampir semua pengikut Hizbut Tahrir adalah penjelasan mereka bahwa Iran dan AS main mata, misalnya dalam buku karya MD. Riyan yang berjudul *Political Quotient* yang covernya ada foto Taqiyuddin anNabhani. Buku itu menukil tuduhan konspirasi AS dengan Iran.

Saat diminta menunjukkan bukti main matanya, jawabannya sangat absurd, yakni karena AS dan Iran tidak pernah berperang. Suatu alasan rapuh yang tidak tahu apa yang mendasarinya. Hingga Prof AS. Hikam juga geleng kepala saat membaca statemen mantan pengikut HTI yang masih mempercayai teori "main mata" AS dengan Iran. Padahal baru saja pada awal Januari 2020 lalu Jenderal Qasem Soleimani sebagai simbol pahlawan Iran justru dibom oleh AS, lalu Iran membalas dengan merudal markas militer AS di Iraq.

Tentu bukti gamblang seperti ini masih tidak meyakinkan atas kelompok yang mau menegakkan politik tunggal sedunia. Menjadi pertanyaan, bagaimana nanti mau memimpin politik, kalau analisis politik yang gamblang

begitu saja tidak mampu dipecahkan. Statemen *khilafers* ini tentu merugikan Hizbullah yang berani melawan Israel. Musuh Iran juga diuntungkan dengan statemen tersebut. Apakah *khilafers* telah menjadi *proxy war* negara asing yang anti Hizbullah dan Iran? []

NALAR LOGIS IMAM GHAZALI SERTA NALAR MELOMPAT *CENTRAL LEADER* HT

IMAM GHAZALI (450-505 H atau 1058-1111 M) hidup di masa kemunduran dinasti Abbasiyah seperti ditulis Munawir Sjadzali dalam karyanya, *Islam and Governmental System* maupun penjelasan Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution dalam bukunya, *Pemikiran Politik Islam*.

Gambaran kemundurannya, pada masa itu tentara Seljuq berupaya menguasai perpolitikan di ibukota dinasti Abbasiyah. Kebobrokan moral merajalela, korupsi di kalangan ulama dan ahli hukum meluas, intrik pembunuhan sesama saudara untuk meraih kekuasaan terjadi. Kekuasaan Bani Abbas melemah bahkan kekuasaan khalifahnya hanya sekitar istana. Mereka hanya boneka dari para wazir non Arab baik dari Turki maupun Persia.

Semula Imam Ghazali berharap bisa memperbaiki kebobrokan yang terjadi. Tapi karena skala, dimensi dan kompleksitas kebobrokannya akut, yang itu ternyata jauh dari dari kemampuannya.

Menariknya, seperti disinggung di atas, pada waktu itu masih ada khalifah di Baghdad, tapi ternyata khalifah tidak

memberi solusi malah menjadi boneka. Selanjutnya Imam Ghazali *uzlah* dan melahirkan karya intelektual-spiritual diantaranya mahakarya *Ihya Ulumiddin* dan lainnya. Lebih dari itu, setelah *uzlah* beliau berhasil "melahirkan" suatu negara di Afrika Utara yakni dinasti Muwahhidin. Negara Muwahhidin hadir berdasar petunjuk dan pengarahan dari Imam Ghazali.

Seperti telah disinggung, Imam Ghazali pernah hidup di kota yang ada khalifahnya yakni di Baghdad. Beliau setidaknya mengalami era beberapa khalifah Abbasiyah. Mengacu kepada tahun hidup Imam Ghazali (450-505 H atau 1058-1111 M) lalu melihat tabel Bosworth dalam bukunya *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual,* maka Imam Ghazali hidup pada era:

- 422/1031 ‘Abdallah b. al-Qadir, Abu Ja‘far al-Qa’im
- 467/1075 ‘Abdallah b. Muhammad, Abu ’1-Qasim al-Muqtadi
- 487/1094 Ahmad b. al-Muqtadi, Abu ’l-‘Abbas al-Mustazhir

Saat masih ada para khalifah di Baghdad itu juga muncul dinasti-dinasti lain seperti Seljuq dengan daerah kekuasaannya di Iraq, Suriah, Kirman dan Persia. Sultannya yang semasa dengan Imam Ghazali adalah Alp Arsalan, Malik Shah I, Mahmud I, Barkiyaruq, Malik Shah II dan Muhammad I (memakai tabel Bosworth di buku yang lama yang berjudul *The Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Handbook*). Saat itu perdana menteri terkenalnya adalah Nizam Al Muluk dan Fakhr Al Muluk yang dekat dengan Imam Ghazali.

Imam Ghazali pernah mengajar di Nizamiah Baghdad dan Nizamiah Nisabur. Beliau juga menulis buku tentang nasehat untuk penguasa yang berjudul التبرالمسبوك في نصيحة الملوك Menarik judulnya ada kata muluk bukan kata khalifah ataupun khulafa'. Entah kenapa, yang jelas buku itu untuk menasehati salah seorang raja, yakni Sultan Muhammad bin Malik Shah Al Seljuqi. Banyak halaman di buku ini dimulai dari '*i'lam ya Sultan,* misalnya di awal halaman buku itu ada redaksi: إعلم يا سلطان العالم, ملك الشرق والغرب(*Ketahuilah, Wahai Sultan Dunia, Raja Timur dan Barat*).

Jangan bertanya kenapa Imam Ghazali, *pertama*, memanggil sultan sang penguasa dunia padahal itu dalam perspektif Hizbut Tahrir adalah hak Khalifah sebagai penguasa dunia. *Kedua*, kenapa juga tidak menulis buku untuk para khalifah agar Khalifah kuat dan bisa memberi solusi atas kebobrokan yang terjadi.

Kembali ke judul di atas, di sini saya ingin mengutip buku *Al Iqtishad fil I'tiqad* karya Imam Ghazali dan buku otoritatif bagi anggota Hizbut Tahrir karya Atha Abu Rashta yakni kitab *Ajhizat Dawlat Al Khilafah*. Tentu saya bukan bermaksud membandingkan dua pribadi, karena memang jauh dari setara baik dalam pengalaman intelektual dan spiritual serta kuantitas dan kualitas para pengikutnya. Tapi saya hanya ingin menampilkan narasi nalar tentang politiknya saja.

Imam Ghazali menjelaskan konstruksi imamahnya yang walaupun ditegaskan wajibnya berdasar syar'i bukan aqli, narasinya berangkat dari premis-premis logika. Contohnya berikut ini saat membuktikan penjelasan wajibnya pengangkatan imam:

إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع، محمد صلم (م ك)
لا يحصل نظام الدين إلا بامام مطاع (م ص)
صاحب الشرع هو الامام المطاع (ن)

Pun demikian saat Imam Ghazali membuktikan tentang ketertiban pelaksanaan ajaran agama tidak bisa tercapai kecuali dengan imam yang ditaati.

نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا (م ك)
نظام الدنيا لا يحصل الا بامام مطاع (م ص)
نظام الدين لا يحصل الا بامام مطاع (ن)

Imam Ghazali masih meyediakan jawaban logis saat ada yang menyanggah, semisal dengan perkataan bahwa kesuksesan menjalankan aturan agama hanya akan tercapai bila meninggalkan urusan dunia. Karena dunia dan agama berlawanan, sibuk dengan yang satu akan menghancurkan atau harus mengabaikan yang lain.

Statemen di atas ditentang oleh Imam Ghazali dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "dunia" adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sebelum wafat, dan ini tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya Imam Ghazali membuat premis logika berikut:

إن نظام الدين -بالمعرفة والعبادة- لا يتوصل إليه الا بصحة الابدان والامن (م ك)
إن صحةالابدان والامن -بما فيها المال والحياة- لا تتحقق الا بسلطان مطاع (م ص)
نظام الدين لا يتحقق الا بسلطان مطاع (ن)

Lalu Imam Ghazali memungkasi, dengan demikian, ketertiban kehidupan di dunia (*nizamud dunya*) adalah syarat untuk bisa tertibnya menjalankan agama (*nizamud din*). Eksistensi sultan adalah perkara urgen dalam *nizamud dunya*. Bisa terlaksananya *nizamud din* adalah perkara pasti agar beruntung berupa kebahagiaan di akherat yang ini adalah maksud dari hadirnya para Nabi ke dunia. Dengan demikian, wajibnya *nasbul imam* (diangkatnya seorang imam) adalah sesuatu yang urgen dalam syara' yang tidak bisa ditinggalkan.

Cara menyusun argumen sebagai alur berpikir Imam Ghazali adalah logis dan tidak melompat. Juga bisa kita pahami maksud dari kata imam tersebut adalah pemimpin politik bisa sultan atau malik atau yang lain.

Bandingkan dengan apa yang dikonstruksi oleh pimpinan Hizbut Tahrir saat ini, Atha Abu Rashta sebagai nalar melompat dalam menyimpulkan, alias *jumping to conclusions*.

Saya beri contoh, Atha Abu Rashta menyajikan ayat فاحكم بينهم بما انزل الله . Atha Abu Rasta membangun argumen bahwa seruan ayat di atas juga seruan kepada umat Islam agar mewujudkan seorang hakim setelah Nabi wafat agar hakim itu menghukumi umat dengan hukum Allah. Seruan ini menurut Atha adalah *jazm* (wajib).

Atha Abu Rashta lalu melanjutkan bahwa hakim yang menghukumi kaum muslimin dengan hukum Allah adalah khalifah. Kesimpulannya, dari ayat di atas adalah khalifah wajib diangkat di tengah manusia.

Itulah premis dan kesimpulan yang tidak urut atau melompat dari hakim langsung ke khalifah (lebih jauh baca di buku saya *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* terbitan Wahid Foundation 2019). Melompatnya ini bisa jadi karena mereka menolak ilmu mantiq sehingga enggan mempelajarinya.

Harap diketahui, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir selain mengkritik ilmu logika juga mengkritik ilmu filsafat serta ilmu kalam (baca buku berjudul *Islam, Politik dan Spiritual* karya mantan pimpinan HTI (sebelum dibubarkan), yakni Hafidz Abdurrahman. Lebih jauh kritikan mereka terhadap ilmu logika juga bisa dibaca di buku *Al Tafkir* karya Taqiyuddin an Nabhani dengan menyebutnya bahwa logika bukan metode berfikir.

Atha Abu Rashtah juga langsung menyebut khalifah sebagai nomenklatur tiada ganti padahal dalam pemimpin ada raja, ada presiden dan lain lain. Terlebih khalifah dalam sejarah banyak yang menyimpang, selain banyak yang baik.

Terakhir, membahas khilafah atau imamah tidak usah "*ndakik-ndakik*" karena bisa menjerumuskan kita dalam kefanatikan. Begitulah poin inti kata Imam Ghazali:

إن البحث فى الامامة ليس من فن المعقولات، ولا من المهمات، بل إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض ولو اصاب، فكيف إذا أخطأ؟
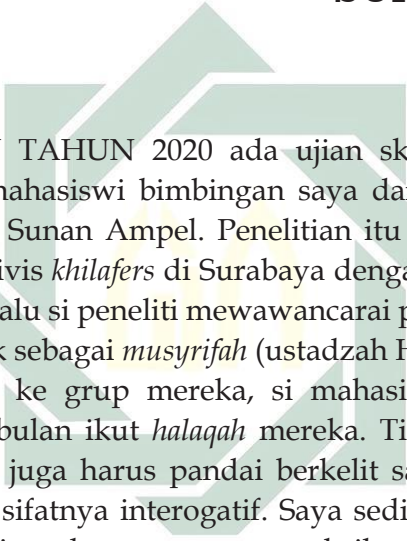
Maka saya menjadi teringat kenapa dalam kitab kuning yang berjilid jilid tapi pembahasan masalah imam atau khalifah hanya sedikit lembar. Semisal, Imam Zakariyya al Ansari (823 H 926 H) dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Wahhab* yang berjumlah dua jilid, kajian *al-imam aI-a'dham*

sekitar setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah*. Imam Zakariyya al-Ansari (823 H-926 H) dalam kitabnya yang lain yang berjudul *Asna al-Matalib Sharh Raud aI-Talib* yang berjumlah sembilan jilid (tiap jilid ratusan halaman), kajian *al-imamat ul-'udzma* sebanyak empat setengah lembar saja dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab aI-diyah*. Imam al-Ramli (919 H-1004 H) dalam kitabnya yang berjudul *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh aI-Minhaj* yang berjumlah enam jilid (tiap jilid ratusan halaman), kajian *al-imam al-a'dham* sebanyak empat lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah*.

Sedang Hizbut Tahrir yang kitab otoritatifnya hanya 18 kitab saja dan tidak tebal, tapi dalam mengkaji tentang khilafah ada di berbagai kitab. Semisal di kitab *Ajhizat Dawlat Al khilafah*, di kitab *Al Dawlah al Islamiyyah*, ada di kitab *Nizam Al Hukm fil Islam* dan ada di kitab *Al Syakhsiyyah Al Islamiyyah* jilid 2. []

JUTAAN *KHILAFERS* DI SURABAYA

PERTENGAHAN TAHUN 2020 ada ujian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi bimbingan saya dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel. Penelitian itu fokus atas aktivitas para aktivis *khilafers* di Surabaya dengan fokus di sekitar UNESA. Lalu si peneliti mewawancarai perempuan HTI yang nampak sebagai *musyrifah* (ustadzah HTI). Tentu agar bisa masuk ke grup mereka, si mahasiswa harus telaten berbulan-bulan ikut *halaqah* mereka. Tidak hanya itu, si mahasiswi juga harus pandai berkelit saat dicecar pertanyaan yang sifatnya interogatif. Saya sedikit banyak mengajari strateginya karena saya pernah ikut di Hizbut Tahrir.

Ada banyak informasi yang disampaikan oleh mahasiswi ini. Para *khilafers* membentuk wadah komunitas mengaji. Jadi, pasca dibubarkan mereka tetap bergerak dengan menggunakan strategi mengadakan kajian umum yang bersifat kekinian dan dikemas dalam berbagai kegiatan. Mereka juga tetap membagikan buletin *Kaffah* kepada para mahasiswi UNESA. Tentu pemberian buletin

ini juga menjadi simbol bahwa mereka masih hidup bisa melakukan resiliensi.

Ada yang menarik dari upaya tetap bertahan hidup dari kelompok ini yang ternyata kadang dibumbui dengan hoaks semisal jumlah pengikut mereka. Seperti pernyataan ustadzah *khilafers* berikut ini, "Jadi setelah pembubaran, seperti ada kabar burung, istilahnya kita semua mau dipenjara yang masih aktif dalam HTI. Tapi ya tidak mungkin, yang ada nanti penjaranya pasti penuh. Di Surabaya saja bisa jadi ada jutaan orang HTI, penjara mana yang mau nampung. Itu belum Sidoarjo, Gresik dan daerah kecil-kecil lainnya. Ini saja saya di UNESA, belum di UINSA, UNTAG, ITS dan kampus lainnya. Jadi ini adalah ujian dakwah untuk kita. Akhirnya banyak kabar-kabar seperti itu ternyata hanya suatu gertakan saja karena ketakutan penguasa terhadap hegemoni dakwah yang semakin luar biasa, semakin maju menunjukkan perkembangannnya."

Saya tentu tidak yakin, maka saya tanyakan ulang ke peneliti apa betul ucapan perempuan HTI ada jutaan HTI di Surabaya? Jawaban peneliti, "Iya Bapak betul. Mbaknya sendiri yang bilang begitu." Memang memberi semangat kepada yang lain dengan menunjukkan anggota yang banyak adalah penting agar tidak putus semangat, sayangnya kok hoaks. []

KRIMINALISASI KHILAFAH DAN MEMECAH BELAH UMAT

ADA MEDIA cetak dan online bernama *Media Umat*. Media ini dulu strukturnya banyak dicantumkan tokoh-tokoh Islam termasuk KH. Ma'ruf Amin. Begitulah kelihaian mereka "menggunakan" tokoh. Di bawah ini adalah penggalan beberapa kutipan dari tulisan di *Media Umat* online pada Juli 2020 (https://mediaumat.news/mengriminalisasikan-khilafah-sebagai-ajaran-islam-merupakan-kedurhakaan-kepada-allah-swt/) atas pandangan tokoh *khilafers* yang disebut Kiai Haji:

"Hadir KH. M. Ismail Yusanto (Pembina Media Umat) pada FGD online kali ini dan berhasil menggugah pemikiran peserta yang hadir. Beliau mengetengahkan argumen menarik bahwa "Menyebut khilafah sebagai isme dalam khilafahisme jelas betul kebodohan, kejahilan dan kekurangajaran yang muncul dari orang tidak paham Islam. Ini harus diproses secara hukum. Hukum mendirikan Khilafah adalah fardhu kifayah sebagaimana yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab fiqih, termasuk buku pembelajaran yang diterbitkan Kementrian Agama. Untuk itu, umat Islam tidak perlu lagi memperdebatkan

khilafah wajib atau tidak, karena ini perkara agama yang sudah disepakati dan dipahami. Sungguh durhaka kepada Allah SWT, siapa saja yang mencoba mengriminalisasi Khilafah sebagai ajaran Islam. Padahal dia tinggal di bumi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Ini merupakan strategi pecah belah umat Islam. Strategi ini akan sukses jika umat mengikuti genderang musuh-musuh Islam. Adapun perang melawan radikalisme merupakan bagian dari *war on terrorism* yang kedok sesungguhnya adalah *war on Islam*."

Membuat umat saling silang sengkarut berdebat gara-gara khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebenarnya adalah sebentuk dari mengadu domba dan memecah belah umat. Malah kalau sampai baku hantam, maka pihak yang memulai membuat gegara menawarkan khilafah ala Hizbut Tahrir bisa masuk katagori pelaku kriminal. []

PUTRA SANG KOLONEL SALAH MONDOK

SORE JELANG Maghrib pada 18 Juli 2020, datang seorang tamu bermasker dengan kain loreng, beliau adalah Sang Kolonel. Karena sekitar setengah jam dari waktu Maghrib, maka pembicaraan belum bisa gayeng. Sekalipun demikian, ada poin penting yang saya ingat dari pembicaraan singkat tersebut berupa kisah bagaimana dulu putranya mau mondok.

Saat itu, sang putra mencari informasi di internet, ketemulah pondok yang promosinya menarik minatnya. Pondok yang berada di daerah Malang tersebut tampak dari tampilannya soft atau moderat dan terbuka menerima semua kalangan.

Setelah daftar mondok dan anak diantar ke pondok, mulanya kegiatannya berjalan biasa, apalagi saat pembukaan juga mengundang beberapa tokoh NU setempat. Namun kemudian ada 'keanehan' di pondok itu semisal tidak ada kegiatan istighosah, tahlilan atau tradisi tradisi ala pesantren yang umum berlaku di mayoritas pesantren di Indonesia.

Saat Sang Kolonel mulai mencium hal tersebut, beliau tidak langsung menarik putranya dari pondok itu, namun menunggu perkembangan lebih lanjut. Lalu muncullah peristiwa lain, yakni tidak ada upacara bendera. Ada juga kegiatan ekstra kurikuler menembak pakai senapan angin, memanah dan aktivitas lain seperti diajari merayap, berguling dan rolling. Tentu bagi seorang tentara, hal tersebut dianggap kegiatan semi kemiliteran.

Keanehan lain lagi adalah kegiatan kepanduan yang tidak pernah menggunakan baju pramuka atau hasduk merah-putih, dan sama, diajari semi militer. Sering ada kumandang doktrin jihad kontemporer, seperti persiapkan dirimu untuk jihad membela saudara-saudara kita di Palestina.

Satu hal lagi yang tidak bisa dipahami adalah ketika santri yang masih remaja (setingkat SMP dan SMA) yang harusnya belajar, malah diajak demo dengan alasan ghiroh membela Islam (kasus Ahok). Mereka mendapatkan fasilitas penuh mulai transportasi ke Surabaya dan konsumsi dari lembaga. Sementara di saat pembayaran SPP telat (sewaktu mid-semester, orang tua lupa transfer karena ada tugas di luar pulau) si santri tidak boleh ikut ujian. Setelah ditransfer baru diperbolehkan masuk. Padahal selama ini tidak pernah telat.

Hal lain yang membuat trenyuh adalah ketika pulang liburan Romadon, pada waktu itu ibunya berdoa buka puasa dengan "*Allahumma laka sumtu*....." ternyata disalahkan. Sang anak juga bilang makan yang sunnah pakai jari tiga. Melihat realitas seperti itu, maka anaknya dipindah mondok. Akhirnya dibawa ke Pesantren Amanatul Ummah.[]

AYAT SUCI DI ATAS AYAT KONSTITUSI

PADA RAMADHAN tepatnya di bulan Mei 2020, saya dapat *japri* sebuah poster yang temanya lagi-lagi itu, yakni adu-adu atau mengkontraskan, melawankan, memancing agar ada "keributan" di nalar awam akhirnya tergiring kepada *frame* pemikiran pemancing, sang *khilafers*.

Begitulah hobi dan lelaku *khilafers*, baik di alam pikiran maupun di alam nyata, yakni memancing keributan dengan segala artinya. Seharusnya puasa Ramadhan tahun 2020 di saat ada korona ini kita mendamaikan karena kata mbah-mbah kita, setan udah diikat sehingga lebih ringan tugas kita. Hanya saja karena ada non-syetan yang seperti itu, tentu perlu ditanggapi sebagai kontranarasi.

Tema di poster itu membuat "jebakan logika" yang hal ini manjur membius bagi orang yang logikanya bengkok dan baru kenal Islam lalu ikut "hijrah-hijrahan" superfisial. Efek logika di atas korelatif dengan statemen seseorang saat PSBB di sebuah kota. Seseorang itu teriak saat diingatkan petugas, "Hukum Allah lebih Tinggi......." Saya menghormati

aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah." Kalau model jebakan logika di atas dibiarkan, maka akan banyak menular ke gen Y dan gen Z, kayak menularnya korona.

Sebetulnya menjawab poster seperti itu gampang saja, mereka membuat komparasi yang tidak komparatif yang arahnya mau menggugat dengan bertanya "Lebih tinggi mana ayat suci dengan ayat konstitusi? Kita dapat bertanya balik dengan meminjam logika pekok, eh bengkok mereka. Tanyakan saja poin-poin di bawah ini:

Lebih tinggi mana antara konstitusi Hizbut Tahrir dengan ayat Suci? Kalau dijawab "Ayat suci," maka kita bertanya lagi, "Lalu kenapa Anda membuat konstitusi Hizbut Tahrir?

Lebih ditaati mana antara Tuhan dengan dedengkot Hizbut Tahrir? Kalau dijawab, "Tuhan." Kita bertanya lagi, "Kenapa Anda taat kepada tokoh Hizbut Tahrir, kenapa tidak langsung ke pemilik ayat suci."

Di ayat suci tidak ada kata Hizbut Tahrir, juga tidak ada perintah agar mendirikan Hizbut Tahrir. Lalu kenapa Anda malah mabok atau cinta mati kepada Hizbut Tahrir? Di ayat suci tidak ada perintah mendirikan khilafah, apalagi khilafah ala HTI, lalu kenapa ngotot... Seakan khilafah kayak rukun Iman saja.

Dan masih banyak lagi pertanyaan bisa kita ajukan. Kalau mereka masih jawab, maka bisa ditebak inti jawabannya paling ya itu-itu saja. Begitulah mereka membuat jebakan logika yang akan bisa membuat sesat logika. Saat ini banyak muncul sesat logika, contohnya takut mana kamu antara Tuhan dengan korona?

Terakhir, saya bolak balik menulis bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 45 adalah hasil kesepakatan atau hasil ijtihad para ulama dan tokoh bangsa sehingga NKRI disebut *darus suluh, darul ahdi wa syahadah* dan *darul mitsaq* (negara kesepakatan).

Pun sudah bolak balik saya katakan bahwa hasil ijtihad di atas (NKRI) tidak bisa digugurkan dengan hasil "ijtihad" Taqiyuddin An Nabhani tentang khilafah. Hal itu sesuai dengan kaedah fiqih yang dalam *Al Asybah wa Nazair* Imam Suyuthi redaksinya (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). Atau dalam kitab *Syarh Al Qawaid al Fiqhiyyah* Muhammad al Zarqa dengan redaksi: (الاجتهاد لا ينقض بمثله). []
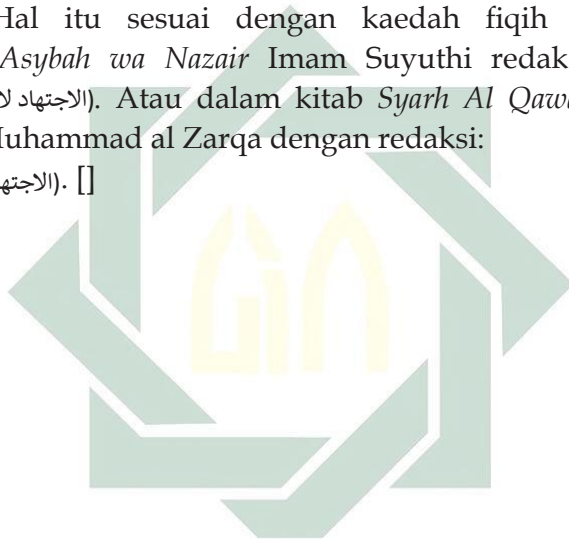
BERSAMA MANTAN TERORIS PERAKIT BOM

PADA TANGGAL 10 Maret 2020 di pendopo Sampang, saya mengisi acara yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Rais syuriyah NU, ketua tanfidziyah NU, pengurus MD, ketua MUI, Kapolres, Dandim, ketua kejaksaan dan ketua pengadilan, pengurus LDDI dan lain-lain. Saya ditandem dengan Ustadz Ali Fauzi Manzi adik Amrozi cs. Di antara poin yang saya sampaikan:

Isyarat dari beberapa hadis Nabi menunjukkan akan munculnya apa yang saya sebut dengan kombinasi orang yang *penting wani* (berani) *ngomong*, berani tampil dan pandai ngomong tapi miskin ilmu. Sehingga tidak aneh bila muncul ujaran adanya ulama hewan, atau sholat yang satu hingga sholat berikutnya mampu menolak covid 19. Dari kombinasi di atas juga melahirkan gagasan kelompok radikal yang mempertentangkan Pancasila dengan Alquran juga menganggap NKRI bertentangan dengan Islam.

Adapun Ustadz Ali Fauzi berkisah bahwa yang muncul dalam otak teroris adalah *full* kebencian dengan aparat, juga benci kepada NU dan MD. Ustadz Fauzi juga berkisah tentang anak kecil dari orang tua pembom di Surabaya
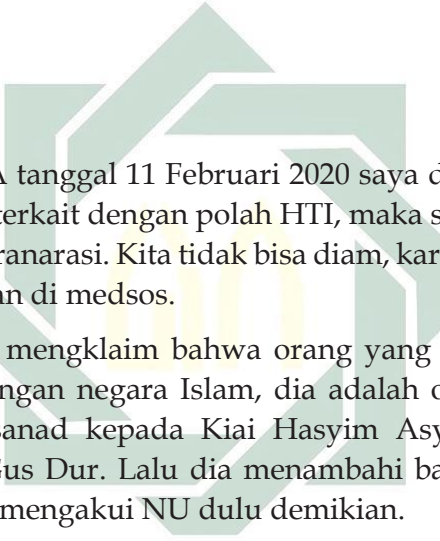
Maret 2019 saat ditanya kenapa tangannya? Jawab si anak kecil dengan lugunya "Diajak Umi masuk surga."

Terakhir ini yang penting, kalau tokoh-tokoh teroris yang ada di Indonesia rata-rata sudah dilokalisir dalam wujud masuk penjara, tapi kalau tokoh-tokoh penyeru khilafah masih bebas mempengaruhi masyarakat yang hal ini tentu lebih sulit mengatasinya. []
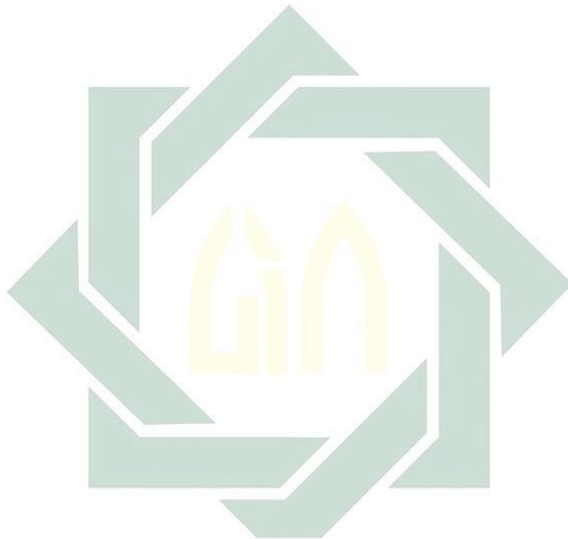
NU, KIAI HASYIM AS'YARI, DAN KLAIM NEGARA ISLAM

KARENA PADA tanggal 11 Februari 2020 saya dihubungi beberapa orang terkait dengan polah HTI, maka saya perlu melakukan kontranarasi. Kita tidak bisa diam, karena polah mereka diviralkan di medsos.

Khilafers ini mengklaim bahwa orang yang mengaku NU tapi anti dengan negara Islam, dia adalah orang NU yang tidak bersanad kepada Kiai Hasyim Asy'ari, tapi hanya kepada Gus Dur. Lalu dia menambahi bahwa Gus Sholah saja juga mengakui NU dulu demikian.

Saya tidak tahu kapan pidato itu, tapi yang jelas baru menyebar. Lalu bagaimana sebenarnya? Kalau orang HTI ini membaca sejarah NU dengan jeli dan tidak manipulatif, maka akan tahu bahwa yang pernah dilakukan tokoh NU adalah:

Pertama, terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta dan juga ikut menyetujui perubahan redaksi Piagam Jakarta (baca artikel di Jawa Pos 3 Januari 2020 "Peran Transformatif Gen Z Kemenag). Ingat ya, saat perumusan dan perubahan

redaksi Piagam Jakarta, KH. Hasyim Asy'ari masih *sugeng* (hidup).

Kedua, dalam sidang Konstituante, tokoh NU pengganti KH. Hasyim Asy'ari, yakni KH. Wahab Chasbullah pernah memperjuangkan tentang Islam sebagai asas atau dasar negara (bukan memperjuangkan negara Islam) dengan tetap menerima NKRI dan Pancasila. Namun usaha itu mentok hingga Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959. Akhirnya NU menyetujui kembali ke UUD 1945 dengan Piagam Jakarta tetap menjiwai UUD 1945. KH Wahab Chasbullah yang wafat tahun 1971 tidak pernah mengotak atik lagi masalah di atas (baca buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah*).

Ketiga, fakta sejarahnya, NU justeru menolak Negara Islam dan bahkan KH. Wahab Chasbullah *membughatkan* (melabeli sebagai pemberontak aau makar) Kartosuwiryo. Lalu bagaimana bisa muncul isu NU "*nyidam*" Negara Islam?

Keempat, Gus Sholah dalam video tidak berucap NU mau mendirikan Negara Islam. Lebih jelas lagi dalam *endorsement* di buku saya *Khilafah HTI dalam Timbangan*, Gus Sholah berkata, “"NU, Muhammadiyah, PSII dan lainnya yang tergabung dalam Partai Masyumi pada 1945 memang ingin Negara RI berdasar Islam, tapi bukan khilafah. Demikian pula pada waktu sidang Konstituante.” Jelas kalimat di atas tidak menyebut daulah Islam atau negara Islam tapi berasas Islam.

Kelima, selanjutnya masalah Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 untuk saat ini sudah diterjemahkan para tokoh bangsa baik dari NU, MD dan lainnya yang dimanifestasikan

dalam UU berbasis syariah. Kata KH Ma'ruf Amin, "Sudah banyak UU bermuatan syariah yang disahkan. Ada UU Haji, UU Wakaf, UU Zakat, UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, UU yang memayungi Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara, UU Jaminan Produk Halal, dan sebagainya." []
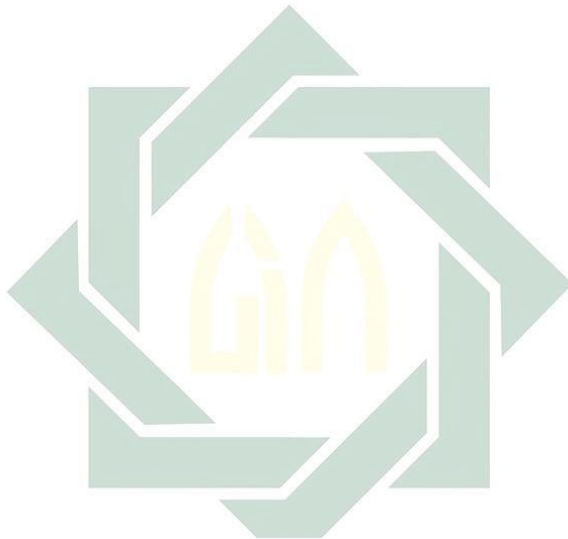
CARA *KHILAFERS* TURUT SERTA MENGGULINGKAN GUS DUR

POIN YANG mungkin belum diungkap dalam buku *Menjerat Gus Dur* karya Virdika Rizky adalah bagaimana HTI turut serta membentuk opini 'negatif' atas Gus Dur, berikut contohnya:

Pertama, saat ada suatu peristiwa banser di Jatim, lalu Gus Dur ikut komentar, lalu oleh HTI dikritik berikut ini, "........ Anehnya, Presiden Gus Dur justru meresponnya dengan melempar sinyalemen adanya komplotan yang sedang berusaha menjatuhkan pemerintahannya sebelum Agustus 2000. Caranya adalah menyebarkan citra yang jelek tentang dirinya di masyarakat."

Kedua, di lain waktu HTI menulis ini, "Pekan-pekan terakhir ini publik semakin sering mendengar tuntutan agar Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya. Mahasiswa, ekonom, pengamat, anggota DPR, dan lain-lain menghendaki presiden yang baru memerintah satu tahun itu mundur dari jabatannya. Banyak argumentasi yang dikemukakan antara lain, kinerjanya parah, terlalu banyak menyimpang, sebut saja penyimpangan anggaran

1999/2000 sampai 165 trilyun rupiah, banyak skandal yang memalukan mulai dari skandal uang sampai seksual. Ketua MPR Amien Rais pun merasa perlu menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia karena telah mensponsori naiknya Gus Dur ke kursi kepresidenan. Konon, untuk menebus dosanya, Amien mensponsori untuk memundurkan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR. Tuntutan mundur terhadap Gus Dur tentu saja tidak diterima oleh Gus Dur dan para pendukungnya. Terlebih setelah Megawati secara terang-terangan akan mempertahankan Gus Dur hingga tahun 2004 dan mengkritik para pengkritik Gus Dur. Pernyataan Megawati itu memberi sebentuk keberanian kepada para pendukung Gus Dur fanatik yang selama ini merasa sangat terpojok oleh berbagai pemberitaan dan opini yang menyudutkan Gus Dur. Merekapun berdemo balas menuntut Amien mundur. Sempat terdengar kabar, Amien Rais dicekal di Jawa Timur, propinsi basis PKB. Malah ada yang berteriak Amien halal darahnya. Rupanya, tuntutan mundur terhadap Gus Dur kemudian berkembang dianggap menjadi perseteruan antara Gus Dur dan Amien Rais bahkan antara NU dan Muhammadiyah......"

Ketiga, lalu HTI menegaskan, "Oleh karena itu, tuntutan agar Gus Dur mundur sebenamya sangat wajar. Bahkan semestinya bukan hanya Gus Dur, tapi seluruh birokrat yang korup itu harus diadili dan dipecat dari jabatannya masing-masing." []

ISLAM MODERAT DAN *KHILAFERS*

SEKADAR MENGINGATKAN, bagi kelompok radikal, paham Islam moderat akan ditolak dan dijauhi. Bagaimana ceritanya? Saya kutipkan artikel di majalah resmi milik *khilafers*, Al-Wa'ie.

Pertama, ketua DPP eks-HTI, Rahmat Labib mengatakan bahwa ayat 143 surat Al Baqarah bukan sebagai dalil untuk Islam moderat. Labib juga mengatakan bahwa paham moderat mengharuskan adanya jalan tengah tanpa dikaji manakah di antara tuntutan itu yang benar. Lalu dia memberikan contohnya. Tentu pendapat Labib ini sejatinya mengkonsepsikan sendiri tentang Islam moderat, lalu memberi contoh yang frontal sendiri, selanjutnya disalahkan sendiri, dan akhinya ditolak sendiri.

Kedua, tulisan dari kantor Jubir HTI yang intinya Barat memanfaatkan dan merangkul Islam moderat untuk bareng-bareng melawan kelompok radikal. Nampaknya jubir HTI ini lupa bahwa dalam kitab milik HTI sendiri dijelaskan bahwa Barat sebagai pembawa ideologi
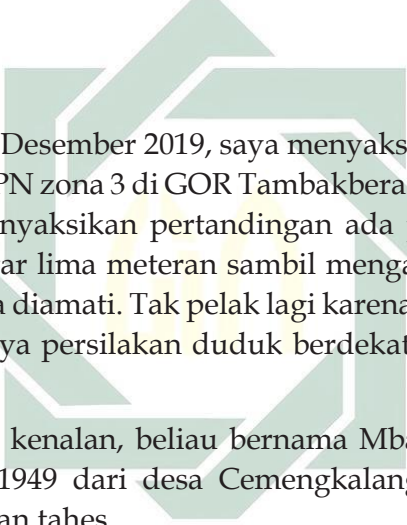
kapitalis akan memanfaatkan apapun dan siapapun yang menguntungkan. Konsekuensi dari buku HTI ini, suatu saat Barat akan bisa memanfaatkan kelompok apapun termasuk kelompok radikal teroris kayak ISIS, atau juga memanfaatkan Hizbut Tahrir untuk suatu kasus, kayak kasus Uighur misalnya dimana HTI bersama *the genk*nya satu irama walau bisa jadi beda tujuan. Kelompok radikal juga bisa digunakan sebagai *proxy war* oleh Barat.

Lalu kenapa HTI bersuara sama terkait Uighur? selain dilihat dari faktor simbiosis di atas, perlu diketahui juga bahwa HTI dalam kitabnya masih meyakini selain ada ideologi kapitalis dan Islam, juga ada ideologi komunis yang rigit kayak era perang dingin dulu. Cara pandang rigit ini identik saat HTI menilai demokrasi yang kaku tanpa melihat ada evolusi ataupun perbedaan memaknai demokrasi dari para tokoh dan intelektual.

HTI lupa bahwa China saat ini bisa disebut kapitalis yang komunis atau apapun sebutan, yang jelas sudah eklektik. Naifnya, HTI masih melihat China sebagai negara komunis *tempoe doeloe*. Oleh sebab itu, konstruksi pandangnya terhadap Uighur akan tetap era dulu, yakni menganggap China komunis yang menekan umat beragama. []

DEWAN KHOS PAGAR NUSA YANG DIDEKATI HTI DAN FPI

SIANG PADA 15 Desember 2019, saya menyaksikan babak final pencak silat PN zona 3 di GOR Tambakberas. Saat saya duduk untuk menyaksikan pertandingan ada pria sepuh yang duduk sekitar lima meteran sambil mengamati saya, entah kenapa saya diamati. Tak pelak lagi karena kursi saya panjang, maka saya persilakan duduk berdekatan dengan saya.

Salaman dan kenalan, beliau bernama Mbah Husain, kelahiran tahun 1949 dari desa Cemengkalang Sidoarjo. Tubuhnya kecil dan tahes.

Tentu naluri ingin tahu saya muncul tentang sejarah beliau. Pada tahun 1966 Abah Husein ikut latihan pencak Ciung Wanara, serta pada tahun 1975 ikut pencak Cakra Sakti. Pada tahun 1991 menjadi sekretaris cabang PN SDA. Sekarang diminta menjadi dewan khos PN Sidoarjo

Menurutnya, dahulu di Sidoarjo pencak eksis di tiap kampung. Nama pencaknya sesuai dengan nama kampung, semisal pencak Lebo, pencak Cemeng, pencak Suko dan

lain-lain. Sekarang beda lagi, di Sidoarjo pencak adanya di sekolah dan di pondok, di kampung mulai jarang.

Orang dahulu bangga kalau anaknya bisa ngaji, sholat dan bisa pencak. Sekarang tidak bisa pencak, tidak sholat, sudah tidak peduli lagi. Syiar pencak saat ini berkurang. Dahulu tiap Agustusan dan Muludan ada pencakan di alun-alun Sidoarjo. Demikian juga, sewaktu mudanya, di Sidoarjo *telasan* dijalankan yang waktunya setelah puasa untuk doa tertentu sambil bawa ingkung. Sekarang sudah jarang untuk Sidoarjo.

Tengah asyik diskusi, Gus Jabbar datang. Diskusi saya lanjutkan. Beliau bercerita pernah didekati HTI dan FPI. Beberapa tahun lalu HTI sering kirim buletin ke rumahnya, nama buletinnya Al Islam. Asal pengirim dari orang luar Cemengkalang. Tujuan HTI tiada lain adalah untuk sasaran agar masuk HTI, namun nampaknya tidak mempan.

Demikian pula orang FPI pernah mendekatinya. Di antara yang beliau ingat adalah sewaktu demo UU anti Pornografi sekian tahun lalu ditawari agar ikut FPI. []

LUAPAN ISMAIL YUSANTO

SAYA DAPAT video acara pada 31 Oktober 2019 yang diisi oleh Ismail Yusanto, Suteki, Abdul Chair dan *host*nya Mujiyanto (kalau tidak salah, dia alumni IPB, mantan wartawan Republika. Sekarang mengelola tabloid HTI "Media Umat").

Kata-kata yang keluar seakan menjadi kebenaran tunggal. Tidak hanya itu, pemerintahan yang ada saat ini sepertinya tiranik dan tidak berada pada nilai agama. Coba simak narasi (huruf kecil kalimat Ismail Yusanto dan huruf tebal kalimat saya).

1. Lawan jangan diam dan tunduk. **Kami juga akan lawan, kami juga tidak diam apalagi tunduk kepada minoritas yang resek.**
2. Jangan takut, takutlah kepada Allah. **Jangan takut, hargai jasa para ulama pendiri NKRI yang berdarah berdarah. kami juga punya Allah, bukan hanya anda saja.**
3. Kita melawan rezim. **Kami melawan HTI yang mau meruntuhkan NKRI yang telah diperjuangkan para ulama.**

4. Menyebut rezim firaunik. **Kami ada di rezim itu. maka kami sebut kelompok khilafah adalah calon *bughat* yang harus dilawan.**

5. Menggalakkan taqarrub untuk mampu melawan pemerintahan. **Kami sudah kesehariannya (bukan hanya saat mau makar) ada yang puasa baik Senen-Kamis, puasa Daud tahunan, ngrowot tahunan, tahajud, ngajar ngaji yang ditujukan untuk menjaga NKRI dan mendoakan anak didik santri supaya bisa pintar mengaji dan menjaga NKRI.**
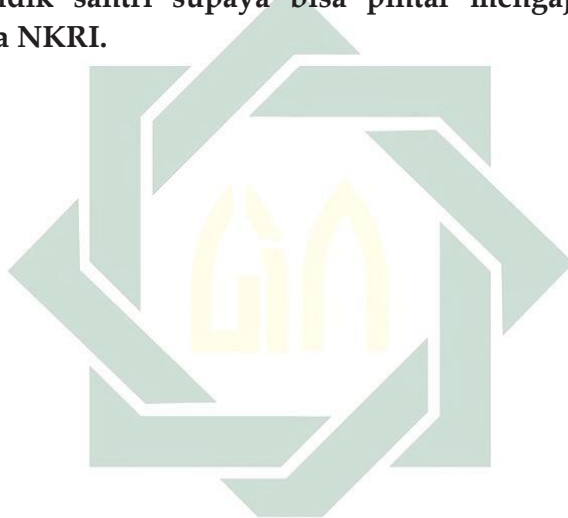
EMAK *KHILAFERS* MINTA GUGAT CERAI

KISAH INI saya tulis atas izin Sang Suami dengan harapan bisa dijadikan pelajaran. Siang itu pada 19 November 2019, setelah melihat perbaikan jalan di depan rumah, saya mendapat WA dari seseorang (sebut saja Sang Suami) yang berasal dari Jatim bagian timur.

Sang Suami menulis, "Assalamu'alaikum.. mohon maaf Gus.. izin konsultasi lewat WA. Begini Gus, istri saya ikut HTI. Saat ini sedang mengajukan cerai gugat karena saya tidak bisa diajak dan tidak memberi izin ikut kegiatan-kegiatan HTI-nya"..

Tentu saya kaget, Sang Suami ini adalah teman di FB. Hal yang membuat trenyuh adalah putra-putrinya hampir berjumlah semua jari yang ada di dua tangan, kanan dan kiri. Memang kelompok seperti *khilafers* dan sejenisnya seakan berlomba dalam kuantitas anak dengan alasan penyambung mata rantai dakwah.

Sang Suami alhamdulillah bisa lepas dari "jeratan" HTI. Sedang istrinya belum bisa lepas karena cintanya kepada HTI yang masih kuat.

Sekilas kisahnya, bermula dari tahun 2005 si istri ikut LDK (Lembaga Dakwah Kampus) di sebuah kampus di Jatim. Akhir tahun 2005, si istri diutus ikut Simposium Nasional LDK di sebuah kampus di Jabar. Karena harus bersama suami, Sang Suami pun mendampingi dan mengikuti kegiatan yang ternyata pesertanya mayoritas para aktivis HTI.

Selesai dari simposium, semangat istri semakin meledak-ledak tak tertahankan untuk ikut kajian HTI. Dia *ngaji* (*halaqah*) bersama ustadzah HTI (namanya Ustadzah F asli dari LA bersuami orang MDR). Dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa seizin Sang Suami karena memang Sang Suami tidak mengizini ikut HTI.

Awal tahun 2006 si istri tambah menggebu, bahkan mulai pakai cadar maskipun suami tidak membolehkan (Hizbut Tahrir tidak melarang dan tidak mewajibkan cadar, pen.). Si istri juga semakin banyak mengoleksi buku-buku HTI serta langganan majalahnya. Pertengahan tahun 2006 mulai terjadi cekcok. Sang suami membakar semua kitab, buku dan majalah HTI. Si istri melawan dengan membakar semua foto kenangan pernikahan. Proses lika-liku ini terjadi pasang surut karena ada beberapa pihak yang ikut berupaya mendamaikan.

Namun pada tahun 2019, sang istri berupaya melakukan gugat cerai yang sudah kesekian kali (saya ditunjukkan surat PA tentang cerai gugat). Hal yang melegakan adalah Sang Suami ingin mempertahankan bahtera rumah tangga. Sang Suami berkata, "Bagi saya, sampai kapanpun tidak akan pernah ada kata talak dan berpisah dari mulut saya. Bagi saya, ini tetap tanggung jawab untuk membimbing

agar tetap utuh dalam rumah tangga." Sang Suami juga bertanya kepada saya, "Kami ingin saran dan masukan.. agar istri bisa lepas dari doktrin-doktrin HTI-nya."

Memang menghadapi orang yang sudah cinta berat ke Hizbut Tahrir selain harus menggunakan sentuhan hati, juga perlu narasi nalar dan didoakan. Maksud narasi nalar adalah membedah nalar argumen yang diajukan sang istri. Lebih jelasnya di bawah ini.
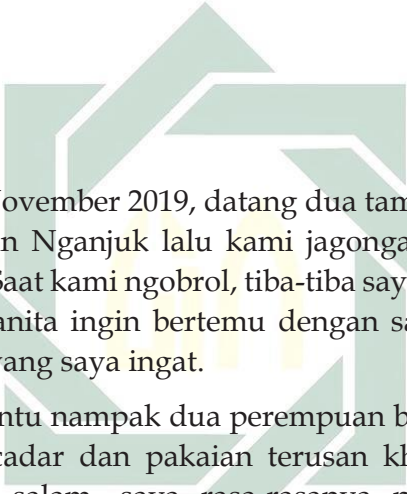
Dari komunikasi saya dengan Sang Suami, terungkap nalar istrinya bahwa menikah untuk mencari ridho Allah, bukan mencari kesenangan semata. Jika tidak bisa mendapat ridha Allah karena tidak dapat ridha suami, lebih baik sendiri. Maksud ridha Allah adalah perjuangan penegakan khilafah. Bahkan istri bilang sudah mewakafkan diri untuk perjuangan penegakan khilafah.

Sang suami belum mengajukan pertanyaan kritis yang berisi membedah kenapa khilafah dianggap wajib dan dianggap syariat? apa bangunan argumennya (baca buku saya *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*). Kalau hal ini tidak dilakukan, maka istri yang memang didoktrin bahwa khilafah itu wajib dan merupakan syariat Islam, akan menilai suami menentang syariat Islam. Nalar istri mirip dengan nalar dua wanita *khilafers* yang mendatangi rumah saya.

Harapan dan doa saya, semoga suami bisa mengajak istrinya diskusi lagi dan tidak jadi cerai, lalu sama-sama membangun NKRI karena sang suami adalah ASN dan istri pengajar swasta. []

DISKUSI DENGAN EMAK-EMAK *KHILAFERS*

PADA AWAL November 2019, datang dua tamu pendekar dari Sidoarjo dan Nganjuk lalu kami jagongan di gubuk sebelah rumah. Saat kami ngobrol, tiba-tiba saya diberitahu istri ada dua wanita ingin bertemu dengan saya. Berikut catatan singkat yang saya ingat.

Di depan pintu nampak dua perempuan berkerudung panjang tanpa cadar dan pakaian terusan khas. Mereka tersenyum dan salam, saya rasa-rasanya pernah tahu dia, tapi saya lupa. Selanjutnya saya juga senyum dan menjawab salam. Lalu saya persilakan masuk ruang tamu, saya bertanya nama dan ada apa gerangan? Dia menyebut nama dan menjelaskan maksudnya, "Kami dari Hizbut Tahrir, baru saja berkunjung ke seorang ning (sebutan keluarga pondok putri, nama tidak perlu saya tulis), dan dibilangi agar kami pergi ke rumah Gus Rofiq." Dalam batinku, "Nekat juga para perempuan ini datang."

Lalu saya katakan kepadanya bahwa memang akhir-akhir ini ada beberapa keluarga pondok Bahrul Ulum

Tambakberas yang berkeluh sering didatangi oleh emak-emak HTI, mungkin ya sampean berdua ini yang dimaksud."

Lalu di antara mereka menjawab, "Kami memang telah mendatangi beberapa ning dan bu nyai yang ada di Tambakberas. Tapi kami tidak diberitahu bahwa kami dilarang datang. Kalau dilarang, tentu kami tidak datang."

Saya jelaskan bahwa tidak mungkinlah seorang bu nyai akan menolak langsung seorang tamu. Seharusnya kita yang paham sendiri bagaimana sikap mereka." Saya melanjutkan, "Dalam laporan yang masuk, ketika anda mendatangi seorang bu nyai, kemudian oleh santri dikatakan bahwa bu nyai masih sibuk, tapi anda tetap menunggu. Sebetulnya hal itu adalah penolakan secara halus." Oleh sebab itu, di grup keluarga pondok Tambakberas, saya memang pernah menulis bila ada keluarga Tambakberas yang didatangi emak-emak militan *khilafers*, disampaikan saja agar menemui saya.

Selanjutnya saya silakan kepada dua tamu untuk mencicipi kue dan minuman. Setelah itu saya minta mereka agar mendakwahi saya akan gagasan khilafahnya. Awalnya dia mengulangi lagi bahwa ke sini karena disuruh seorang ning agar ke rumah saya.

Lalu dia dengan agak kikuk (antara gamang dan polos) berkata, “Mendirikan khilafah itu kan wajib.” Perkataannya tanpa diurai bagaimana konstruksi wajibnya. Konstruksi wajibnya khilafah ala *khilafers* sudah saya bantah dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*. Mereka di *halaqah* memang hanya diajarkan bahwa mendirikan khilafah wajib.

Selanjutnya mereka masih dengan “kepolosan” kayak menggugat bertanya kenapa khilafah dianggap ancaman? Saya jawab singkat, "Sekalipun tidak ada tulisan di buku HTI bahwa khilafah akan mengganti sistem NKRI, mengganti Pancasila dan UUD 1945, tapi saya pastikan bahwa cita-citanya adalah merubah sistem non-khilafah, apapun sistem itu, dan akan mengganti konstitusi yang yang berlaku di suatu negara dengan konstitusi Hizbut Tahrir. Apakah itu bukan ancaman?"

Si tamu saya ini diam tidak menolak. Dia melanjutkan dengan pernyataan lain bahwa khilafah adalah takdir dan janji Allah yang tidak tahu dimana akan berdiri. Saya jawab, "Dulu tahun 1990-an, Indonesia tidak termasuk pusat dakwah Hizbut Tahrir. Tetapi setelah era reformasi, Indonesia dijadikan *benchmark* dakwah Hizbut Tahrir di dunia yang dianggap berhasil. Sejak itu, Hizbut Tahrir menentukan bahwa Indonesia adalah salah satu sasaran potensial untuk didirikan khilafah. Masalah khilafah itu janji asli atau janji palsu, bantahannya ada di buku saya.”

Dua emak-emak ini diam lagi. Lalu saya apresiasi akan militansinya termasuk rela dijadikan ujung tombak terjun ke masyarakat di saat para bapak-bapak *khilafers* tidak muncul di publik secara terus terang, beda dengan emak-emak yang terus terang mengaku dari HTI. Saya bilang, "Anda punya niat baik, tapi itu tidak cukup, karena akan dianggap berbahaya saat hal itu akan meruntuhkan NKRI. Ingat ya, kami juga punya niat baik yang benar. Kami ingin menjaga NKRI yang didirikan para ulama dan para pendiri bangsa yang lain."

Memang para aktivis HTI tidak tahu dan tidak diajarkan bahwa membela NKRI juga wajib karena *hubbul wathon*. Sayangnya *hubbul wathon* mereka anggap *ashobiyah* karena keinginan mereka hanya khilafah.

Saya lanjutkan perkataan, "Saat anda merasa mempunyai niat baik (yang itu kami anggap salah), jangan menyangka bahwa orang yang menolak gagasan khilafah adalah penentang Islam, lalu disumpahserapahi dengan keburukan. Ingat kasus tokoh yang menolak khilafah bagimana mereka disumpahserapahi di medsos oleh teman-teman anda."

Saat mereka mau pamit, saya tahan beberapa kali, saya pancing agar omong masalah lain supaya gayeng. Kebetulan di antara mereka ternyata kenal sepak terjang saya saat di Universitas Airlangga dan mengatakan saya orang terkenal di kalangan Hizbut Tahrir Surabaya, maka saya ajak bicara masa lalu di Universitas Airlangga agar cair.

Setelah itu, mereka berdua mau pamit lagi dan saya pesani agar kapan-kapan datang ke rumah saya dan ajak suami untuk diskusi. Masak saat ini yang disuruh maju kok emak-emak, kan kasihan. Kalau belum punya bahan diskusi, apa mau saya kasih buku saya. Dia nampak gamang untuk mengiyakan, mungkin ada kekhawatiran. Maka saya batalkan pemberian buku. Saya titip salam ke keluarganya dengan harapan dalam hati yang tulus agar sadar kembali ke pangkuan NKRI membangun negeri. []

KONTRANARASI UNTUK SANTRI MILENIAL

PADA 24 OKTOBER 2019, saya mengisi acara di Masjid Raya Baiturrahman Pupuk Kaltim yang diadakan oleh Forum Komunikasi Santri Bontang (FKSB) bekerja sama dengan walikota, NU Bontang, Kemenag dan Polres.

Semua unsur pemerintahan hadir, bahkan rais syuriyah, ketua tanfidziyah NU Kota Bontang dan walikota ikut mendengarkan hingga selesai. Hal yang menyenangkan adalah para pelajar setingkat SMA memenuhi ruang masjid antusias bertanya, lebih dari sepuluh yang bertanya dan tidak jarang ada yang kritis, dan ada juga "bau-bau" dan menyerempet gagasan kelompok radikal.

Di antara yang saya sampaikan bahwa dalam pengamatan, pembacaan, dan perenungan saya, ada beberapa penyebab lahirnya radikalisme yang merasuki generasi milenial.

Pertama, kaget tampilan. Artinya saat melihat seseorang yang ucapan dan tampilan dan "ornamen" pisik dianggap Islami dalam persepsinya, kebetulan seseorang itu adalah ustadz yang berlidah "api" (ustadz yang dalam ceramahnya

membakar dengan isu ganti NKRI dengan khilafah dan gampang menstempel takfir plus thaghut serta gampang mencap syirik), maka sangat mungkin akan dijadikan panutannya. Sekalipun sangat mungkin dia melihat si ustadz hanya di medsos.

Kedua, kaget istilah agama. Di saat dulunya dia nol dalam pengetahuan agama atau abangan. Lalu muncul kegelisahan dalam dirinya (entah apapun penyebab kegelisahan itu), selanjutnya dia merasa ingin dekat dengan agama agar dekat dengan Tuhan. Kebetulan dia mendengar atau membaca istilah dalam agama seperti hijrah, dakwah, khilafah, halal, kaffah, tobat, kafir, jihad, surga, neraka dan lain-lain dari ustadz lidah "api", maka bak pucuk dicinta ulam tiba.

Ketiga, dulu urakan entah dalam tampilan pisik atau kelakuan. Atau bahasa gampangnya dulu dia menganggap dirinya sebagai pendosa. Lalu di medsos atau di lingkungan sekitarnya ada promosi belajar Islam, dan kebetulan yang mempromosikan Islam bukan dari ulama moderat, tapi dari ustad berlidah "api", maka hal itu adalah pintu gerbang menuju radikalisme hingga terorisme.

Keempat, dia melihat lingkungannya "terbiasa" maksiat, atau institusinya dianggap koruptif yang dianggap tidak mencerminkan nilai Islam yang baru dia pelajari dari medsos atau dari ustad berlidah "api", maka dalam kondisi demikian, dia akan melawan keadaan dengan petunjuk ajaran sang ustad lidah "api" tersebut. Hal ini akan berbeda cara melawannya bila dia ketemu ulama moderat.

Kelima, Adanya perlawanan terhadap liberalisme. Gagasan liberalisme bisa menjadi *trigger* seseorang untuk

memusuhinya. Naifnya, kalau seorang tokoh muslim sudah distempel liberal, maka sebagus apapun tulisannya akan dia tolak. Kebetulan arus kuat medsos yang melawan ini di antaranya adalah kelompok ustadz lidah "api". Jadilah dia *follower* dan anti liberal. Semakin nyaring disuarakan bahaya liberalisme, maka semakin kuat juga dia untuk menjauh darinya dan mendekat kepada ustad yang melawan liberalisme. Dalam situasi seperti ini, strategi dakwah moderat memang perlu "mengambil jarak" dengan sesuatu yang dicap liberal. Karena kalau membela sesuatu yang dicap liberal, dalam situasi tertentu tidak menguntungkan dalam dakwah moderat (poin kelima ini belum sempat saya sampaikan). []

KRITERIA RADIKAL DI NKRI

DULU SEWAKTU masih kuliah di Universitas Airlangga, ada teman *halaqah* saya di Hizbut Tahrir yang bangga saat disebut sebagai radikal oleh rezim Orde Baru. Kebanggaannya entah karena sekedar "gagah-gagahan" semangat muda, atau merujuk kepada arti bahasa radikal yakni "mendasar". Hal yang pasti, pada waktu itu kalau disebut radikal akan berhadapan dengan rezim yang tidak kenal ampun.

Setelah era reformasi, rezim yang berkuasa lebih longgar terhadap kelompok radikal, maka berkecambahlah kelompok ini dengan berbagai variannya. Mungkin ada pertanyaan, apa krieria kelompok radikal itu? Masing-masing pakar bisa beda pendapat. Bagi saya, berdasar pengamatan dan pembacaan dalam konteks era sekarang di Indonesia, kelompok radikal mereka yang mau mengganti Pancasila, atau mengganti sistem politik di NKRI dengan negara Islam ataupun khilafah, juga kelompok separatis. Demikian pula bagi mereka yang mempunyai cara pandang sempit dan gampang "alergi" terhadap keberagamaan liyan
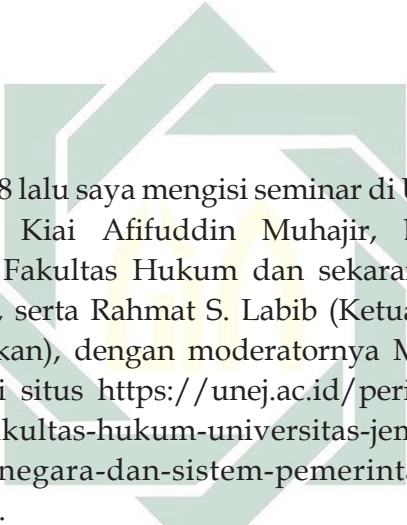
(selain kelompoknya) dengan menstempelnya sebagai kafir dan syirik. Saya tidak mempermasalahkan ada orang yang tidak suka amaliah dan tradisi NU, tapi hendaknya jangan sering teriak saat ceramah dengan menyuarakan hal itu karena potensial menimbulkan gesekan dan friksi bahkan bentrokan.

Selanjutnya saya juga menyimpulkan bahwa cikal bakal terorisme yang berlatar agama hampir bisa dipastikan dari kelompok radikal di atas. Dengan demikian, wajar kita waspada terhadap kelompok tersebut. []
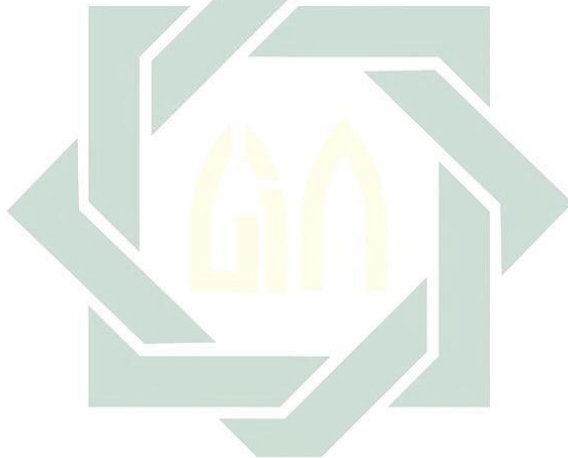
BERSAMA KETUA DPP HTI, RAHMAT. S. LABIB

PADA 4 JUNI 2018 lalu saya mengisi seminar di Universitas Jember bersama Kiai Afifuddin Muhajir, Dr. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum dan sekarang sebagai komisioner KPK), serta Rahmat S. Labib (Ketua DPP HTI sebelum dibubarkan), dengan moderatornya Mas Adam. Baca beritanya di situs https://unej.ac.id/peringati-hari-lahir-pancasila-fakultas-hukum-universitas-jember-gelar-seminar-bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan-dari-perspektif-islam/.

Selesai seminar, ada dua hal yang saya sampaikan saat berduaan dengan Rahmat S. Labib.

Pertama, saya tanya, "Bagaimana kalau HTI kalah di pengadilan dan sah dibubarkan?" Jawaban Rahmat S. Labib, "*Sampean* (Anda) kan sudah tahu dulu (zaman Orde Baru) gimana Hizbut Tahrir bergerak". Maksud Rahmat S. Labib adalah sewaktu saya ikut HT di Unair dahulu bagaimana kelompok ini menyebar ideologinya melalui bawah tanah. Nampaknya setelah dibubarkan para *khilafers* memang

tetap bergerak tapi di bawah tanah tapi ada tambahan, yakni bergerak di alam maya alias di media sosial.

Kedua, saya mengajaknya, "Ayo masuk NU saja!" Jawab Rahmat S. Labib sambil tersenyum, "Nanti dianggap *ngriwuki*."

Sampai sekarang saya tidak lelah mengajak *khilafers* untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, walaupun di FB mereka yang masih gandung dengan Hizbut Tahrir sering mengundang saya untuk gabung dalam kelompok FB-nya atau bahkan menentang pendapat saya. Semuanya saya anggap sebagai dakwah kepada mereka. []
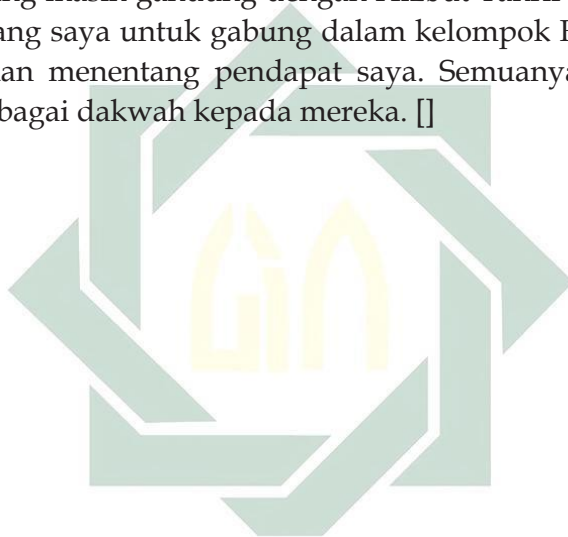
PERSAMAAN WAHABI DENGAN HIZBUT TAHRIR

BANYAK PENGAMAT yang salah menilai dengan menganggap Wahabi sama dengan HTI. Saya pastikan beda. Para tokoh HTI sendiri juga menolak bila disamakan. Bisa dibaca di majalah lawas Al Wa'ie milik mereka yang menolak dianggap sebagai Wahabi. Bahkan HTI juga mengkritik Wahabi.

Sekalipun berbeda tapi ada kesamaan, yakni sama-sama memakai "gelombang" kembali ke ajaran Nabi dan Salafus sholih. Hanya saja untuk Wahabi difokuskan kepada "ibadah", sedang Hizbut Tahrir ke politik (khilafah).

Wahabi akan "marah" dengan menstempel bid'ah, syirik dan lain-lain terhadap kelompok yang dianggap melakukan amalan yang dalam pemahaman sempitnya tidak ada pada zaman Nabi dan salafus sholih. Hizbut Tahrir juga akan "marah" dengan stempel kufur bila ada gagasan sistem politik yang dianggap tidak ada pada zaman Nabi dan salafus sholih. []

MEMBACA GELAGAT *KHILAFERS* DATANG KE TOKOH NU

DARIPADA *JAPRI*, lebih baik saya jawab lewat medsos saja. Intinya, baru-baru ini ada *khilafers* yang datang ke kiai NU, lalu ada yang tanya bagaimana pendapat saya?

Pertama, kiai NU itu biasanya tidak menolak orang yang datang, entah penjahat atau santri atau apapun profesi, bisa diterima kiai NU. Bahkan tahun 1965-an banyak cerita bahwa orang PKI datang ke kiai NU untuk minta perlindungan. Kiai NU menerima dan melindunginya.

Kedua, pengalaman saya, *khilafers* yang terbuka pikirannya (mau berubah) akan datang secara sembunyi atau tertutup, lalu diskusi perihal pemikirannya. Mereka yang mulai gamang atas gagasan HTI lalu tidak akan mengekspos kedatangannya ke kiai NU.

Ketiga, kalau datang rombongan, apalagi sengaja diekspos, maka biasanya ada misi mencari perlindungan, atas malah mau mengajak kiai tersebut untuk bergabung dengan HTI.

Keempat, khilafers saya pastikan masih yang melekat ide khilafahnya, maka kalau mendatangi kiai, mungkin kembali ke poin ketiga. Karena umumnya simpatisan eks-HTI yang ingin insaf datang secara sembunyi seperti poin kedua, dan bila sudah mantap akan kelirunya gagasan HTI, dia berani nongol, tapi kebanyakan diam dan tidak mengekpos dirinya. []
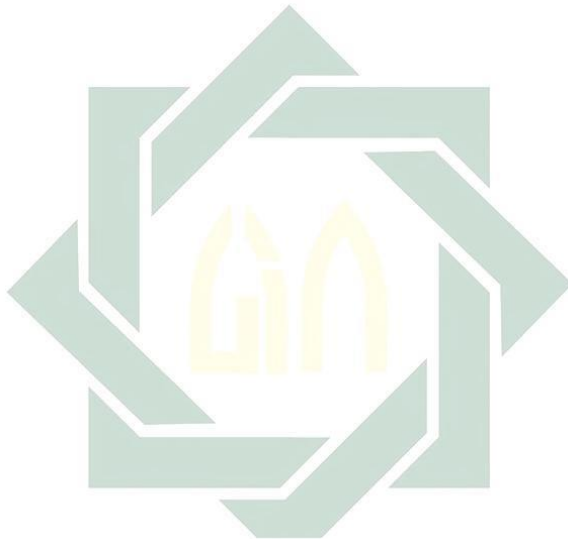
DUA KHALIFAH, BUNUH YANG TERAKHIR

MAS ALI CANDRA (teman medsos) bertanya bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang hadis jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Sebetulnya masalah itu sudah saya singgung dalam artikel saya, tapi tidak apa akan saya jawab singkat. Bagi Hizbut Tahrir, khalifah harus satu di seluruh dunia. Kalau ada dua atau lebih, maka harus dibunuh. Gagasan Hizbut Tahrir ini bisa kita diskusikan lebih jauh:

Pertama, sebetulnya ada ulama yang membolehkan adanya lebih dari satu khalifah dengan pertimbangan yang bisa kita diterima, tapi ini ditolak oleh Hizbut Tahrir.

Kedua, dalam sejarah awal Islam, saat Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, argumen yang digunakan tidak memakai hadis di atas.

Ketiga, hadis di atas justeru membuktikan bahwa khalifah adalah bukan jabatan sakral, buktinya bisa dibunuh. Dengan demikian, mengglorifikasi khalifah sembari menafikan-mengharamkan adanya presiden dan lain-lain seperti yang terjadi saat ini adalah keliru.

Keempat, kalau Hizbut Tahrir melihat sejarah yang lain, ternyata ada dua khalifah tidak lama setelah Muawiyah wafat. Pada masa Muawiyah bin Yazid (cucu pendiri dinasti Umayyah) diangkat menjadi khalifah, muncul khalifah Iain. yakni sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awwam yang lahir di Madinah pada tahun l hijriyah. Dia tekun berpuasa, shalat, dan pemberani. Dia perawi 33 hadits. Dia tidak bersedia membaiat Yazid bin Muawiyah.

Ketika Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair bin Awwam dibaiat untuk menjadi khalifah, dan ditaati penduduk Hijaz, Yaman, Iraq serta Khurasan. Hanya penduduk Syam dan Mesir yang tidak membaiatnya karena telah membaiat Muawiyah bin Yazid. Namun. ketika Muawiyah bin Yazld wafat, kedua penduduk negeri tersebut membaiat Abdullah bin Zubair.

Selanjutnya. Marwan bin Hakam yang menjadi penerus Muawiyah bin Yazid memerangi penduduk Syam dan Mesir. Marwan meninggal tahun 65 H kemudian digantikan oleh putranya, Abdul Malik. Abdul Malik inilah yang mengutus panglima perangnya, Al Hajjaj untuk memerangi Abdullah bin Zubair dengan membawa empat puluh ribu pasukan dengan mengepung Makah beberapa bulan sambil melemparinya dengan manjaniq. Abdullah bin Zubair tertangkap, kemudlan dibunuh dan disalib pada tahun 73 H.

Pertanyaannya, bagaimana Hizbut Tahrir menyikapi sejarah di atas agar konsisten dengan gagasannya tentang ketunggalan dan kontinuitas khilafah hingga tahun 1924 masehi?

BENDERA TAUHID, BENDERA SYAHADAT, DAN RUMAH TAUHID

NOMENKLATUR "BENDERA tauhid" sependek penelusuran yang saya lakukan tidak ditemukan redaksinya pada masa Rasul. Penyebutan dan penggemboran nama "bendera tauhid" di medsos terjadi baru saja, yakni pada tahun 2017 (semisal lihat di https://republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/oybq5p283/aksi-tolak-perppu-ormas-di-depan-gedung-dpr-5).

Mungkin ada yang mau menelusuri ke mbah *Google* dengan kata kunci *tawheed flag* atau *liwa al tauhid* (لواء التوحيد) . Akan menarik kalau berhasil menemukan kapan asal usul penyebutan dan penggunaannya. Itu bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

Kenapa disebut bendera tauhid? Bisa jadi karena ada kain yang ditulisi kalimat tauhid, lalu disebut bendera tauhid. Konsekuensinya adalah apabila ada baju atau kaos yang ditulisi kalimat tauhid, maka akan disebut baju tauhid, atau kaos tauhid? Atau juga kain yang ditulisi kalimat syahadat akan disebut bendera syahadat, atau keranda mayat yang ditulisi kalimat *istirja'* akan disebut keranda

istirja'. Belum lagi kalau ada mobil atau truk yang ditulisi kalimat tauhid akan disebut mobil tauhid atau truk tauhid.

Bid'ahkah? Kalau meminjam logika penstempel bid'ah (Wahabi), mereka seharusnya menyebut bid'ah. Bagi mereka, kalau bid'ah tidak ada yang hasanah. Bid'ah ya sesat alias *dhalalah*. Namun nampaknya untuk kasus "bendera tauhid", penstempel bid'ah, atau malah sehaluan.

Apakah saya benci dengan kain yang ditulisi kalimat mulia? Tentu tidak. Ingat ya sebagian kiai dan para pendekar di NU adalah pelestari tradisi yang di antara tradisi tersebut adalah menulis jimat atau rajah. Rajah atau jimat itu ada yang dibuat dari kain, kertas, kulit dan lain-lain. Adapun tulisannya juga macam-macam, ada ayat suci, kalimat mulia huruf arab dan lain-lain. Namun tendensi kita menggunakannya bukan untuk mensyirikkan Allah. Juga bukan simbol memberontak terhadap NKRI.

Dalam kesimpulan dari penelitian saya, kalau di NKRI ada pengibar kain putih atau kain hitam yang ditulisi kalimat tauhid dengan khat tertentu, maka dia adalah *khilafers*. Pemerintah seharusnya melarang pengibaran bendera itu, karena motifnya adalah politik. Di Saudi bendera bertuliskan kalimat tauhid juga dianggap musuh pemerintah (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46121835). []

PROF. JIMLY BICARA *SWEEPING* BENDERA

PROF. DR. JIMLY ASHSHIDDIQY pernah saya lihat berceramah di TV Muhammadiyah. Berikut catatan yang saya ingat, bila salah mohon dikoreksi. Perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Jakarta sama-sama mencoret tujuh kata. Rasul marah sekali dengan pengkhianatan atas perjanjian Hudaybiyah. Hal itu bisa diambil pelajaran agar kita harus pegang teguh perjanjian yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa terkait dengan NKRI.
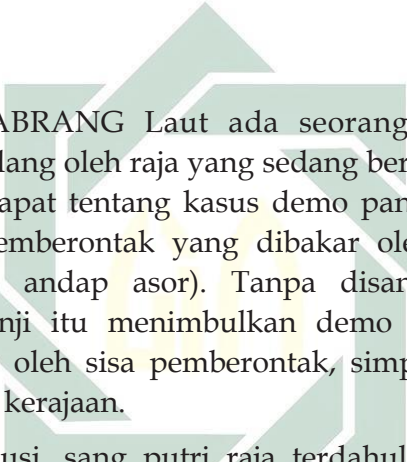
Mendengung-dengungkan kekecewaan dan memakai narasi NKRI bersyariah adalah tidak tepat. NKRI sudah final. Satu lagi pemikiran Prof. Jimly yang sangat demokratis sehingga melihat sesuatu secara demokratis. Beliau mencontohkan *sweeping* buku adalah salah, buku dilawan dengan menulis buku, tentu ini saya setuju. Beliau juga bilang *sweeping* logo palu arit juga salah, hendaknya biarkan saja. Statemennya ini akan saya tanya lanjut, apa manfaatnya membawa logo palu arit? membawa logo palut arit hanya mencari sensasi dan mencari masalah saja, serta tidak ada nilai kreativitas bagi kemajuan NKRI .

Selanjutnya Prof. Jimly juga mengatakan bahwa *sweeping* bendera tauhid juga keliru. Nampaknya penjelasan beliau perlu dikritisi. *Pertama,* sikap demokratis akan kita munculkan manakala sama-sama menggunakan norma yang disepakati bersama. Bagi para pengingkar dan penolak kesepakatan terhadap demokrasi apakah kita akan tetap bersikap demokratis?

Kedua, saat ini para pengusung bendera yang disebut bendera tauhid masih hidup dan masih tetap berupaya mengganti NKRI dengan khilafah. Mereka mengibarkan simbol bendera yang disebut bendera tauhid. Apakah cikal bakal perbuatan makar ini didiamkan? *Ketiga,* kira-kira menurut Prof. Jimly bolehkah orang mengibarkan bendera milik ISIS di Indonesia atau di negara mana pun? []

DIALOG BENDERA ANTARA PUTRI RAJA DAN SANG RAJA

DI NEGERI SABRANG Laut ada seorang putri raja terdahulu diundang oleh raja yang sedang berkuasa. Sang raja minta pendapat tentang kasus demo panji (bendera) perang milik pemberontak yang dibakar oleh sebagian bansor (barisan andap asor). Tanpa disangka, kasus pembakaran panji itu menimbulkan demo berjilid-jilid yang disponsori oleh sisa pemberontak, simpatisan, dan para politisi anti kerajaan.

Selesai diskusi, sang putri raja terdahulu membuat guyonan dengan berkata, "Wahai sang raja, banyak kawan saya dari luar negeri memesan panji pemberontak. Terutama yang tinggal di Eropa dan Amerika. Saya tanya buat apa? Mereka menjawab, "Buat persiapan musim dingin. Biasanya kalau musim *winter* kami memakai log atau kayu bakar di perapian untuk menghangatkan diri. Tapi hanya beberapa jam saja panasnya bertahan. Sementara kalau panji pemberontak yang dibakar, bisa bikin suasana panas sampai lama!"

Mendengar guyonan putri raja terdahulu, sang raja tertawa terpingkal, lalu ganti membuat guyonan, "Efek
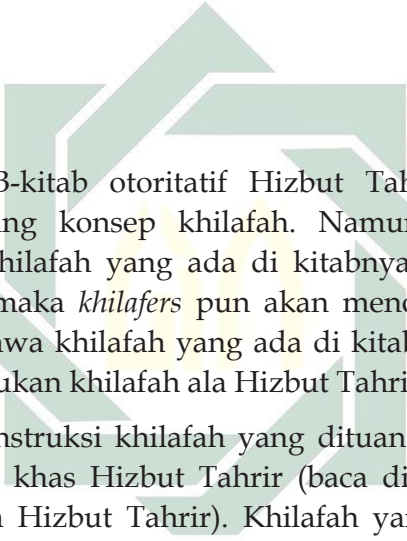
panas bendera yang dibakar Bansor tidak seberapa bila dibanding panasnya kemarahan demonstran. Neraka pun bisa menjadi kalah panas bila para demonstran demo di sekitar neraka. Apalagi demonya dengan cara para demonstran dimasukkan ke dalam neraka. Neraka akan tekuk lutut lalu memohon ke Tuhan agar fungsinya digantikan oleh koar-koar para demonstran yang ternyata lebih panas."

Tanpa disangka, di luar istana telah terdengar teriakan demo. Sang raja pun nyeletuk secara refleks, "Neraka datang." []
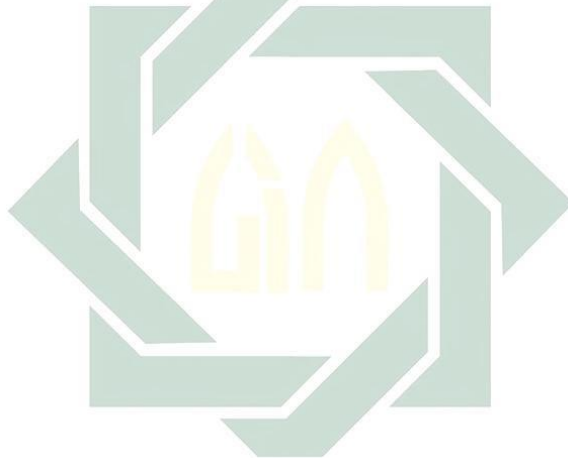
TIDAK PUNYA PEMIKIRAN KHILAFAH DAN TIDAK PUNYA BENDERA?

DALAM KITAB-kitab otoritatif Hizbut Tahrir banyak dijelaskan tentang konsep khilafah. Namun saat kita bilang bahwa khilafah yang ada di kitabnya adalah ala Hizbut Tahrir, maka *khilafers* pun akan menolak, sambil mengatakan bahwa khilafah yang ada di kitabnya adalah khilafah Islam bukan khilafah ala Hizbut Tahrir.

Padahal konstruksi khilafah yang dituangkan dalam kitabnya adalah khas Hizbut Tahrir (baca disertasi saya tentang khilafah Hizbut Tahrir). Khilafah yang khas ala Hizbut Tahrir itu banyak ketidaksamaannya dengan kitab *Al Ahkam Al Sultaniyah* al Mawardi maupun kitab yang lain.

Demikian juga terkait dengan bendera, dalam kitab otoritatif Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* dijelaskan tentang bendera yang disebut dengan *rayah* dan *liwa'* dengan ciri khas tertentu. Namun saat hal itu disebut sebagai bendera Hizbut Tahrir atau bendera yang diformulasi oleh tokoh Hizbut Tahrir, mereka pun akan menolak dan mengatakan itu bendera Rasul.

Padahal dalam sejarah demo-demo yang pernah dilakukan *khilafers* di seluruh penjuru Indonesia, maupun saat acara di gelora Bung Karno tahun 2000-an, begitu gamblang dan terang benderang mereka membawa bendera hitam dan bendera putih dengan tulisan kalimat tauhid plus khat atau model tulisan khas.

Tidak hanya di Indonesia, silakan anda membuka website resmi Hizbut Tahrir baik yang di Inggris, Australia, Amerika, Belgia, Belanda, Rusia, Ukraina, Mesir, Yordania, Maroko, Sudan, Palestina, Afganistan, Kenya, Malaysia, Pakistan dan lain-lain. Kalau anda telusuri terkait dengan bendera, anda akan menemukan ciri yang sama sebagiamana dijelaskan di atas.

Jikalau Hizbut Tahrir tetap menolak model khilafah dan bendera yang mereka konstruksi, lalu konsep apa yang dipunya oleh Hizbut Tahrir? []
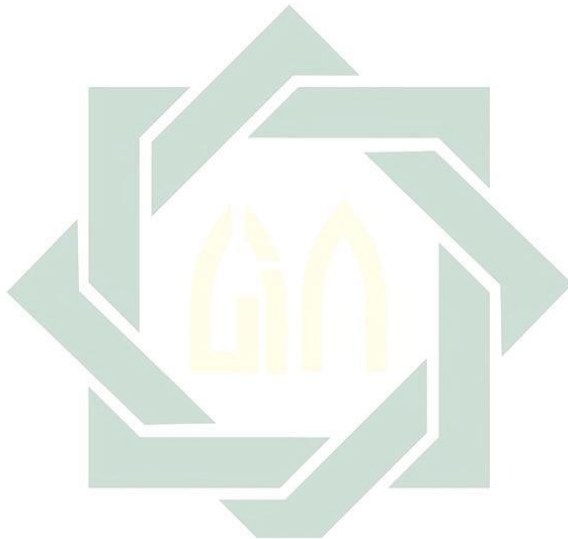
BENDERA HTI YANG GENTAYANGAN

MASIH INGAT ibu muslimat NU Jombang yang merasa ditipu oleh perempuan HTI Jombang karena diminta untuk bawa bendera HTI, lalu difoto, kemudian diviralkan? Kalau lupa ini linknya http://www.nu.or.id/post/read/78480/tipu-ibu-sumarni-dua-muslimah-hti-jombang-akhirnya-minta-maaf.

Awal November 2018, saat saya mengisi acara di Lamongan, mantan banser yang sekarang menjadi lurah bercerita bahwa anggota HTI suka menyusup saat ada acara warga NU. Saat Ansor, PMII dan warga yang lain demo di alun-alun Lamongan soal pemindahan kedubes Amerika ke Al Quds, ada bendera HTI dikibarkan. Tidak hanya sekali, saat acara Habib Syech Agustus lalu di alun-alun Lamongan, juga ada beberapa orang membawa bendera HTI. Akhirnya banser yang turun tangan dengan merampas bendera tersebut.
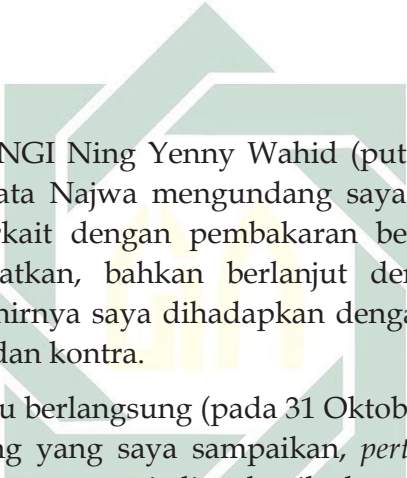
Ternyata bendera HTI saat ini sering gentayangan. Kata Kasatkornas Banser, Alfa Isnaeni, saat peristiwa

Garut, dalam waktu yang sama hanya tempat yang berbeda, terjadi pengibaran bendera HTI di 11 tempat di Jawa Barat. Nampaknya bendera HTI banyak menyusup dan mengganggu warga NU serta menyita pikiran aparat keamanan. Salam damai untuk NKRI. []

DUA MISI DI MATA NAJWA
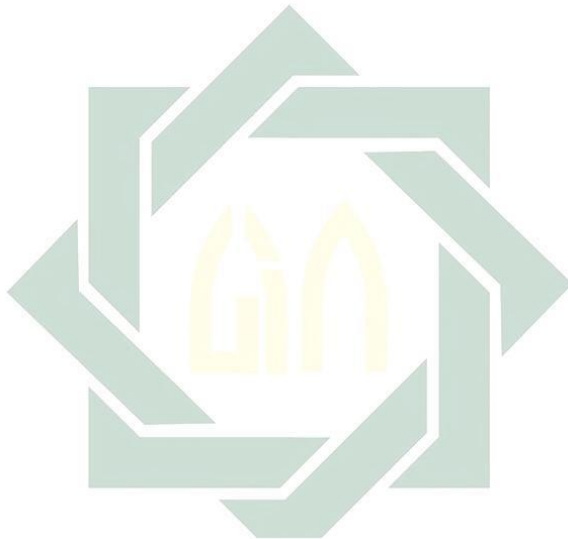
SAYA DIHUBUNGI Ning Yenny Wahid (putri Gus Dur) yang intinya Mata Najwa mengundang saya untuk ikut berpendapat terkait dengan pembakaran bendera yang ramai diperdebatkan, bahkan berlanjut dengan demo berjilid-jilid. Akhirnya saya dihadapkan dengan beberapa tokoh yang pro dan kontra.

Saat acara itu berlangsung (pada 31 Oktober 2018) ada dua poin penting yang saya sampaikan, *pertama*, terkait dengan bendera yang menjadi polemik dan dieksploitasi oleh beberapa kelompok itu tiada lain adalah bendera yang digunakan oleh Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Hal ini berdasar pengalaman saya ikut menjadi anggota Hizbut Tahrir maupun berdasar penelitian saya. Jadi sebenarnya bahwa bendera itu adalah bendera Hizbut Tahrir sudah gamblang dan terang benderang, namun dibikin gelap karena banyak penunggang gelap.
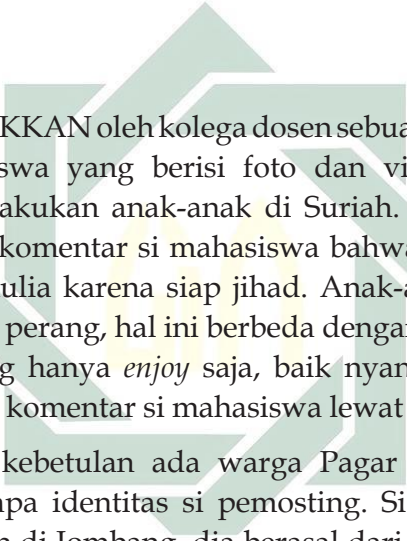
Kedua, Kiai Wahab Chasbullah Tambakberas contoh yang baik dalam menyikapi gerakan radikal. Saat memutuskan *bughat* untuk PRRI/Permesta yang Masyumi

juga terlibat, hakekatnya beliau pedih dan berat hati karena mereka sesama anak bangsa. Tapi dengan pandangan yang lebih luas demi NKRI yang telah dirintis bersama, maka tetap diputuskan bahwa mereka adalah pemberontak. Toh demikian, NU tetap membantu kebutuhan hidup kepada keluarga pemberontak. []

MAHASISWA LABIL TERTARIK PARA "MUJAHIDIN"

SAYA DITUNJUKKAN oleh kolega dosen sebuah postingan seorang mahasiswa yang berisi foto dan video latihan perang yang dilakukan anak-anak di Suriah. Selanjutnya video itu diberi komentar si mahasiswa bahwa anak-anak itu hebat dan mulia karena siap jihad. Anak-anak sekecil itu sudah dilatih perang, hal ini berbeda dengan anak-anak ahlusunnah yang hanya *enjoy* saja, baik nyanyi, bermain dan lain-lain. Itu komentar si mahasiswa lewat medsosnya.

Suatu saat kebetulan ada warga Pagar Nusa yang bisa melacak siapa identitas si pemosting. Si mahasiswa itu sedang kuliah di Jombang, dia berasal dari Jawa Timur sebelah kulon. Setelah pemuda tersebut bisa "diambil", lalu diantarkan ke saya pada suatu malam.

Dia saya tanya, "Kenapa kamu sering memposting foto-foto "mujahid" Sebelumnya kamu posting tentang khilafah." Jawabnya, "Saya tertarik dengan perjuangan mujahidin." Lalu saya tanya, "Mujahidin yang mana?" Eh ternyata dia bilang belum bisa menentukan mana yang cocok untuk memilih diantara mujahidin yang beragam

afiliasi dan nama itu. Tapi dia mengagumi mereka. Baginya, para mujahidin itu rela berjuang melawan kejahatan dan kemungkaran.

Ketika saya tanya, "Kenapa harus perang?" Katanya sulit kalau model damai, maka harus perang. Saya tanya lagi, "Mujahidin yang perang di mana?" sahutnya, "Mujahidin yang di Suriah. Mereka berani terjun langsung untuk memerangi Bashar al Asad."

Ternyata perang Suriah banyak menjadi inspirasi warga negara Indonesia. Selanjutnya pemuda tersebut saya kejar dengan pertanyaan, "Dari mana kamu tahu bahwa mujahid itu benar-benar berperang di jalan Tuhan?" Jawabnya, "Dari informasi saksi-saksi, terutama dari internet." Saya kejar, "Apa tidak mungkin informasi itu direkayasa alias bohong?" Jawabnya, “Tidak mungkin.”

Dia begitu yakin, maka saya beri beberapa contoh betapa banyak orang yang lugu dan berniat baik, tapi kena tipu karena keluguannya. Para “mujahid” itu juga bisa tertipu, baginya yang penting berjuang di jalan Allah, padahal rekayasa dan penunggangan terjadi. Apalagi konflik di Timur Tengah malah unsur politiknya tinggi dan negara Barat serta Israel turut berperan, *proxy war*.

Saya memberitahunya, "Negara Timur Tengah yang berani dengan negara adidaya dan Israel, pasti akan digarap. Lihat Irak, Libya, dan Suriah. Kamu tahu apa tidak, karena Irak berani dengan AS dan Israel, lalu digarap dan dihancurkan?" Saya tambahi lagi, "Kamu tahu apa tidak, bahwa sebelumnya Suriah itu aman-aman saja dan makmur, serta tidak ada isu sektarian? Kamu tahu apa tidak, Suriah adalah penentang Israel?" Eh dia tidak tahu.
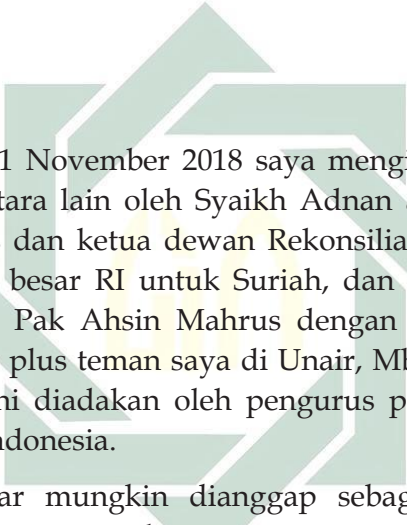
Saya tegasi, "Kamu kalau belum tahu mendalam, kemudian memosting, itu namanya bodoh. Masak mahasiswa bodoh. Makanya banyak baca dulu. Nanti setelah banyak baca, ayo dialog dengan saya, dan kalau saya kalah sama argumenmu, maka kamu boleh jihad ke Suriah sana. Dan silakan *mosting* dan *selfi* kalau perlu. Tapi kalau belum baca dan belum debat lagi dg saya, tapi kok mosting yang aneh aneh, awas!!! Kamu ini pengennya perang saja. Kamu kira jalan perang bisa memastikan bahwa Islam akan jaya? Kalau kamu dengan jiwa mudamu tetap pengen perang, latihan dulu dengan ikut Pagar Nusa agar pisik kuat. Kamu bisa adu jotos sampai nyonyor. Setelah itu baru latihan yang lainnya.”

Terakhir saya nasehati, "Tulisanmu di medsos dengan merendahkan Ahlussunnah itu secara tidak langsung merendahkan NU. Karena yang kamu pahami kalau Ahlussunnah itu ya hanya NU. Akhirnya dia sering bilang, "Ya, ya" alias *inggih* dengan apa yang saya ucapkan. Lalu saya pungkasi, "Aku tunggu kamu untuk debat lagi."

Poin penting yang bisa diambil adalah, banyak pemuda labil karena kurang ilmu, terus buka internet dan ketemu tentang isu-isu jihad, akhirnya dia bisa terpengaruh. Sebelumnya saya telah menjumpai model pemuda labil seperti dia. Alhamdulillah bisa sadar. []

JANGAN SURIAHKAN INDONESIA!

PADA MALAM 1 November 2018 saya mengisi seminar yang dihadiri antara lain oleh Syaikh Adnan al Afyouni (Mufti Damaskus dan ketua dewan Rekonsiliasi nasional Damaskus), duta besar RI untuk Suriah, dan duta besar Suriah untuk RI, Pak Ahsin Mahrus dengan moderator mantan presenter plus teman saya di Unair, Mbak Rahma Sarita. Seminar ini diadakan oleh pengurus pusat *Ikatan Alumni Syam* di Indonesia.

Judul seminar mungkin dianggap sebagian orang hiperbolik, atau justeru ada yang menganggap sudah cocok. Saya tidak fokus pada diksi judul. Di antara poin yang saya catat ada dua.

Pertama, pembicara menyampaikan bahwa Suriah adalah negeri yang hampir tidak ada orang fakirnya, sekolah gratis, rumah sakit gratis, orangnya ramah, kehidupan beragama rukun, baik antar Islam-kristen, maupun antara Sunni dengan Syiah. Namun kerukunan dan kedamaian akhirnya tersulut api perang selain karena konstelasi global, juga dihembuskan isu agama. Maka terjadilah apa

yang kemudian disesali oleh semua rakyat Suriah. Tapi sudah terlambat....!!!!

Kedua, saya menyampaikan bahwa kasus bendera di Indonesia jangan terus dibesar-besarkan. Karena jelas itu bendera Hizbut Tahrir. Lalu bagaimana klaim sebagian simpatisan Hizbut Tahrir yang ingin memperbesar dan mengobarkan masalah bendera dengan alasan bahwa kalau orang Hizbut Tahrir membawa Al Qur'an, lalu apakah bisa dikatakan itu Al Qur'an Hizbut Tahrir?

Tentu klaim simpatisan Hizbut Tahrir tersebut berangkat dari nalar yaang absurd dan *fallacy* (penyesatan dalam logika). Jelas Al Quran telah disepakati oleh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru mazhab, siapapun yang memegangnya, akan tetap dianggap Alquran umat Islam. Sedang masalah bendera penuh perbedaan; baik warna, tulisan, dan apalagi praktek di negara muslim malah beragam. Misalnya, bendera Indonesia berbeda dengan Malaysia, Suriah, Iraq, Iran, Arab Saudi dan lain-lain. Belum lagi masalah bendera itu diteropong dengan kajian takhrij hadis. Dengan demikian, klaim bahwa itu bendera umat Islam adalah naif, absurd, atau mungkin juga ada udang di balik batu?

Saat turun seminar ada yang mewawancarai saya. Lalu saya sampaikan bahwa Banser dan Ansor jumlahnya terbesar di seluruh Indonesia dibanding ormas sejenis. Jangan terus uji kesabarannya, kalau mau demo mereka pasti bisa lebih massif, tapi kita tidak ingin itu terjadi. Mari rawat NKRI yang merupakan hasil ijtihad para ulama. []

BUNGA API RADIKALISME

PADA 20 NOVEMBER 2019, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin mengadakan seminar nasional di gedung *Twin Tower*. Saya ditandem dengan Kabag Banops Densus 88, Kombespol R. Ahmad Nurwahid (sekarang sudah menjadi Brigjen Polisi dan menjabat sebagai direktur pencegahan BNPT). Hal yang menarik, sekalipun dari densus, tapi wacana beliau atas paham radikal sangat mumpuni. Hal ini tentu keseharian beliau menangani orang radikal ditambah pengalaman beliau yang pernah terpapar radikalisme saat menjadi polisi hingga ditahan puluhan hari karena menantang atasan.

Di antara yang saya sampaikan adalah menjadi orang yang santai tapi juga serius, lalu suka guyon seperti Ndan Nurwahid adalah di antara alat manjur menetralisir radikalisme. Tapi jangan dikira orang yang suka guyon tidak bisa tegas dan tega bila itu dibutuhkan. Buktinya densus juga turun tangan kalau terpaksa.

Saya juga menjelaskan radikalisme adalah bak bunga api. Bunga itu indah, sedang api adalah panas. Saat api

berbungkus bunga, maka akan menarik di kemasan, tapi berbahaya di akibat. Radikalisme yang mengatasnamakan agama juga begitu. Agama digunakan sebagai kemasan tapi faktanya berakibat buruk terhadap pola pikir dan tindakan generasi muda.

Perilaku *kebacut* dalam menilai perilaku keagamaan muslim lain semisal menilai syirik dan sejenisnya, dalam bentuk nenyuarakan di depan umum atau diviralkan, maka sangat mungkin mengarah kepada sikap intoleran dan menimbulkan kemarahan pihak yang distempel, dan hal ini berbahaya. Anda boleh tidak setuju dengan amaliah sesama muslim, dan itu adalah hak serta wajar, tapi kalau di*sounding*kan dan viral, apalagi itu sasarannya adalah muslim mayoritas, maka akan berimplikasi buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"MENJUAL" TUHAN DAN MEMBENTURKAN ALQURAN

Kuliah siang pada tanggal 13 Agustus 2019 bersama deputi V kantor staf kepresidenan dan direktur pencegahan BNPT dan rektorat. Poin-poin yang saya sampaikan di hadapan ribuan mahasiswa baru antara lain:

Pertama, jargon kembali ke Qur'an Hadis (QH) bisa menggiring orang menjadi radikal manakala mereka meninggalkan keilmuan yang membantu pemahaman terhadap QH. Apalagi hanya berbekal Alqur'an terjemahan. Memahami Islam perlu orang yang ahli.

Kedua, tentang hijrah. Saat ini orang bisa "menjual" Tuhan, "menjual" agama, termasuk "menjual" hijrah. Tidak hanya menjual, tapi bisa menyelewengkan. Hijrah bisa sebagai "penglaris" bisnis agar orang-orang pindah ke dagangannya. Bahkan hijrah juga diselewengkan dengan mengajak orang lain menentang NKRI lalu mau mendirikan negara Islam maupun khilafah dengan alasan hijrah. Hijrah dan ajaran Islam yang lain harus didayagunakan untuk kedamaian dan membangun negeri dalam bingkai NKRI.

Ketiga, kelompok radikal membenturkan antara Alqur'an dengan Pancasila dan membenturkan antara NKRI dengan khilafah. Intinya pembenturan dan pengkomparasian yang tidak komparatif ini harus dijawab secara logis sebagai kontra upaya cuci otak terhadap generasi milenial. []

JUMLAH *KHILAFERS* YANG IKUT "PEMILU"

SELAMA INI banyak yang bertanya termasuk bertanya ke jubir eks-HTI tentang jumlah anggotanya di seluruh Indonesia. Tentu jubir tidak akan menjawabnya. Saya mendapatkan data rahasia, makanya yang memberikan ke saya mewanti-wanti agar jangan disebutkan namanya). Data itu berupa hasil sejenis pemilu ala *khilafers* tahun 2013. Di situ tercantum nama-nama asli dan nama samaran atau nama alias atau nama gerakan (*ismul haraky*).

Data itu menjelaskan ada 151 tokoh *khilafers* yang ikut pemilu ala HTI. Individu yang berhak memilih adalah anggota senior alias *hizbiyyin* saja. Anggota *darisin* dan *halaqah* umum belum punya hak. 151 tokoh dipilih anggota *hizbiyyin* sebanyak 13.245 orang. Gambar yang latarnya warna hijau itu adalah yang terpilih untuk menjadi anggota majelis wilayah (AMW).

Biasanya setiap satu *hizbiyyin* minimal harus mempunyai satu kelompok *halaqah* yang umumnya berisi sekitar 5 individu. Kalau anggota *hizbiyyin* seluruh Indonesia sebanyak 13.245 orang, maka tinggal mengalikan 5 individu. Dari hasilnya akan diketahui perkiraan jumlah total simpatisan HTI. []

MENUNGGU GAGASAN KHILAFAH MODERN

SAYA SEBAGAI dosen pemikiran politik Islam di UINSA (Ushuluddin, Fisip dan Pasca) tentu menyambut atas munculnya gagasan khilafah modern yang disampaikan pengacara FPI (https://news.detik.com/berita/d-4649530/pemerintah-soroti-adart-pengacara-fpi-bicara-konsep-khilafah-modern). Soalnya, sependek ilmu saya dari buku-buku rujukan tentang politik Islam, belum saya jumpai uraian tentang gagasan tersebut.

Dengan demikian, kita menunggu hasil karya yang secara elaboratif mendedah gagasan khilafah modern. Tentu perlu ada argumen atau dalil teks suci yang memperkuat urgennya atau wajibnya adanya khilafah modern.

Gagasan khilafah modern akan lebih komprehensif apabila mengulas posisi NKRI. Semisal apakah NKRI akan dilebur dalam khilafah atau bagaiamana? Demikian pula, apa pula beda distingktif dan signifikan antara gagasan khilafah modern dengan OKI atau Pan Islamisme, atau mungkin juga Liga Arab.

Bagaimana menjelaskan secara rasional dan gamblang boleh juga secara syar'i bahwa FPI yang bukan partai politik

tapi mau menegakkan gagasan khilafah modern yang tentu sarat muatan politik.

Saat ini, di Indonesia, yang gencar menyuarakan penegakan khilafah tanpa tedeng aling-aling adalah *khilafers*. Bagaimana meyakinkan bahwa anggota eks-HTI mau ikut mencopot gagasan khilafah ala Taqiyuddin An Nabhani lalu berpindah memperjuangkan gagasan khilafah modern? []
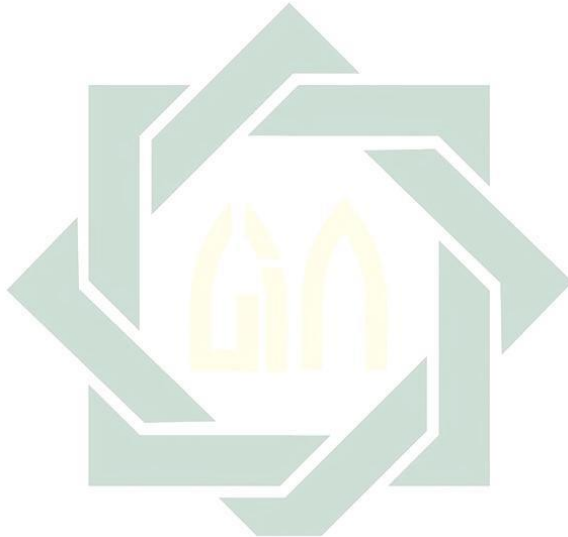
KHILAFAH DAN NKRI BERSYARIAH

KUMPULAN YANG disebut "Ijtima Ulama" (jangan tanya ulama yang mana dan kualifikasi keulamannya bagaimana karena saya tidak tahu) pada 5 Agustus 2019 mencetuskan beberapa gagasan di antaranya tentang khilafah dan NKRI Bersyariah (https://news.detik.com/berita/d-4653807/ijtimak-ulama-serukan-nkri-syariah-nasdem-itu-mengaburkan-pancasila). Komprehensifkah gagasannya? Karena gagasannya tidak diulas dalam bentuk buku, tapi tertuang dalam keputusan yang hanya dua lembar saja, itupun masih diselipi dengan bicara masalah kecurangan (entah kecurangan apa), maka tidak bisa dipotret secara mendalam baik dari alur argumentasinya maupun struktur dari apa yang disebut NKRI bersyariah, pun khilafah.

Barukah gagasannya?, mirip gagasan lama dengan bungkus baru. Gagasan lama karena pada awal kemerdekaan sudah pernah terjadi gagasan Piagam Jakarta (gen Y dan gen Z silakan bertanya ke *Google* apa itu Piagam Jakarta), lalu KH. Wachid Hasyim dan para pendiri bangsa lain dengan alasan tertentu akhirnya sepakat menghapusnya dengan pertimbangan kemaslahatan.

Selanjutnya beberapa tokoh bangsa dalam sidang Konstituante mencoba mengajukan asas Islam dengan tetap menjaga NKRI dan Pancasila. Ternyata sidang macet akhirnya tahun 1959 terjadilah Dekrit Presiden di antara isinya adalah pembubaran Dewan Konstituante dan Kembali ke UUD 1945. KH.Wahab Chasbullah selain menyetujui dekrit juga menilainya sebagai sikap bijak Soekarno. Lebih lanjut KH. Wahab menjelaskan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 hasil Dekrit Presiden, walau tidak tertulis. Terakhir, KH.Wahab Chasbullah dalam pidatonya menegaskan bahwa pembubaran Konstituante adalah lebih baik daripada nantinya menghasilkan undang-undang yang tidak sesuai dengan sila-sila umat Islam.

Terkait masalah di atas, KH. As'ad Said Ali menjelaskan kalaupun para ulama pernah mengusulkan dasar negara Islam, bukan berarti hendak menyingkirkan Pancasila, tetapi hanya ingin memberikan kerangka dengan menegaskan Pancasila sebagai sebuah konsep yang Islami. Sehingga sebagai jalan tengah ketika mengalami kebuntuan dalam menetapkan dasar negara pada masa Konstituante, NU mengusulkan jalan tengah yaitu Islam Pancasila, yang sekaligus mencegah upaya PKI mengkomuniskan Pancasila. Tetapi ketika telah mendapatkan kepastian bahwa aspirasi Islam tetap diperhatikan maka NU-lah yang mempelopori kembali ke UUD 1945 serta mengukuhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara.

Walhasil ide NKRI bersyariah dengan tetap menjaga NKRI dan Pancasila hanya *casing* baru dan tentu akan mengulang sejarah yang seharusnya kita sadari akan kegagalannya dan madharatnya. Karena saat ini hampir dapat dipastikan NU dan partai yang ada warga NU
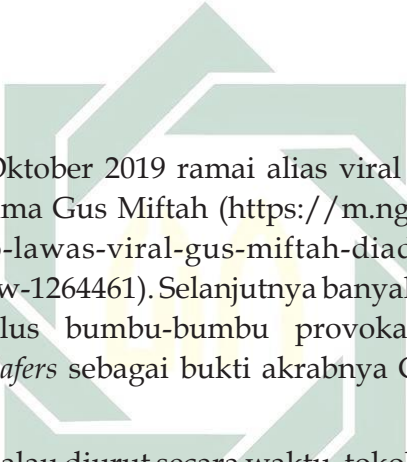
akan menolak gagasan NKRI bersyariah, belum lagi Muhammadiyah yang kemungkinan juga akan menolak.

Lalu kok ada gagasan khilafah? khilafah modern? Boleh jadi pencantuman khilafah untuk menarik simpati para *khilafers* agar ikut sebarisan, dan tentu tidak bisa sehati (karena *khilafers* punya gagasan khilafah sendiri). []
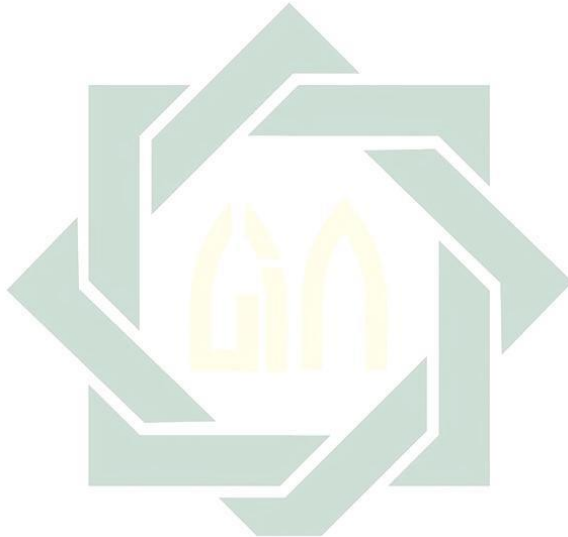
ONCE UPON A TIME IN JOMBANG

PADA BULAN Oktober 2019 ramai alias viral foto lawas Felix Siauw bersama Gus Miftah (https://m.ngopibareng.id/timeline/foto-lawas-viral-gus-miftah-diadu-domba-dengan-felix-siauw-1264461). Selanjutnya banyak komentar yang muncul plus bumbu-bumbu provokatif hingga dikemas oleh *khilafers* sebagai bukti akrabnya Gus Miftah kepada Felix.

Sebenarnya kalau diurut secara waktu, tokoh HTI yang berkunjung ke kiai NU dilakukan sejak dulu kala, saya saat masih di Hizbut Tahrir juga melakukan sebagai bagian dari tim yang menghubungi para tokoh termasuk kiai. Saya masih ingat bersama tokoh *khilafers* yang sampai sekarang masih di dalamnya yakni Mas Irwan Saifullah dan Mas Ihsan Abdul Djalil mengunjungi tokoh di Lamongan dan Pasuruan.

Bukti lain banyak tokoh *khilafers* mengunjungi para kiai NU bisa dilihat semisal dalam foto sampul belakang majalah lawas milik *khilafers*, al-Wa'ie di saat mereka

berkunjung ke Tebuireng, KH. Yusuf Hasyim (2005), berkunjung ke Tambakberas, kepada pengurus yayasan (2006), ke Tebuireng, Gus Sholah (2006), bahkan juga ke Gus Dur (2005).

Lalu, tujuan mereka ke kiai NU apa? Ini urutannya, kalau bisa diajak masuk HT, atau kalau tidak mau ikut HTI, harapannya para kiai bisa melindungi, minimal tidak menyerang gagasan HTI (padahal HTI tukang menyerang gagasan NU, bahkan kiai juga diserang). Tujuan penting lainnya adalah untuk promosi ke khalayak ramai *wabilkhusus* warga NU bahwa HTI dekat dengan para kiai. []
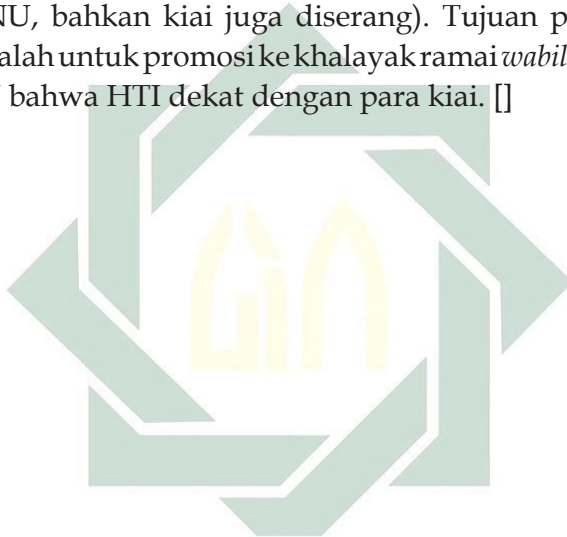
BENER TAPI ORA PENER DI KURIKULUM KEMENAG

PADA AKHIR Juli 2019, saya dihubungi beberapa kiai dan bunyai, terkait buku fiqih pendekatan saintifik kurikulum 2013, maka saya jawab singkat. Memuat kajian khilafah itu tidak salah, tapi tidak tepat (*bener, tapi ora pener*). Ada beberapa alasan? Seharusnya membaca situasi saat ini yang mana masalah khilafah sedang jadi bahasan dan mengarah kepada ISIS dan HTI.

Kurang kontekstualisasi kajiannya dan kurang strategis dalam penyajiannya. Babnya langsung tentang khilafah. Padahal bisa diganti dengan bab kepemimpinan dalam Islam. Kalau tetap menggunakan bab khalifah atau imamah, harus ada narasi bahwa dalam sejarah Islam ada ragam nomenklatur kepemimpinan seperti khilafah dan imamah. Selanjutnya juga dielaskan bahwa NKRI juga menjadi bagian ijtihad para ulama yang cocok untuk bangsa Indonesia. Sayangnya, fiqih di atas malah menjelaskan urutan khilafah pasca Nabi hingga Turki Usmani, mirip kayak narasi yang dipegang Hizbut Tahrir.

Dalam konteks sekarang, membahas masalah fiqih kontemporer lebih urgen tinimbang membahas masalah khilafah (tentu ini bukan dalam arti anti terhadap kajian khilafah). Bisa dimisalkan membahas masalah bab perbudakan atau bab poligami tidak terlalu urgen dibanding membahas masalah fiqh *bullying*, fiqih lalu lintas, fiqih korupsi, fiqih mirasantika dan lain-lain.

Dalam fiqih di atas, kajian bab khilafah ada 28 halaman (mulai pencantuman ayat, kompetensi, peta konsep, gambar dan narasi tentang khilafah dan derivasinya). Bandingkan dalam kitab kuning, pembahasan tentang imamah atau khilafah sering menggunakan istilah *imam a'dham* atau *imamah 'udzma* daripada istilah khalifah atau khilafah. Selain itu, dalam kitab kuning, kajian tentang *imam a'dham* atau *imamat 'udzma* dikupas secara sangat singkat.

Semisal, Imam Zakariyya al Ansari (823 H 926 H) dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Wahhab* yang berjumlah dua jilid, kajian *al-imam aI-a' dham* sebanyak setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah*. Imam Zakariyya al-Ansari (823 H-926 H) dalam kitabnya yang lain yang berjudul *Asna al-Matalib Sharh Raud aI-Talib* yang berjumlah sembilan jilid (tiap jilid ratusan halaman), kajian *al-imamat ul-'udzma* sebanyak empat setengah lembar saja dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab aI-diyah*. Imam al-Ramli (919 H-1004 H) dalam kitabnya yang berjudul *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh aI-Minhaj* yang berjumlah enam jilid (tiap jilid ratusan halaman), kajian *al-imam al-a'dham* sebanyak empat lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah*. []

HIZBIYYIN FRIKSI DENGAN AYAH, AKHIRNYA MASUK LESBUMI

KISAH INI saya tulis agar bisa menjadi inspirasi bagi yang masih ikut gerakan khilafah supaya sadar. Suatu hari pada 22 Juli 2019, saat saya berjemur matahari datanglah pria bersepeda motor ke gubuk saya. Namanya Mas Roni Fauzan dari Kenjeran-Surabaya.

Di masa remaja, lingkungan pergaulannya adalah anak-anak IPNU. Mulai kenal kenal Hizbut Tahrir sejak kuliah di UPN. Tahun 2000 dia menjadi *daris* (tahap sebelum menjadi *hizbiyyin*). Saat *daris*, dia aktif mengikuti kegiatan Hizbut Tahrir sehingga pada tahun 2001 disumpah (*qosam*) menjadi *hizbiyyin* dan diberi nama *haroki* menjadi Zaini Azhar.

Salah satu yang diingat adalah saat bekerja di sebuah radio terkenal di Surabaya. Waktu itu dia memasukkan tokoh-tokoh HTI seperti dr. Usman, Rahmat S. Labib, Fikri Arsyad, Faqih Syarif Hasyim, dan lain-lain untuk acara keagamaan di radio itu di bulan Ramadhan. Hal ini secara tidak langsung akhirnya menggeser beberapa da'i dari LDNU yang biasa mengisi ceramah di radio tersebut. Saat ini, bila ingat kisah itu, dia merasa sangat bersalah.

Kisah yang perlu dijabarkan di sini adalah motif yang menjadi sebab dia keluar dari HTI. Saat menjadi anggota HTI, dia justeru sering friksi dengan orang tua. Di antara friksi yang dia ingat seperti:

Pertama, masalah *ru'yatul hilal* saat lebaran. Seperti diketahui umum bahwa HTI sering beda dengan pemerintah atau ormas lain saat penentuan lebaran dengan alasan *ru'yah global*. Saat lebaran itu, beberapa kali berdebat dengan ayah dan ibunya yang Nahdliyin. Dia berusaha "memaksakan" pendapatnya. Serta-merta ayah-ibunya menolaknya.

Kedua, suatu saat ayahnya menyuruh dia agar membukakan rekening ke Bank, karena saat itu tangan ayahnya sakit. Tapi dia bersikukuh menolak pergi ke bank, dengan alasan transaksi di bank adalah riba. Hal seperti itu menjadikan sang ayah muram dan sangat kecewa.

Ketiga, selepas ayahnya meninggal pada tahun 2001, HTI yang sebelumnya mengharamkan demonstrasi sebagai aktivitas yang jamak dilakukan dalam sistem demokrasi yang dicap kufur oleh mereka, akhirnya "tergoda" juga mengadakan acara-acara demo (mereka mengistilahkan dengan *masiroh*), terutama setelah peristiwa 9/11/2001 di gedung WTC New York. Dalam acara-acara demo tersebut, *musyrif* (ustadz HTI) dan beberapa aktivis HTI kerap kali meminjam mobilnya. Suatu saat, selesai suatu acara *masiroh,* mobil dibawa pulang dalam kondisi kotor. Ibunya jengkel melihat hal itu karena mobil peninggalan ayahnya dipinjam, tapi dikembalikan dalam kondisi kotor. Dia pun ganti mereaksi (menjawab) ibunya atas kejengkelannya, karena baginya *masiroh* adalah perjuangan. Hingga suatu

saat ibunya bercerita bahwa sebelum ayahnya meninggal dunia masih sangat memikirkan sikap dan perbuatannya yang dianggap terlalu keras dengan ajaran yang diikutinya di HTI. Ibunya juga tak jarang menasehatinya dan berkata, "Ibu tidak akan berhenti untuk terus mendoakanmu, agar kembali seperti sediakala". Dari cerita ibunya itulah akhirnya menjadikan dia merenung. Memang merenung adalah salah satu kunci yang akhirnya menjadikannya "sadar", maka merenunglah wahai penggandrung khilafah!

Semenjak merenung itulah, dia tidak disiplin lagi mengikuti *halaqah* yang biasanya diadakan seminggu dua kali. Hingga suatu saat sang *musyrif* yang bernama Sirojuddin menelponnya dan bertanya tentang tidak aktifnya. Dia menjawab, bahwa kebetulan saat itu tidak bisa mengikuti *halaqah* karena sakit. Tapi sang *musyrif* tidak percaya. Maka spontan saja dia dengan kondisi sakit, nekad mendatangi sang *musyrif*. Dengan akumulasi kekesalan di atas, ditambahi ketidakpercayaan *musyrif* atas sakitnya, maka dia langsung bilang, "Sekarang juga saya keluar dari HTI..!"

Saat ini dia menjadi anggota Lesbumi PCNU Surabaya sekaligus juga kontributor di Santrionline. Tak lupa acapkali dia menulis status di akun medsosnya menentang beberapa kejanggalan dari pemahaman Hizbut Tahrir. Katanya, karena berkat doa dari orang tua sekaligus kembali aktif mengikuti kegiatan sebagai Nahdliyin semoga bisa menghapus rasa bersalahnya di masa lalu, yakni pernah menjadi anggota HTI. []

KARENA DOSA BESAR, *HIZBIYYIN* KELUAR

PADA MALAM tanggal 21 Juli 2019, saya didatangi tamu yang ternyata mantan *khilafers* bernama Mas Syaiful Wijayanto. Dia mulai ikut *halaqah* umum pada tahun 2008 tepatnya di masa akhir SMA di sebuah SMA Negeri di Jombang. Dalam waktu 1 bulan mengikuti *halaqah* umum, ia pun mantap untuk menjadi bagian dari HTI dengan menaikkan statusnya dari *halaqah* umum menjadi *darisin*.

Proses *halaqah* umum tersebut ia jalani di bawah bimbingan seorang *musyrif* (alm) Bapak B seorang Guru di MAN Kab. Mojokerto yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Singkat cerita, ia melanjutkan kuliah di UIN Maliki Malang jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekitar tahun 2011 atau 2012 (ia lupa-lupa ingat tahun persisnya) ia pun mantap untuk diambil sumpah setianya (*qosam*) sebagai syarat menjadi anggota HTI yang kemudian dikenal dengan istilah *hizbiyyin*.

Pengalamannya menjadi pengelola *maktab* HTI (sejenis markas) menjadikannya banyak mendapat informasi

penting seluk beluk gerakan dan aktifitas para tokohnya yang singgah di Malang. Suatu saat ia ditelpon oleh salah satu petinggi HTI Malang yang juga berprofesi sebagai Guru Agama Islam di sebuah SMAN di Malang yang berstatus ASN untuk menyiapkan kebersihan *maktab* karena akan ada orang DPP HTI yang ditugaskan mengontak militer di Malang untuk tujuan *thalabun nushrah* (meminta dukungan).

Tahun 2011, ketika liburan semester ia pulang kampung dan menghadiri pertemuan salah satu tokoh Hizbut Tahrir dari Timur Tengah di PP Al-Mimbar Sambong Jombang. Tokoh itu adalah Ahmad Al Qossos penulis kitab *Usus al Nahdlah al Rasyidah*.

Kenapa Dia Keluar?

Tahun 2013, setelah lulus kuliah ia memutuskan untuk pulang kampung dan berpamitan kepada pengurus HTI Malang. Waktu itu tidak terbetik sedikitpun bahwa niatnya pulang meninggalkan Malang adalah untuk berhenti dari HTI. Justru ia berpikiran ingin melebarkan sayap “dakwah” HTI di kampungnya.

Setelah kepindahannya ke Jombang nampaknya ia merasakan suasana yang berbeda sama sekali dengan suasana kampus. Interaksinya dengan masyarakat membuka cara berpikirnya. Ia pun mulai menyadari ada yang salah dengan aktivitasnya selama ini di HTI. Melalui perenungan yang mendalam ia pun berkali-kali shalat istikharah. Semakin hari keyakinannya untuk meninggalkan HTI semakin mantap. Ia pun memutuskan untuk keluar dari HTI.

Hingga suatu hari *mas'ul* (ketua) HTI Jombang wilayah utara Brantas (Ploso, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan) baru menghubunginya via sms untuk diajak melanjutkan *halaqah*nya yang di Malang sebelumnya. Namun ia menolak dan menyampaikan keinginannya untuk berhenti dari HTI.

Hingga suatu malam *mas'ul* HTI tersebut datang ke rumahnya, namun ia sudah bulat untuk menolak melanjutkan *halaqah*. Hingga suatu hari berikutnya ia diajak bertemu dengan pimpinan DPD II HTI Jombang bernama AF yang waktu itu adalah Guru SMAN di sebuah kecamatan di Jombang. Pertemuan ketiganya dilakukan di masjid Jami' Bedah Lawak Kecamatan Tembelang.

Setelah AF menanyai alasan keluar, maka Mas Syaiful pun mengajukan 10 poin alasan keluarnya terdiri dari 9 poin terkait pemikiran HTI dan 1 poin tentang fakta keburukan perilaku oknum *syabab-syabab* HTI Malang. Dari 10 poin tersebut, hanya 1 poin yang ditanggapi, sedangkan 9 poin tentang pemikiran HTI itu hanya ditanggapi dengan kalimat "ya untuk 9 poin ini perlu kita diskusikan di lain waktu"

Ia pun menunggu tanggapan *mas'ul* AF tentang 9 poin tersebut, namun waktu berjalan tidak ada realisasi janji tersebut, yang ada malah ia diminta ikut dulu saja *halaqah* dan rapat-rapat yang diadakan HTI Jombang. Namun ia menolak karena ia sudah hafal dengan siasat syabab-syabab HTI.

Adakah kecaman atau olok-olok setelah dia keluar? Pasti ada, semisal, seorang temannya yang dari Madura dan juga *khilafers* menyindir bahwa keluarnya karena sudah nyaman masuk PNS. Aneh kan? Padahal banyak *khilafers*

yang jadi PNS/ASN hingga saat ini. Terlebih lagi sejatinya dia keluar tahun 2013 dan diterima menjadi PNS sebagai guru SMP tahun 2015

Lalu apa alasan dia keluar? Yang pokok adalah adanya doktrin dalam kitabnya bahwa sesiapa yang tidak berjuang menegakkan khilafah, maka baginya dosa besar yang akan diterima. Dia merenungi hal itu sambil bertanya kepada diri sendiri, apakah orangtuanya dan keluarganya juga akan menanggung dosa besar? Hal ini yang mendorong dia berani mempertimbangkan untuk menolak doktrin dosa besar, ditambah ada acara di TV 9 yang waktu itu narasumbernya salah seorang Habaib dari Madinah menyatakan tidak ada dosa besar kalau tidak menegakkan sistem khilafah. Maka dia dengan mantap berani keluar dari HTI.

Namun yang perlu dicermati juga, adanya doktrin dosa besar ini pula yang membuat dia awalnya gamang dan tidak berani keluar. Banyak teman-temannya yang juga kemakan doktrin itu sehingga terbelenggu dalam dekapan atau cengkraman ormas yang sudah dilarang ini tanpa berani keluar. Saat ini dia berjuang bersama NU dengan mengikuti kegiatan NU di kampungnya. Dia bertekad mengisi NKRI dengan ajaran Islam yang rahmah dan ramah. []

BAGI *KHILAFERS*, ISLAM NUSANTARA ADALAH RACUN

SUATU SAAT saya ditanya oleh aktivis HTI sebelum dibubarkan, kenapa saya tidak suka sekali alias benci sama HTI, terbukti saya banyak mengkritik HTI? *Khilafers* seperti ini kata orang Jawa, "*Gak iso ndelok gitoke dewe*" alias tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Dalam konteks *khilafers*, statemen dan sikap buruk kelompoknya terhadap pihak lain tidak pernah direnungkan apalagi dikoreksi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasa yang paling benar dan paling Islami serta pejuang Islam. Padahal yang kita lakukan hanya bertahan atas serangan mereka terhadap NU juga terhadap NKRI yang mau diambrukkan dan diganti dengan khilafah.

Lalu apa contoh statemen dan sikap buruk *khilafers* terhadap gagasan NU? berikut ringkasan tulisan mereka sebelum situs resminya ditutup, "Konsep Islam Nusantara sering dinisbatkan kepada Walisongo. Namun, itu hanya kedok untuk menutupi wajah sekularnya. Tampak dari luar indah, padahal faktanya memasukkan nilai-nilai Barat seperti moderat, inklusif dan pluralis yang dihiasi dengan kata damai dan toleran. Ini sangat kental dengan aroma

liberal. Itu racun peradaban Barat yang sengaja disuntikan pada umat Islam. Semangat Islam Indonesia? juga lahir dari sentimen nasionalisme yang jelas berbahaya. Rasulullah Saw. menyebut sentimen nasionalisme itu sebagai barang yang busuk. Wacana Islam Indonesia? atau Islam Nusantara? secara politik dimaksudkan untuk menolak negara Khilafah." (http://hizbut-tahrir.or.id/2015/07/01/hanya-satu-islam/).

Selain HTI, FPI juga mengkritik Islam Nusantara. FPI mengkritik Islam nusantara: https://www.eramuslim.com/berita/analisa/habib-rizieq-inilah-kesesatan-islam-nusantara.htm#.X12eEosxXIU. Kelompok Persis juga sama mengkritik Islam Nusantara: https://www.portal-islam.id/2015/06/ketum-persis-islam-nusantara-bisa.html. Mungkin ada yang bertanya, kenapa HTI tidak mengkritik Islam terpadu dan Islam berkemajuan? []

FAHMI AMHAR HERAN DENGAN ISLAM NUSANTARA

KALI INI Fahmi Amhar (FA) heran dengan Islam Nusantara. Saya AR (Ainur Rofiq Al Amin) malah *geleng-geleng kaki* dengan keheranan FA. Status ini saya buat karena ada famili yang *japri* untuk bertanya kepada saya.

FA: Katanya Islam Nusantara itu lebih asli dari Islam Arab, anehnya penganjurnya membanggakan diri punya sanad ilmu yang jelas, karena pernah sekolah di dunia Arab.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Katanya Islam Nusantara itu lebih murni dari Islam Arab, anehnya penganjurnya bangga dengan kebolehannya membaca kitab kuning yang berbahasa Arab, bukan kitab asli Nusantara yang berbahasa Jawa Kuno, Kawi atau Sansekerta. Eh Sansekerta itu dari India bukan?).

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Katanya Islam Nusantara itu lebih sejati dari Islam Arab, anehnya sholat mereka berkiblat ke Arab dan masih berbahasa Arab, hajinya masih ke Arab, dan kalau mati masih ditahlili dengan bacaan berbahasa Arab.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Katanya, dakwah kita itu adalah menusantarakan Islam, dan bukan mengislamkan Nusantara, anehnya mereka tidak begitu nyaring ingin menusantarakan Freeport, menusantarakan (lagi) Indosat, atau bahkan menusantarakan demokrasi.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Katanya Islam Arab itu dulu menjajah, anehnya penjajah nusantara itu tidak pernah orang Arab, tetapi justru orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Di Indonesia itu warga Hindu Nusantara tak pernah menjelek-njelekkan Hindu India, Katholik Nusantara tak pernah menjelek-njelekkan Katholik Vatikan, bahkan Syiah Nusantara tak pernah menjelek-jelekkan Syiah Iran; anehnya yang mengaku Islam Nusantara kok menjelek-jelekkan Islam Arab.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Islam Nusantara itu ramah, tidak mudah marah, anehnya mudah sekali mempersekusi ustadz yang tidak sepaham, bahkan membubarkan pengajiannya.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Islam Nusantara itu seperti yang dicontohkan Wali Songo yang menghargai tradisi lokal, anehnya, delapan dari sembilan anggota Wali Songo itu memakai jubah dan surban yang kearab-araban.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

FA: Islam Nusantara itu mengedepankan rahmah dan perdamaian, anehnya, KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 memberi fatwa jihad melawan tentara sekutu, bukan salam perdamaian.

AR: Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?

Ternyata 9 keheranan Fahmi Amhar pecinta Hizbut Tahrir ini hanya perlu satu kalimat jawaban, yakni "Apa konsep yang anda pahami tentang Islam Nusantara, Kang?" Dia tidak paham tentang konsep Islam nusantara, tapi dia membuat khayalan sendiri tentang Islam nusantara. Hemat saya, bagi yang tidak setuju dengan wacana Islam nusantara akan lebih bijak bila membaca buku-buku itu tentangnya. Sekedar contoh buku tentang Islam nusantara (sesuai koleksi saya) antara lain:

1. *Islam Nusantara: Meluruskan Kesalahpahaman* penulis KH. Abdurrahman Wahid dkk; terbitan LP Ma'arif NU 2015.

2. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan* penulis Azyumardi Azra dkk; terbitan Mizan 2015.
3. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin* penulis KH. Said Aqil Siroj, terbitan LTNU 2015.
4. *Meneguhkan Islam Nusantara* penulis A. Musthofa Haroen, terbitan Khalista 2015.
5. *Nasionalisme Islam Nusantara* penulis KH. Sholahuddin Wahid dkk; terbitan Kompas 2015.
6. *Ijtihad Islam Nusantara* penulis Prof. Dr. H. Abd A'la, terbitan LTNU Jatim 2018.
7. *Masterpiece Islam Nusantara* penulis Zainul Milal Bizawie terbitan Pustaka Compass 2016. []

SAYA "DIBUNGKAM" *KHILAFERS*

SAYA MENDAPATKAN informasi dari Kang Biyan alumni Tambakberas. Intinya ada *khilafers* yang membeli buku saya *Mematahkan Argumen HTI.* Lalu dia berkomentar bahwa buku saya tidak berbobot isinya. Sayangnya dia tidak menyebutkan poin mana yang tidak berbobot dan bagaimana bentuk kritikannya bahwa buku saya tidak berbobot.

Namun saya sangat paham tindak tanduk *khilafers* kalau tidak bisa menjawab atas kritikan saya, biasanya yang dilakukan adalah pencelaan tanpa alasan. Nampaknya cara itu semakin berguna bagi bawahan atau pengikut yang masih muda bila yang membuat statemen adalah tokoh eks-HTI. Kayak dulu ada mantan ketua DPP eks-HTI yang mengkritik buku saya *Membongkar Proyek Khilafah HTI* tanpa diikuti bantahan atas kritikan saya terhadap bangunan Khilafah Hizbut Tahrir. Dia malah membuat statemen di luar pokok kajian tentang khilafah. Demikian juga jubir eks-HTI, Ismail Yusanto pernah melabeli saya sebagai "telmi" (telat mikir) tanpa membantah argumen saya.

Apa yang ada di benak kita, kalau tokoh penting *khilafers* saja saat tidak bisa menjawab kritikan gayanya seperti di atas, apalagi bawahan yang masih yunior. Mari kembali ke pangkuan NKRI. []
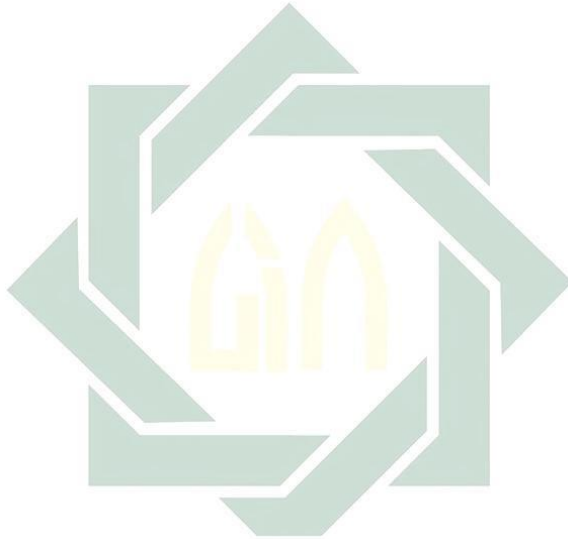
MENUHANKAN KIAI

ADA BUKU terbitan 2019 karya *khilafers* yang judulnya langsung memakai diksi kiai, *Ketika Kiai Dipertuhankan*. Beberapa tahun sebelumnya seseorang bernama Mahrus Ali yang mengaku mantan kiai NU dan beralih ke kelompok tukang stempel syirik dan bid'ah menulis buku *Membongkar Kesesesatan Kiai-Kiai Pembela Bid'ah Hasanah*.

Buku *khilafers*, Irkham Fahmi al Anjatani ini, saya baca sinopsisnya saja. Judul yang dipilih dengan diksi "kiai" tentu bisa dirasa nuansa dan arahnya ke komunitas NU. Saat ini, kalau disebut seorang kiai tentu mengacu ke ulama NU. Namun yang tidak disadari si penulis, ternyata setelah gerak penyebaran gagasan khilafahnya terbatasi karena dibubarkan, para *khilafers* saat ini malah banyak bermetmorfosis dengan menempeli para ustadnya menjadi kiai, termasuk kepada pucuk pimpinannya di Indonesia yang di FB-nya ditempeli gelar KH.

Kembali ke judul buku di atas, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah kiai yang dipertuhankan di NU? Siapa kiai yang dianggap tidak pernah salah? Siapakah kiai yang disembah? Pun siapakah individu yang menuhankan dan

menyembah kiai di NU? Pasti si penulis buku ini tidak akan bisa menyebutkan.

Kalau taat kepada kiai lalu dianggap menuhankan atau menyembah, pasti nalar si penuduh sangat dangkal. Selain dangkal juga tidak melihat "punggungnya" sendiri, yakni mereka tidak merasa bahwa kelompok ini sangat taat kepada *musyrif*nya (ustadz di HTI), apalagi kepada ketua HTI. Apakah seperti ini bisa disebut mereka menuhankan *musyrif* atau menuhankan ketua HTI? Hal yang pasti, mereka sangat mendewakan khilafah, sekali lagi, mereka sangat mendewakan khilafah. Sekedar bertanya, "Apakah mereka menyembah khilafah"? []
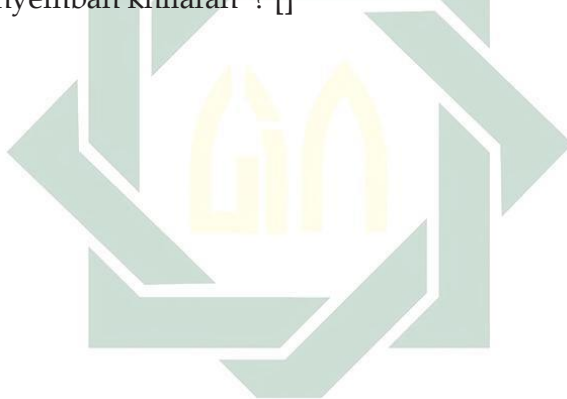
KHILAFAH DALAM *BAHTSUL MASAIL*

SAYA MEMBUKA majalah NU Jombang, *Nahdlah* edisi tahun 2008 (kebetulan saat itu saya sebagai pimpinan redaksinya). Ternyata ada kolom yang memuat hasil Bahtsul Masail (BM) saat Konferwil PWNU Jatim pada November 2007. Di BM ada pertanyaan tentang dalil perintah agar mendirikan khilafah. Jawaban tim BM, tidak ada dalil nash, keberadaan masalah khilafah adalah ijtihadiyah.

Dengan demikian, bila meminjam nalar dalam kitab paling otoritatif milik Hizbut Tahrir, yakni *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, yang di dalamnya dijelaskan tidak ada mahkamah banding maupun kasasi karena keputusan hakim tidak dapat digugurkan oleh hakim lain. Selanjutnya kitab *Ajhizat* ini mengutip kaedah fiqih الاجتهاد لا ينقض بمثله . Dalam kitab *Al Asybah Wan Nazair* menggunakan redaksi الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. Arti dari kaedah di atas adalah, hasil ijtihad tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain.

Dengan demikian, NKRI adalah hasil ijtihad para ulama Indonesia. Demikian pula, ide khilafah ala Hizbut Tahrir (kalau bisa dianggap ijtihad) adalah ijtihadnya

Taqiyuddin An Nabhani. Walhasil gagasan sistem politik khilafah ala HT tidak bisa menggugurkan sistem politik di NKRI yang dirumuskan sebagai *darul ahdi* (negara hasil kesepakatan) yang bercita cita menuju *darussalam* (negara yang aman, damai, sentosa).

NKRI kita rawat, tidak usah ada upaya mau mendirikan khilafah di Indonesia. Fakta di Suriah, Libya dan lain-lain membuktikan bahwa kehadiran para penyokong HT justeru berkontribusi membuat kekisruhan yang hingga tahun 2020 saat ini masih belum berakhir. []
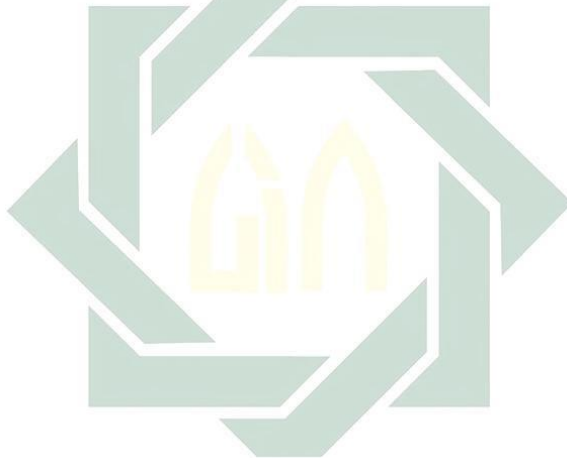
KHALIFAH AHMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR

SAYA PERNAH diskusi saat masih kuliah di UNAIR dengan tokoh Ahmadiyah yang namanya (semoga tidak salah ingat), Bapak Muhammad. Rumahnya di daerah Bubutan Surabaya. Lalu saya diberi banyak buku tentang Ahmadiyah yang sampai sekarang masih saya simpan.

Saya tidak akan bicara isi buku secara keseluruhan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa *al-masih* dan *al-mahdi* dalam pandangan Ahmadiyah menyatu dalam diri Mirza Ghulam Ahmad (tentu ini bisa dikritik, apalagi kalau mengaku sebagai Nabi). Selanjutnya pasca Ghulam Ahmad, kepemimpinannya diteruskan para penggantinya yang disebut khalifah.

Saya jadi berfikir agak nakal, dulu yang sangat getol agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah adalah HTI. Jejak digital mungkin masih ada, dan yang pasti di majalah Al-Waie milik HTI banyak edisi membahas keinginan HTI agar Ahmadiyah dibubarkan. Lalu kenapa HTI getol agar Ahmadiyah dilarang? Sangat mungkin karena di Ahmadiyah ada lembaga khilafah yang hal ini menyaingi

gagasan khilafah HTI. Bagi *khilafers*, gagasan tentang khalifah non-Hizbut Tahrir adalah harus ditolak. Tapi jangan sekali kali berani menolak ide khilafah HTI, pasti akan dicap menentang ajaran Islam. []

DI SURIAH PUN HIZBUT TAHRIR TURUT BERPERANG

HIZBUT TAHRIR Suriah tidak hanya berkoar membakar massa, tapi para aktivisnya dengan mengatasnamakan jihad ikut bertempur bersama kelompok anti Assad (termasuk Bahrun Naim, pecinta khilafah yang awalnya masuk HTI, kemudian pergi ke Suriah). Dalam pertempuran itu, ada aktivis Hizbut Tahrir yang meninggal. Oleh situs HTI yang telah ditutup disebut Syahid baca di:

(https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/21/syahidnya-seorang-pejuang-khilafah-di-as-shaam/).

Alasan keterlibatan anggota Hizbut Tahrir dalam berperang di Suriah dibuat sedemikian rupa oleh para tokoh HTI. Mereka mencoba membenarkan perilaku para simpatisan HT di Suriah. Alasan yang terkesan dibuat-buat ini sudah saya bantah dalam buku *Mematahkan Argumen HTI* terbitan Wahid Foundation 2019.

Bila di tahun 2020 ini, kita mengingat apa yang diperbuat oleh banyak tokoh HTI dalam melakukan agitasi ke seluruh Indonesia terhadap Suriah akan terasa

lucu dan menyebalkan. Contohnya, saat itu menurut tokoh HTI, rezim Assad harus diganti dengan khilafah dengan diangkatnya seorang khalifah. Mereka sangat yakin Assad akan tumbang, dan khilafah akan tegak di bumi Suriah (https://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/10/khilafah-akan-segera-tegak-di-suriah-meski-barat-hendak-mencegahnya/).

Namun, keyakinan bahwa Assad akan tumbang dan khilafah segera tegak, ternyata tidak terbukti. Ketidakberhasilan ini menjadikan HT marah-marah dan dicarilah kambing hitam, menyalahkan sana-sini (persis kayak kasus Libya akhirnya menyalahkan Barat, padahal memang sejak awal sebagian negara Barat ikut menumbangkan Khaddafi). Tokoh-tokoh HTI menyalahkan negara-negara di sekitar Suriah karena menurutnya telah terjadi penghianatan oleh para penguasa muslim seperti dalam situs di bawah ini:

1. http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/02/hari-hari-yang-kelam-renungan-atas-pengkhianatan-revolusi-syam-yang-diberkati/
2. https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/24/pengkhianatan-turki-terhadap-revolusi-syam/
3. http://hizbut-tahrir.or.id/2015/12/24/pengkhianatan-penguasa-muslim-dari-syam-hingga-timur-jauh-atas-darah-dan-kehormatan-umat-islam/ []

HTI DAN HT LIBYA TIDAK MAU BELAJAR

DALAM SITUS resmi HTI (sebelum ditutup), terdapat gambar dimana HTI menyerukan dengan membakar semangat massa agar menumbangkan Khaddafi. Padahal dia salah satu pemimpin yang berani dengan Amerika dan mampu membuat negaranya makmur. Baca indikasi kemakmuran ini di situs: https://www.liputan6.com/global/read/3903488/listrik-gratis-hingga-bbm-murah-libya-di-era-moammar-khadafi-fakta-atau.

Tapi saat itu HTI justeru menyerukan agar Khaddafi ditumbangkan. Selanjutnya setelah tumbang, Hizbut Tahrir Libya pun ikut mengucapkan selamat atas tumbangnya Khaddafi (http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/leaflet/libya/1007.html).
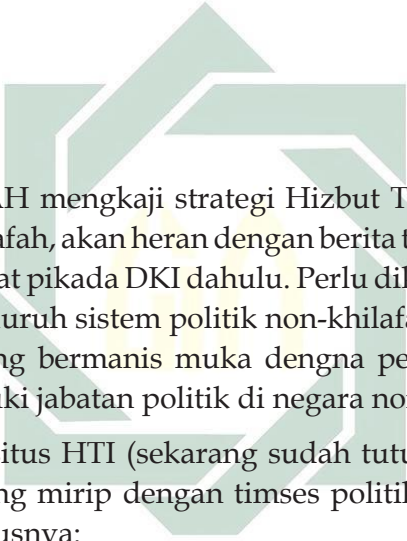
Namun warga Libya setelah enam tahun menggulingkan Khaddafi malah akhirnya menyesal (https://tirto.id/enam-tahun-revolusi-libya-warga-menyesal-gulingkan-gaddafi-cjjX). Lalu bagaimana sikap *khilafers* Indonesia? majalah *khilafers*, Al-Wa'ie yang terbit

saat Ramadhan di tahun 2019 malah bilang perang antar antek Barat hancurkan Libya. Tampaknya sekarang baru sadar, artinya model berpikirnya adalah "*cekak*" dan tidak mendalam. Semoga orang HTI bisa sadar atas pelajaran dari kekacauan di Timur Tengah dan tidak berupaya melakukan provokasi di Indonesia. Mari para *khilafers* kita bangun NKRI, kalau ada kekurangan, justru diperbaiki, bukan malah ingin dihancurkan dan diganti dengan khilafah. []

ANEH, *KHILAFERS* MENJADI TIMSES PILGUB
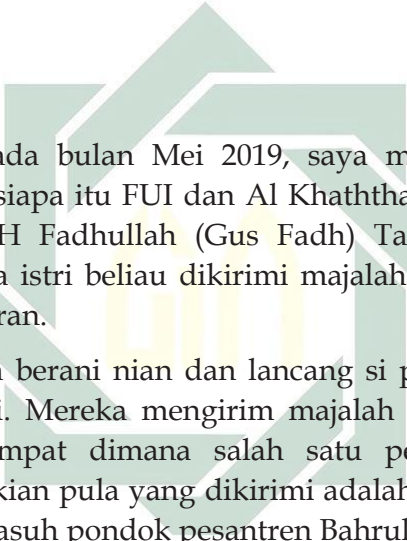
KALAU PERNAH mengkaji strategi Hizbut Tahrir dalam mendirikan khilafah, akan heran dengan berita tingkah para tokoh *khilafers* saat pikada DKI dahulu. Perlu diketahui, HTI anti terhadap seluruh sistem politik non-khilafah. Anggota HTI juga dilarang bermanis muka dengna penguasa dan haram menduduki jabatan politik di negara non-khilafah.

Namun di situs HTI (sekarang sudah tutup) terdapat judul tulisan yang mirip dengan timses politik. Di bawah ini ini alamat situsnya:

1. Awas curang di putaran mendatang https://hizbut-tahrir.or.id/2017/03/09/awas-curang-di-putaran-mendatang/
2. https://hizbut-tahrir.or.id/2017/03/03/momen-bersalaman-ahok-dengan-raja-salman-dimanfaatkan-oleh-pendukungnya-untuk-kredibilitas-politik/ []

KIAI TAMBAKBERAS DIKIRIMI MAJALAH BARU *KHILAFERS*

MALAM ITU pada bulan Mei 2019, saya memposting tentang apa dan siapa itu FUI dan Al Khaththath di grup keluarga, lalu KH Fadhullah (Gus Fadh) Tambakberas menimpali bahwa istri beliau dikirimi majalah HTI. Saya kaget dan penasaran.

Kaget karena berani nian dan lancang si perempuan Hizbut Tahrir ini. Mereka mengirim majalah di pondok Tambakberas, tempat dimana salah satu pendiri NU dilahirkan. Demikian pula yang dikirimi adalah istri salah satu majelis pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum dan mantan ketua Ansor Jombang. Lebih dari itu, pengirimannya dilakukan setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah yang, di antara saksi ahli dari pihak pemerintah adalah saya yang juga bertempat tinggal di Tambakberas.

Penasaran karena sepengetahuan saya (mungkin salah), sejak 2017, majalah itu berhenti.Tapi tiba-tiba ada majalah baru, maka saya kemudian meminjamnya. Setelah saya baca terdapat perbedaan dan persamaan antara majalah yang baru dan yang lama.

Persamaanya nama majalah tetap, yakni Al-Wa'ie. Isinya tetap jualan khilafah yang diulang-ulang dalam halamannya. Tidak ketinggalan mengkritik pemerintah sehingga tidak ada benarnya. Secuil apresiasi pun tidak ada. Memang begitulah ajaran Hizbut Tahrir, yakni memburukkan semua pemerintah dimana anggota Hizbut Tahrir hidup, terutama pemerintah yang pemimpinnya muslim dan rakyatnya mayoritas muslim. Memburukkan ini bertujuan agar masyarakat ikut percaya bahwa isu keburukan itu benar-benar ada dan selanjutnya masyarakat mau menolak pemerintahan dan mau mengggantinya dengan sistem khilafah. Maka wajar HTI akan berhadapan dengan negara seperti disampaikan Alm KH. Hasyim Muzadi (https://arrahmahnews.com/2019/05/18/alm-kh-hasyim-muzadi-pernah-sebut-hti-suatu-saat-akan-bentrok-dengan-negara/).

Adapun perbedaannya adalah, kalau majalah yang lama diterbitkan langsung oleh "Hizbut Tahrir Indonesia". Kalau yang baru diterbitkan oleh "Pusat Studi Politik dan Dakwah". Alamatnya juga berbeda tapi tetap berada di Jakarta. Saya tidak tahu apakah majalah itu sampai saat ini masih terbit atau sudah berhenti.

Beberapa hal yang cukup membuat geregetan dari isi majalah tersebut antara lain:

Pertama, dalam judul "Kekuatan Politik Umat Islam" disitu ditulis maraknya kecurangan pilpres 2019. Lalu dicantumkan kalimat provokatif "Pergolakan politik pun sangat mungkin terjadi pada masa datang".
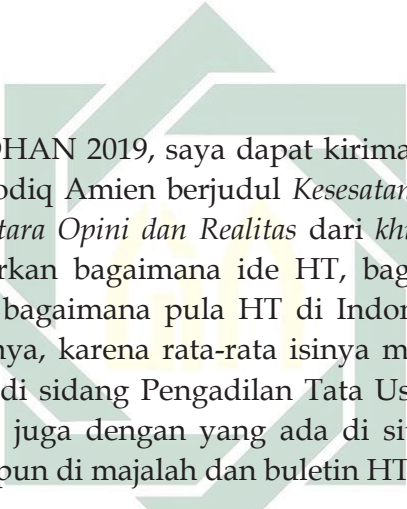
Kedua, di cover depan bagian dalam, dan cover belakang bagian luar dan dalam ditampilkan foto-foto

kegiatan aktivitas Hizbut Tahrir dengan titik ekspos Jawa Timur. Mereka ingin menunjukkan ke masyarakat Jawa Timur bahwa mereka masih eksis. Di cover itu yang ditampilkan adalah kegiatan anggota Hizbut Tahrir di Malang, di Surabaya, di Surabaya lagi, di Malang lagi, di Bojonegoro, di Banjarmasin, di Tuban, di Bogor, di Yogyakarta, di Pasuruan, di Probolinggo, di Jombang, di Jakarta, di Magetan, di Gresik, dan di Blitar. []
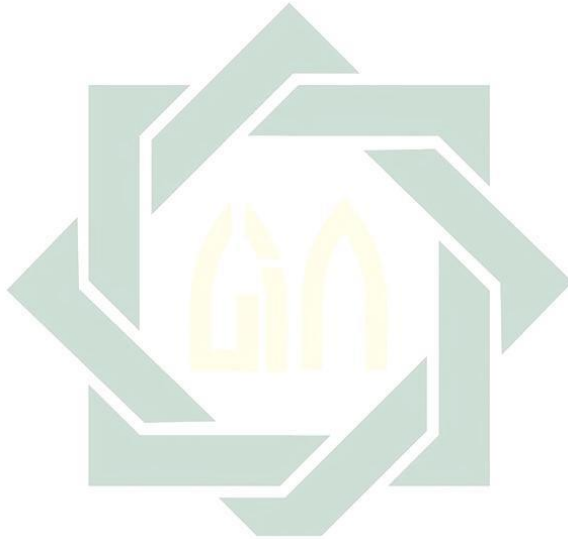
HTI "BERJUANG" UNTUK INDONESIA

AWAL RAMADHAN 2019, saya dapat kiriman soft buku "baru" karya Shodiq Amien berjudul *Kesesatan dan Bahaya Hizbut Tahrir antara Opini dan Realitas* dari *khilafers*. Buku itu menggambarkan bagaimana ide HT, bagaimana HT "berjuang", dan bagaimana pula HT di Indonesia. Males sih baca semuanya, karena rata-rata isinya mirip dengan pembelaan saat di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara dulu, dan mirip juga dengan yang ada di situs HT saat masih aktif maupun di majalah dan buletin HT.

Bagi saya, ya lucu saja HT merasa "berjuang", padahal sejatinya mau menggulingkan NKRI dan menggantinya dengan khilafah. Padahal tokoh-tokoh bangsa, termasuk tokoh NU dulu yang membela NKRI, bukan HTI. Kisah yang saya kutip dari buku Abdul Mun'im DZ *Fragmen Sejarah NU* di bawah ini menarik.

NU menjadikan agama sebagai inspirasi mendirikan, mengukuhkan dan mempertahankan negara. Oleh sebab itu, NU menolak terlibat dalam Darul Islam (NII, DI/TII). Ketika situasi genting di tahun 1954, NU memberikan

status pada pemerintah Indonesia, yakni memberi gelar Bung Karno sebagai *waliyul amri addauri bissyyaukah*. Gelar ini untuk menandingi gelar yang disematkan Kartosuwiryo (pimpinan Darul Islam, DI/TII) bahwa dirinya adalah sebagai *amirul mukminin*.

Sikap seperti ini menjadikan kelompok garis keras Darul Islam marah sehingga beberapa pimpinan NU selalu menjadi ancaman teror dan pembunuhan. Bahkan sejak 1949, KH Idham Chalid sebagai salah satu pimpinan NU merasa sering mendapat teror. Menurut penuturan KH Idham Chalid beberapa kali beliau diserang. Suatu hari, saat menginap di Puncak, Kiai Idham diberondong pasukan Darul Islam (DI). Begitu pula ketika ke Yogya, keretanya diberondong pasukan Islam garis keras itu. Oleh Darul Islam, NU telah dianggap pengkhianat karena keluar dari Masyumi. Lebih jauh, NU dianggap kafir karena menolak negara Islam DI.

Peristiwa paling dramatis adalah saat para pimpinan NU seperti KH Idham Chalid, KH Zainul Arifin bersama Bung Karno melakukan sembahyang Idul Adha di masjid Baiturrahim di Lingkungan Istana tahun 1962. Saat itu terjadi penembakan oleh para gerilyawan DI/TII pada para pimpinan negara ini. Dalam insiden tersebut, peci KH Idham Chalid tersambar peluru dan Bung Karno selamat. Sementara tokoh NU, yakni KH Zainul Arifin, yang juga Wakil Perdana Menteri, terkena tembakan, sehingga mengakibatkan mantan panglima Hizbullah itu meninggal dunia. Selain itu, beberapa pimpinan NU banyak diserang teror, bahkan ada yang gugur dibantai oleh Pasukan DI.

Elit NU dianggap kafir karena mendukung pemerintah RI. Oleh DI, negeri ini disebut sebagai Republik Indonesia Kafir. lni tentu berbeda dengan pandangan KH Ahmad Shiddiq bahwa penerimaan NU terhadap Negara Republik lndonesia tidak bersifat politis dan taktis, melainkan bersifat ideologis, syar'i, merupakan kewajiban syariah. Sehingga tidak tepat kalau NU dituduh oportunis oIeh kaum modernis terutama para simpatisan Dl/TII. []
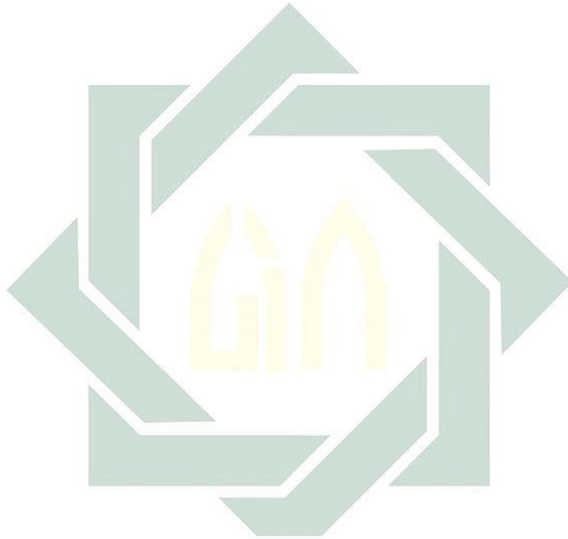
DOKTRIN *KHILAFERS*: MEREMUKKAN PENGUASA

ANDA YANG berada satu grup medsos dengan orang Hizbut Tahrir akan mengetahui bahwa pra dan pasca pilpres pada tahun 2019 lalu, mereka menyebar beragam tulisan provokatif untuk "mengadu" yang sasarannya menyerang penguasa. Pada tahun 2020 ini di medsos juga tetap dijalankan model provokasi karena memang itu metode baku mereka dalam menegakkan khilafah. Bukti hal itu bisa dilihat situs emak-emak *khilafers* yang aktif: https://www.muslimahnews.com/2019/12/13/mengkritik-penguasa-di-muka-umum-tidak-haram-dan-tidak-termasuk-ghibah/ lihat juga https://www.muslimahnews.com/2019/05/23/mengoreksi-penguasa-secara-terbuka-dalam-islam/ dan juga ini https://www.muslimahnews.com/2020/04/20/rezim-zalim-bbm-tetap-saja-mahal/

Doktrin Hizbut Tahrir adalah menyerang penguasa, siapa pun dia, dan akan mendekati pihak penolong (*ahlun nusrah*) yang bisa diajak menyerang penguasa. Semisal penguasa yang diserang tumbang, maka nanti pihak (*ahlun nusrah*) bila berkuasa diajak mendirikan khilafah, tapi kalau

tidak mau mendirikan khilafah, pasti juga akan diserang. Itu rumus wajib dalam Hizbut Tahrir.

Di bawah ini kutipan langsung buku karya Taqiyudddin An-Nabhani, *Dukhul al-Mujtama'* yang sudah diterjemahkan berjudul *Terjun ke Masyarakat,* "Aktifitas dalam perjuangan politik harus dilakukan dengan cara menyerang kekuasaan yang ada, sehingga dapat meremukkan seluruh "organ vital" (yang ada dalam rongga dada) sekaligus menghancukan karismanya. Akibatnya, orang-orang akan mengerubutinya, dan banyak tangan serta jari yang akan mencekiknya, lalu memusnahkannya dengan seluruh kekuatan. Juga harus dilakukan dalam bentuk yang memancing kerinduan kepada pemerintahan Islam, *Daulah lslamiyah* dan bendera Islam." []

ALQUR'AN, KHILAFAH, KHALIFAH

SETELAH PROF. DIN Syamsuddin "meliuk-liuk" menjelaskan dengan memakai nomenklatur yang disebut "*alaqah ma'nawiyah*" antara khalifah dengan khilafah, selanjutnya Dr. Hamim Ilyas (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) menambahi dengan penjelasan, "Mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada khalifah tapi tidak ada khilafah itu seperti mengatakan di Indonesia ada presiden tapi tidak ada kepresidenan, dan ada ulama tapi tidak ada keulamaan. Jika pandangan yang dianut demikian, maka wajar jika di Indonesia ada ulama tanpa keulamaan."

Padahal sebetulnya simpel saja yang hendak kita, atau paling tidak, yang saya maksud, bahwa di Al Quran tidak ada redaksi khilafah, apalagi dengan konstruksi ala HT. Ya simpel itu saja, bukan kita mau menderivasikan dengan mentasrif kata dari khalifah. Kalau ditasrif, malah akan lebih banyak *wazan* lagi dengan beberapa *sighat* (*fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fail, maf'ul, amar, nahi, zaman, makan* dan *alat*). Tampaknya masalah di atas menjadi ruwet karena berjalin kelindan dengan politik, dan tentu penyeru khilafah diuntungkan.

DAGING BERACUN PENGIKUT HIZBUT TAHRIR DAN ROMY

DI GRUP MEDSOS yang saya ikuti ada kiriman dari anggota Hizbut Tahrir yang memposting tulisan Nasrudin Joha (entah siapa si Joha itu, yang jelas beberapa postingannya banyak membela HTI dan menyudutkan pemerintah; contoh https://mediaumat.news/pemerintah-fobia-khilafah-yang-merupakan-ajaran-islam/). Tulisan si Nasrudin Joha berjudul "kepada siapa pun yang membenci pejuang khilafah, ingat daging pejuang khilafah beracun".

Di antara isi postingan itu adalah "Rommy sendiri, sebelumya dikenal paling gigih mengumumkan penentangan pada pejuang khilafah dan paling fasih menebar fitnah terhadap ajaran Islam khilafah. Melalui otoritas kemenag, para pejuang khilafah dikriminalisasi, dipersekusi, bahkan dijatuhi sanksi atas tudingan mengemban ideologi khilafah yang berpotensi memecah belah kesatuan Indonesia".

Tentu dapat disimpulkan narasi yang dibangun dari tulisan di atas adalah ingin menyampaikan pesan bahwa memusuhi khilafah ala HTI akan mendapat balasan. Saya

tidak hendak membela Romy (Romahurmuzy), karena bagi saya, siapa pun yang salah, harus berurusan dengan hukum. Namun yang membuat saya risih dan jengah adalah model dan gaya menakut-nakuti dengan merasa paling benar dan paling dekat dengan Tuhan sembari menegasikan dan mengancam secara "mistis" terhadap pihak yang berseberangan. Cara menakut-nakuti ini terkadang manjur bagi remaja yang haus agama sehingga mereka mau bergabung dengan Hizbut Tahrir.

Apalagi narasi dalam postingan di atas bernalar pincang alias tidak korelatif. Romy ditangkap KPK (Maret 2019) karena tuduhan korupsi lalu dihubungkan dengan masalah penolakannya atas khilafah. Gaya nalar pincang ini juga terjadi saat ada seorang profesor yang menjadi pembela HTI. Saat Sugik Nur ditersangkakan, lalu ada gempa Palu, selanjutnya si profesor itu mengkaitkannya (https://makassar.terkini.id/profesor-kaitkan-bencana-gempa-sulteng-penetapan-tersangka-gus-nur/)

Suatu nalar yang aneh dan hanya asal otak-atik matuk saja. Kalau menggunakan nalar otak atik matuk ini, bisa juga dibuat narasi gara-gara Sugik membela HTI (https://youtu.be/sz4JM0JO_hI), maka akhirnya dia jadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Tapi kita tidak akan senaif dan sebodoh itu.

Atau malah kilas balik sejarah sesaat setelah NKRI berdiri, bisa saja pro negara Islam bilang bahwa gara-gara tokoh NU seperti Kiai Wahab Chasbullah *membughatkan* mereka, maka akhirnya Mbah Wahab pada masa tuanya sakit. Tentu orang waras tidak akan mengatakan seperti itu. *Membughatkan* adalah upaya menjaga NKRI, sakit

karena memang takdir, tidak korelatif. Kalau cari *otak-atik matuk*, seharusnya banyak pemerintahan di Timur Tengah (Termasuk Arab Saudi) dan Asia Tengah yang melarang Hizbut Tahrir dan bahkan menangkapi dan membunuhi anggota HT lebih patut mereka cela dan diotak-atik matuk.

Semoga anggota Hizbut Tahrir sadar dan merenungi dengan dibubarkannya (bukan malah mencari perkara dan mau meracuni pikiran generasi milenial). Harapannya mereka mau kembali ke pangkuan NKRI, sebagimana dulu banyak anggota DI/TII, demikian juga simpatisan PKI yang tobat dan kembali ke pangkuan NKRI. []
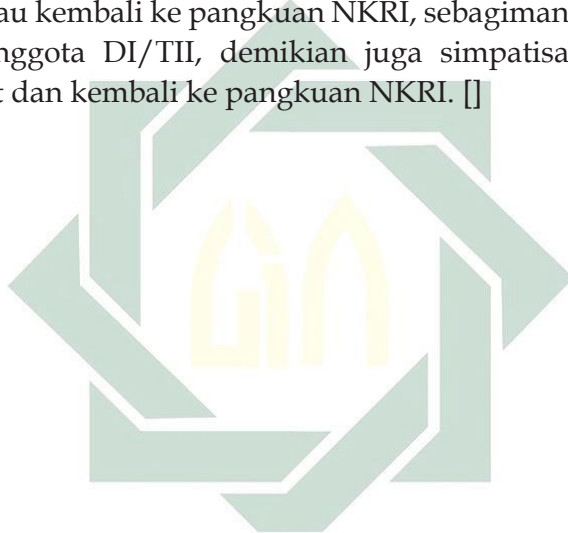
KENAPA *KHILAFERS* MENENTANG PENYEBUTAN NON-MUSLIM?

DALAM BAHTSUL Masail Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat para kiai menyepakati bahwa status non-Muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak termasuk dalam empat kategori kafir, tetapi mereka adalah warga negara (*muwathin*). Lalu hal ini digoreng oleh pihak yang anti terhadap PBNU. Tidak ketinggalan kelompok *khilafers* ikut menggorengnya.

Kenapa Hizbut Tahrir getol menentang dan ikut menggoreng? Jawabannya sangat mngkin karena bangunan sistem politik khilafahnya akan pincang bila tidak ada kata kafir. Dalam banyak kitabnya dan bahkan UUD-nya mereka membelah negara dengan sebutan negara Islam dan negara kufur untuk proyeksi khilafahnya.

Selain itu, HT pengagum jihad yang dimaknai perang. Ingat, bagi HT, jihad hanya perang, bukan yang lain. Jihad sangat digelorakan HT untuk melawan negara kafir itu. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok anggota HT

di Suriah ikut perang melawan Asad? Ya karena sistem politik di Suriah dianggap kufur sebagaimana di Indonesia. Lalu kenapa di Indonesia tidak ikut perang? Menunggu momentum kayak di Suriah!

Dalam situs NU dijelaskan sebenarnya duduk perkara penyebutan non-muslim sebagaimana dituturkan salah seorang Perumus *Bahtsul Masail Maudluiyah* Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, KH Afifuddin Muhajir. Beliau mengatakan, *Bahtsul Masail* di Munas tidak membahas tentang apakah non-Muslim di Indonesia ini kafir atau bukan. Akan tetapi yang dibahas adalah kategori mereka. Apakah mereka itu *harbi, mu'ahad, musta'man, dan dzimmi*?

Jawabannya, mereka (non-Muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia) itu bukan *harbi,* bukan *mu'ahad*, bukan *musta'man*, bukan pula *dzimmi*. Karena memang definisi-definisi tersebut tidak bisa diterapkan kepada non-Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, istilah yang tepat, katakan saja mereka non-Muslim.
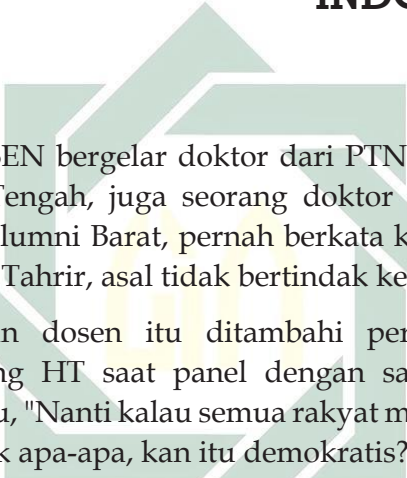
Lalu bagaimana dengan ungkapan misalnya, "kamu kafir", atau ungkapan dengan "yang mereka tidak sukai." Harus dibedakan pula antara keyakinan dan pernyataan, apa yang boleh atau bahkan wajib menjadi keyakinan belum tentu bisa dinyatakan. Misalnya, suatu kelompok yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dinyatakan kafir, kita wajib meyakini mereka kafir. Akan tetapi mengatakan, "kamu kafir", "dia kafir", "mereka kafir", itu bisa menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat plural, yang sudah damai dan sudah diusahakan dan diciptakan dengan susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu, perlu dicari kalimat lain yang lebih santun,

misalnya non-Muslim. Ini tanpa harus mengubah "*Qul yaa ayyuhal kaafirun*" menjadi "*Qul yaa ayyuhal non-Muslim*". Itu tidak boleh. https://www.nu.or.id/post/read/103272/penjelasan-perumus-bahtsul-masail-munas-nu-soal-polemik-kafir. []

BIARKAN HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA!

SEORANG DOSEN bergelar doktor dari PTN Islam yang alumni Timur Tengah, juga seorang doktor yang dosen di PTN umum alumni Barat, pernah berkata kepada saya, "Biarkan Hizbut Tahrir, asal tidak bertindak kekerasan."

Lalu ucapan dosen itu ditambahi persis dengan pernyataan orang HT saat panel dengan saya di Jogja berapa tahun lalu, "Nanti kalau semua rakyat menghendaki khilafah, ya tidak apa-apa, kan itu demokratis?"

Dua orang dosen itu saya pastikan bukan orang HT, sangat mungkin karena saking gandrung kepada demokrasi liberal Barat yang alumni Barat; adapun yang alumni Timur Tengah masih gagap dengan formulasi NKRI itu hasil ijtihad para ulama, dan lebih merasa syar'i bila memakai nomenklatur khilafah, maka akhirnya mereka berkata demikian.

Salah seorang dosen juga bilang bahwa Hizbut Tahrir hanya gagasan saja. Saya pastikan orang ini belum pernah baca buku buku HT bahwa gerak HT tidak hanya sekadar

gagasan saja. Si dosen juga tidak paham bagaimana peran Hizbut Tahrir yang suka menunggangi kasus politik. Di Suriah ikut nunggangi huru-hara dan ikut berperang, serta hal itu didukung oleh anggota HT di Indonesia. []

HAL UNIK SAAT MENJADI SAKSI AHLI SIDANG PEMBUBARAN HTI

SAAT ITU ceritanya saya bolak-balik dihubungi oleh berbagai pihak untuk menjadi saksi ahli sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan HTI atas langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya. Saya awalnya enggan karena menurut saya masalah HTI sudah gamblang tidak perlu saksi lagi. Alasan lain, membayangkan ribetnya debat di sidang pengadilan. Namun akhirnya saya mau karena ditelpon sekretaris pengurus PWNU Jatim katanya saya diminta oleh ketua PBNU untuk menjadi saksi ahli.
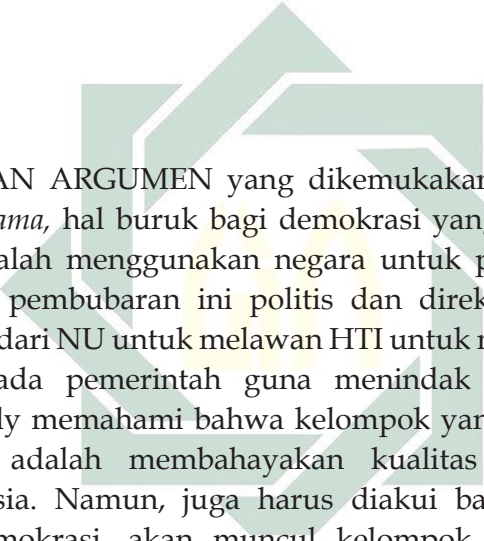
Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018, saya maju sebagai saksi ahli berhadapan dengan penasehat hukum dan jubir HTI, Ismail Yusanto. Dua hal unik saat sidang. *Pertama*, saya dipancing penasehat hukum HTI untuk menyebutkan sumber hukum Islam. Saya jawab, al Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Penasehat hukum mengejar saya dengan pertanyaan lanjutan, dimana posisi Pancasila? Tentu seperti ini pertanyaan jebakan, kita harus mempunyai wawasan agar bisa memuaskannya dan tidak terjebak.

Kedua, saya menjelaskan agar kita merawat NKRI, karena NKRI adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa juga para ulama. Ternyata Ismail Yusanto bertanya dengan pertanyaan yang tidak terduga, "Apakah hasil kesepakatan tidak bisa diubah?" Alhamdulillah muncul kilatan pemahaman, maka saya langsung berkata dengan jawaban yang di luar dugaan saya. Intinya kalau kesepakatan itu yang kita buat, dan kita masih hidup, pasti gampang mengubah, tapi sekarang para pendiri bangsa sudah wafat, apakah mau konsultasi ke makam mereka? Jawaban yang di luar dugaan saya ini ternyata menghasilkan hal yang juga di luar dugaan saya, yakni Ismail Yusanto diam tidak melanjutkan pertanyaan, kaget mungkin. []
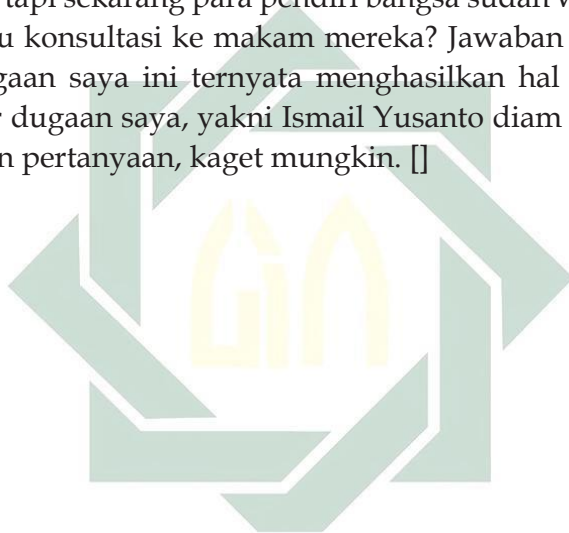
GREG FEALY DAN PEMBUBARAN HTI

POTONGAN ARGUMEN yang dikemukakan oleh Greg Fealy, *pertama,* hal buruk bagi demokrasi yang dilakukan Jokowi adalah menggunakan negara untuk pembubaran HTI. Jadi, pembubaran ini politis dan direkayasa. Ada mobilisasi dari NU untuk melawan HTI untuk memberikan dalih kepada pemerintah guna menindak tegas HTI. *Kedua,* Fealy memahami bahwa kelompok yang intoleran, sektarian, adalah membahayakan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, juga harus diakui bahwa dalam sistem demokrasi, akan muncul kelompok seperti itu. *Ketiga,* lalu menurut Fealy, cara menghentikan laju partai sayap kanan dalam demokrasi adalah pemerintah harus mempromosikan gagasannya dan membujuk publik bahwa Islamisme seperti itu berbahaya dengan menggunakan argumen yang baik bukan dengan membubarkannya. Selengkapnya baca di situs: https://tirto.id/soal-212-greg-fealy-islam-gagal-bersatu-jadi-kekuatan-oposisi-c8Lc.

Jawaban saya untuk Fealy; *pertama,* konsekuensi nalar dari demokrasi liberal adalah seperti pandangan Greg Fealy. Kita sepakat menggunakan demokrasi Pancasila, maka berangkat berfikir dan bertindak harus berasal dari kesepakatan ini, yakni demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal, maka PKI dan DI/NII juga dilarang, bahkan ditumpas. Tidak tahu lagi kalau di demokrasi liberal ala Barat, apakah akan dilarang penyebaran ideologi komunisme dan juga gerakan khilafatisme.

Kedua, saat saya mengisi seminar di kampus PTN ada dosen pembicara yang punya pendapat seperti Greg Fealy. Untuk itu saya berucap kepadanya, "Suatu saat ada seminar di kampus, lalu muncul kelompok mahasiswa islamisme tahu ada seminar dengan pembicara luar negeri yang pemikirannya dianggap melanggar Islam, maka pembicara luar itu didemo dan diusir agar tidak bicara di kampusnya. Apakah benih-benih seperti itu kita diamkan dengan alasan demokrasi? Itu baru benih yang kecil, belum membesar dan banyak.
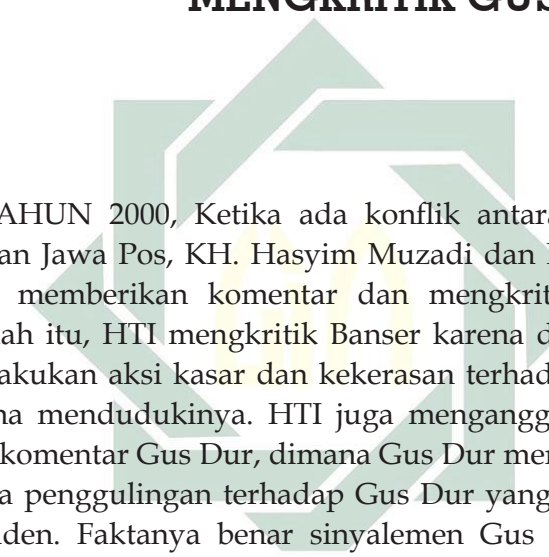
Bagi saya, mereka yang anti demokrasi, lalu memberi ajang mereka dengan alasan demokratis, maka tunggu saja kericuhan dan kerusuhan yang akan mereka ciptakan. Apalagi islamisme ini pandai menunggangi pihak lain, dan juga ada di antara elit yang memanfaatkan islamisme untuk kepentingan politik jangka pendek. Sekali lagi, siapa membiarkan islamisme yang anti demokrasi dengan alasan demokrasi (yang liberal), maka sama dengan menyerahkan separo dari gagasan demokrasi yang anda perjuangkan untuk mereka penggal dan buang.

Ketiga, membandingkan kehidupan beragama di Barat (Amerika, Eropa, Australia) dengan di Timur Tengah, Indonesia, dan di negara-negara yang muslim mayoritas, lalu anda meneropongnya dengan kacamata demokrasi liberal, maka hal ini adalah cara tidak bijak. []

KHILAFERS MENASEHATI ANSOR DAN MENGKRITIK GUS DUR

PADA TAHUN 2000, Ketika ada konflik antara warga NU dengan Jawa Pos, KH. Hasyim Muzadi dan Presiden Gus Dur memberikan komentar dan mengkritik Jawa Pos. Setelah itu, HTI mengkritik Banser karena dianggap telah melakukan aksi kasar dan kekerasan terhadap Jawa Pos karena mendudukinya. HTI juga menganggap aneh terhadap komentar Gus Dur, dimana Gus Dur mensinyalir ada upaya penggulingan terhadap Gus Dur yang saat itu jadi presiden. Faktanya benar sinyalemen Gus Dur ini, terbukti nantinya terjadi penggulingan terhadap Gus Dur.

Selanjutnya HTI secara jumawa dan bangga menasehati Ansor dan mengkritik Presiden Gus Dur dengan tajam, pedas, dan kayak merasa paling Islami, "Bila kalian ingin mengemban citra sebagai Anshor, janganlah kalian bersikap arogan dan berlaku seperti agresor. Tidak sepatutnya kalian menjadi Anshor bagi penguasa yang zalim yang mencampakkan Islam sebagai *dinullah*, menyia-nyiakan hukumnya, dan memuja simbol-simbol kekufuran
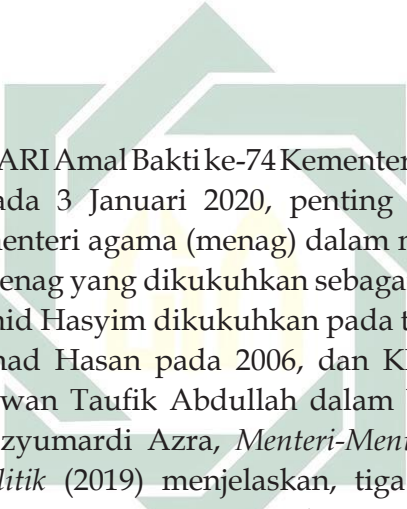
ketimbang mengagungkan Islam. Karena cepat atau lambat, Allah akan menghinakan mereka dengan kemurkaan-Nya....."

Itulah model HTI yang merasa paling Islam dan paling bijak walaupun kenyataannya Gus Dur yang benar. Tentu menyakitkan kalau menilai Gus Dur memuja simbol-simbol kekafiran dan anti Islam. []
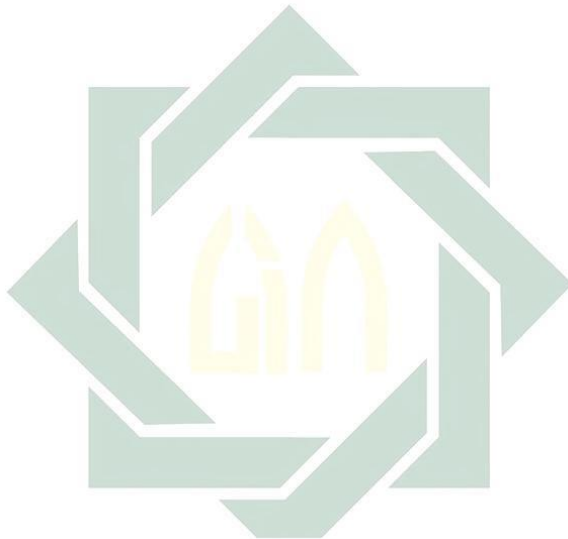
PERAN TRANSFORMATIF GEN Z

MENYAMBUT HARI Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama (Kemenag) RI pada 3 Januari 2020, penting mengingat kontribusi para menteri agama (menag) dalam mendirikan NKRI. Ada tiga menag yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional; KH Wahid Hasyim dikukuhkan pada tahun 1964, Teuku Moehammad Hasan pada 2006, dan KH Masjkur pada 2019. Sejarawan Taufik Abdullah dalam buku yang disunting oleh Azyumardi Azra, *Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial Politik* (2019) menjelaskan, tiga tokoh itu adalah anggota BPUPKI maupun PPKI karenanya disebut *founding fathers*.

Teuku Moehammad Hasan adalah gubernur Sumatera pertama dan menjadi Menag saat Pemerintahan Darurat RI. Adapun KH Wahid Hasyim seperti dalam buku *Wahid Hasyim: untuk Republik dari Tebuireng* (2011) adalah anggota Tim 9 yang ikut merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di antara isinya adalah “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun setelah Proklamasi 17

Agustus, Mohammad Hatta menyampaikan munculnya suara dari Indonesia Timur yang akan memisahkan diri karena Piagam Jakarta. Setelah Bung Hatta berdiskusi dengan para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Moehammad Hasan, juga dengan KH Wahid Hasyim sendiri, akhirnya disetujui perubahan redaksi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya kontribusi KH Masjkur dapat dilacak dalam karya Andree Feillard, *NU vis a vis Negara* (1999). Kiai Masjkur bertutur, terjadi diskusi panjang mulai jam 7 malam sampai jam 4 pagi pada akhir Mei 1945 bersama Soekarno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakkir dan KH Masjkur sendiri di rumah Mohammad Yamin. Diskusi itu menghasilkan sumbangan dari sisi Islam terhadap definisi Pancasila.

KH Masjkur selaku Menag pernah mengadakan Konferensi Alim Ulama tahun 1954. Ali Haidar dalam bukunya *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* (1994) menjelaskan, hasil keputusannya, presiden dalam perspektif fikih adalah absah sebagai pemimpin yang otomatis legal sebagai wali hakim dengan sebutan *waliyyul amri addlaruri bisysyaukah*. Penyematan gelar ini ternyata juga mempunyai tujuan politis lain, yakni untuk menandingi gagasan Kartosuwiryo yang mengangkat dirinya sebagai "imam" dan "*amirul mukminin*". Choirul Anam dalam karyanya *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (2010) menjelaskan, pemberian gelar terhadap Soekarno ini menghilangkan kebingungan umat Islam atas gelar "Imam" yang dipakai oleh Kartosuwiryo.

Di atas adalah menag yang menjadi pahlawan nasional. Masih ada para menag yang juga pejuang melawan penjajah walau tidak atau belum dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Kalau mengikuti penjelasan Taufik Abdullah dalam buku *Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial Politik* di atas, semua menag yang bergelar kiai adalah mantan pimpinan lokal maupun nasional pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Dalam buku tersebut yang bergelar kiai adalah KH Fakih Usman, KH Iljas, KH Wahib Wahab, KH Saifuddin Zuhri dan KH Mohammad Dahlan. Munawwir Sjadzali juga pejuang dari Hizbulah, serta Alamsjah Ratu Perwiranegara adalah komandan pertempuran 5 hari melawan Belanda di Palembang. Masih ada lagi menag yang terlibat dalam perjuangan secara diplomasi dan pergerakan politik melawan penjajah seperti HM. Rasjidi, Fathurrahman Kafrawi dan Mukti Ali.

Mentransformasi Nilai Kepahlawanan

Generasi Z (gen Z) atau *centennial* di Kemenag baik yang masih pelajar maupun mahasiswa/i jangan hanya bangga dengan sejarah perjuangan para menag. HUT Kemenag saat ini mesti dijadikan momentum transformasi nilai kepahlawanan menjadi semangat perlawanan untuk memperkuat visi kebangsaan. Pelajar gen Z di Kemenag termasuk terbanyak bila dilihat dari lembaga madrasah sejak TK hingga Aliyah berjumlah 77.336. Belum lagi kampus baik negeri maupun swasta yang juga berada di bawah Kemenag. Suatu potensi besar yang bisa dimanfaatkan siapa pun.

Gen Z Kemenag yang muslim mempunyai tanggung jawab untuk belajar, dan mengaji (apalagi yang santri).

Namun banyak peran lain yang perlu dilakukan semisal perlawanan terhadap peredaran narkoba dan kepada kelompok radikal yang sama menyasar mereka. Fokus wacana ini pada yang terakhir, yakni radikalisme.

Radikalisme yang sejatinya problem semua pemeluk agama di dunia, telah merebak sejak tahun 2000-an di Indonesia. Deretan panjang aksi radikalisme dan terorisme telah terjadi. Terakhir bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan pada November 2019 lalu. Kelompok radikal menyasar gen Z di saat mereka mengalami *curiosity* dan fase pencarian jati diri bercampur semangat belajar keagamaan yang menggebu. Kelompok radikal menyadari kondisi dan potensi tersebut.

Di samping harus siap menyongsong teknologi 4.0 dengan eranya yang disruptif, gen Z Kemenag juga harus sadar sedang menghadapi perebutan pasar bebas pemikiran, termasuk pemikiran gerakan radikal. Mereka perlu melakukan kontranarasi atau kontrawacana baik di dunia maya maupun dunia nyata (sekolah, kampus, tempat ibadah). Gen Z Kemenag perlu aktif memanfaatkan keahliannya di media internet untuk menyebarkan wawasan keagamaan yang toleran. Ingat, kelompok radikal tak hanya bekerja di lapangan, tapi juga bergiat di medsos.

Hal lain yang menjadi kelebihan gen Z Kemenag yang muslim adalah pengetahuan keislaman relatif lebih dibanding remaja dan pemuda pada umumnya. Dus, mereka perlu memahami gerakan radikal, bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk menangkalnya, minimal untuk dirinya sendiri. Pemahaman dibangun dengan banyak

membaca literatur terkait, berdiskusi dengan narasumber mumpuni, dan bergaul dengan berbagai kalangan.

Tentu nilai tambah ini penting disadari dalam rangka menabur pemikiran Islam yang *rahmatan lil alamin* untuk menyadarkan gerakan radikal yang menggunakan “topeng” agama. Melalaikan atau merasa tidak "*pede*" sehingga enggan menyebarkan gagasan keislamannya adalah absurd, bahkan keliru besar di saat menyadari masih "berkeliarannya" pemikiran radikal.

Dengan modal pemahaman keagamaan yang lebih tersebut, gen Z Kemenag dapat mementahkan pemahaman radikal dengan berbagai argumentasi keagamaan yang meyakinkan dan “nyambung” dengan kaum muda yang terpapar kampanye radikal. Sebagai contoh, bagi gen Z, menjalankan Islam secara kafah (sempurna) tidak harus dimaknai sebagai kewajiban untuk menegakkan khilafah dan menyingkirkan NKRI. Elaborasi argumen bantahan tentang kafah dan khilafah dapat dibaca di buku saya *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* (2019). Gen Z perlu tahu, yang dibutuhkan oleh ajaran Islam adalah merealisasikan sistem politik (tidak harus khilafah) yang kompatibel dan akomodatif terhadap ajaran agama, termasuk Islam.

Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Munawir Sjadzali (mantan Menag) dalam bukunya *Islam and Governmental System* (1991) menjelaskan tentang "*state leadership theory*" bahwa tujuan hidup bermasyarakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan material. Hidup juga ditujukan untuk meraih kebahagiaan di akherat dengan cara menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama bisa dilaksanakan manakala ada keharmonisan (tertib, aman,
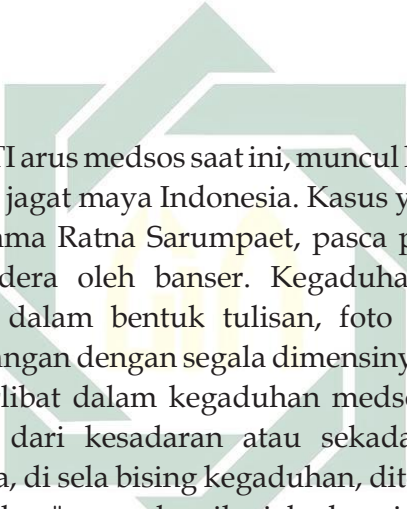
sejahtera) dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin negara bertugas mengatur agar kehidupan bermasyarakat bisa harmonis, disinilah wajibnya adanya pemimpin.

Dari penjelasan Al Ghazali di atas, dapat disimpulkan, di dalam wadah NKRI kita bisa menjalankan kehidupan beragama yang harmonis tanpa perlu mengganti sistem. Kalau muncul disharmoni di suatu waktu, bukan berarti harus mengganti sistem dengan khilafah atau negara Islam, tapi ada problem lain. Untuk diketahui gen Z, dalam sejarah khilafah pun juga terjadi disharmoni seperti pembunuhan sadis dan peperangan sebagaimana didedah oleh Nadirsyah Hosen dalam bukunya *Islam Yes, Khilafah No* (2019).

Terakhir, gen Z Kemenag dalam melaksanakan ajaran Islam di tengah masyarakat tidak *berperfomance* garang, tapi ramah dan *rahmah* (welas asih). Bilamana ada kelompok mengaku pelajar atau mahasiswa Kemenag RI, walakin tampilannya tidak demikian, maka perlu diragukan. Nonmuslim menilai baik dan buruk Islam dari sikap dan perilaku muslim, maka gen Z Kemenag merupakan duta Islam. Berislam yang demikian hendaknya diamplifikasi sedemikian masif sehingga menjadi kesadaran umum di lingkungan manapun berada. []

KEGALAUAN MILENIAL YANG BAIK

KALAU DIAMATI arus medsos saat ini, muncul kegaduhan yang luar biasa di jagat maya Indonesia. Kasus yang paling aktual adalah drama Ratna Sarumpaet, pasca pilpres dan pembakaran bendera oleh banser. Kegaduhan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tulisan, foto dan video yang berisi kegarangan dengan segala dimensinya. Pemuda milenial tentu terlibat dalam kegaduhan medsos tersebut entah berangkat dari kesadaran atau sekadar menjadi *proxy*. Menariknya, di sela bising kegaduhan, ditemui suara "rintihan dan keluhan" pemuda milenial sebagai wujud dari kegalauan. Kegalauan ini bisa diringkas: penyesalan atas terjadinya adu domba, perpecahan, dan fitnah yang terjadi antar sesama. Terkadang mereka juga menyesalkan kenapa saya (penulis artikel) ikut terlibat perdebatan di medsos yang dalam asumsinya mengakibatkan perpecahan.

Kegaluan di atas mirip seperti yang pernah penulis alami dahulu. Sewaktu menjadi mahasiswa, penulis terbiasa mendengarkan berita di radio atau membaca koran. Di antara isi berita yang selalu membuat penulis

prihatin adalah apabila ada pertikaian, kerusuhan, dan bahkan pembunuhan baik antar sesama manusia, atau antarsatu umat.

Dalam situasi kontemplasi, muncul pertanyaan: kenapa Tuhan menciptakan manusia yang mempunyai kesukaan berantem dengan segala derivasinya? Kenapa para tokoh agama, intelektual, dan politikus juga ikut terlibat, entah mereka sebagai inspirator, aktor, atau bahkan provokator? Padahal para elit tersebut dalam ceramahnya menyerukan persatuan, persaudaraan dan perdamaian, bahkan diperkuat dengan berbagai dalil-dalil pembuktian atas kebenaran ucapannya.

Realitas kegalauan di atas penulis lanjutkan dengan membaca buku-buku, termasuk buku sejarah tokoh Islam. Dari pembacaan terhadap buku-buku tersebut, akhinya penulis bisa sedikit mengerti bahwa dalam menghadapi realitas di dunia, terkadang harus "menurunkan" cita ideal, namun tidak menanggalkannya.

Secara mudah begini, saat di medsos terjadi perdebatan yang hebat dengan bumbu hoaks, provokasi, dan isu SARA, maka dalam posisi ini sebagai individu yang sadar harus turun gelanggang untuk menjawab dan meluruskan dengan menggunakan nalar sehatnya serta dilandasi kejujuran. Perdebatan yang terjadi hendaklah tidak dinilai oleh sebagian pemuda milenial sebagi wujud suka perpecahan dan abai terhadap persatuan. Karena kalau diam, pihak elit yang permisif dan destruktif akan terus menyuarakan kepentingannya tanpa mempedulikan efek di akar rumput. Di era *post truth* ini. kepentingan elit permisif dan destruktif walaupun salah dalam nalar dan

agama, akan menjadi benar bila terus menerus disuarakan. Untuk itu, harus dijawab dan dilawan dengan informasi yang benar diikuti oleh nalar yang waras, serta cara yang beradab. Diam di medsos, sama dengan menyerahkan nasib pemuda milenial ke "mulut buaya".

Dengan demikian, terlibat di medsos adalah urgen walau mungkin pada asalnya tidak hobi bermedsos. Terlibat dalam "pertempuran" di medsos itulah yang penulis maksud "menurunkan" cita ideal yang yang dimiliki.

Legalitas kebolehan melakukan "pertempuran" di medsos dalam bentuk "menurunkan" cita ideal dapat dijumpai dalam sejarah para negarawan besar dunia. Mereka tidak hanya berdebat, bahkan melakukan pertempuran fisik. Tentu pertempuran fisik sejatinya bukan suatu yang ideal dalam perspektif tujuan bermasyarakat. Tapi hal itu dilakukan oleh para negarawan besar demi menjaga dan memupuk nilai idealitas yang berupa kemajuan, kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan yang dengannya ajaran agama (apa pun agamanya) bisa dijalankan secara nyaman dan tenang. Dahulu para tokoh bangsa Indonesia juga melakukan hal yang sama di saat pihak lawan baik penjajah maupun pemberontak hanya paham logika kekuatan pisik, bukan kekuatan logika. Untuk saat ini, pemuda milenial tidak perlu bertempur secara pisik, cukup "bertempur" alias berdebat di medsos dengan jujur, bernalar dan beradab.

Dengan demikian, galaunya sebagian pemuda milenial pada hakekatnya adalah baik dan suci karena berasal dari fitrah manusia yang berupa keinginan perdamaian dan kerukunan dalam bermasyarakat. Namun pemuda milenial harus siap terjun untuk "bertempur" entah defensif

atau ofensif untuk menghadapi para elit oportunis politik beserta pengikutnya. Pemuda milenial juga mempunyai tugas lain berupa pendampingan sesama pemuda milenial yang terkena virus di atas, atau pendampingan kepada pemuda milenial yang merasa berjuang untuk agama, tapi kurang awas membaca konstelasi yang terjadi. []

MELURUSKAN JARGON PERSATUAN UMAT

BAGI PEMUDA milenial, memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan adalah selangkah lebih maju dibanding para elit pragmatis, permisif dan destruktif yang mengabaikan hal tersebut. Namun persatuan yang dimaknai oleh pemuda milenial terkadang bias, bahkan eksklusif. Tidak sedikit komentar di medsos dari pemuda milenial yang kalau diringkas menjadi kalimat, "Janganlah sesama muslim bertengkar, bersatulah umat Islam, jangan ciptakan perbedaan. Kalau bertengkar, nanti yang untung adalah musuh kita dari agama lain." Statemen tersebut perlu dipetakan lebih lanjut.

Memaknai persatuan umat Islam dengan arti tidak boleh ada perbedaan adalah kekeliruan memahami perbedaan. Pada hakekatnya perbedaan adalah rahmat yang diberikan Tuhan. Tanpa ada perbedaan, perkembangan tidak akan terjadi. Perbedaan akan menjadi laknat apabila disertai pemaksaan, dibarengi hoax dan tidak berjalan dalam sinaran nalar yang sehat. Untuk itu, persatuan hendaknya dimaknai dalam kerangka menghargai perbedaan.

Persatuan Islam bukan berarti bersatu dalam segala hal. Pasti hal itu mustahil. Karena keberagaman atau perbedaan memang sudah inheren dalam diri manusia dan dalam realitas historis. Untuk itulah dengan keberagaman ini kita ber*ukhuwwah Islamiyyah* (bersaudara sesama umat Islam). Umat Islam bersaudara dalam perbedaan. Gus Dur (*Dialog: Kritik dan Identitas Agama,* 1993) menjelaskan, Islam datang ke Indonesia dalam bentuk heterogen. Para pembawanya ada pedagang, utusan politik, dan para sufi. Heterogenitas para pembawa Islam akan berimplikasi terhadap cara "beragama" pengikutnya. Heterogenitas juga tampak dari gelar para penguasa muslim di nusantara; mulai dari *Syah* (pengaruh Asia Tengah, dan Persia), *Al Malikus Shaleh* (pengaruh dinasti Ayyubid), dan *Sultan* (pengaruh India dan Baghdad).

Karena heterogenitas sudah merupakan *sunnatullah*, maka bersaudara berarti siap menerima perbedaan. Perbedaan harus ditoleransi, dengan demikian dilarang gampang mengkafirkan, memusyrikkan, dan membid'ahkan. Selain itu harus menghargai kesepakatan yang telah dibuat para pendahulu terutama bila dikaitkan dengan negara. NKRI adalah hasil kesepakatan. Kalau tidak bisa berpegang teguh dengan prinsip di atas, maka yang terjadi terhadap pemuda milenial muslim adalah friksi tajam yang bisa berakhir hingga ke peristiwa yang tidak terbayangkan.

Hal lain yang harus diluruskan juga adalah penciptaan embel-embel musuh Islam dengan dipahami bahwa musuh itu adalah pemeluk agama lain. Statemen ini membahayakan karena bisa mengulang kisah kelam masa lalu. Dahulu masyarakat Eropa pernah menganggap Islam

sebagai musuh. Azyumardi Azra (*Pergolakan Politik Islam*, 1996) menjelaskan tentang citra standar masyarakat Eropa tentang Islam sebagai Anti-Kristus dan agama yang disebar dengan kekerasan dan senjata. Seiring perkembangan zaman, citra tersebut semakin terkikis karena disadari efek negatifnya oleh bangsa Eropa, walaupun individu yang anti Islam tetap saja ada, tapi sudah minoritas.
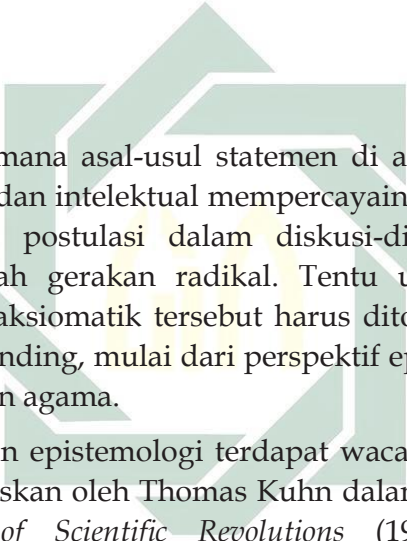
Tentu pemuda milenial muslim tidak boleh meniru masa kelam di Eropa tersebut. Pemuda milenial harus lebih cerdas dengan tidak terpengaruh oleh doktrin yang disemaikan oleh sebagian elit dan guru bahwa non-muslim adalah musuh. Kalau hal itu terjadi, maka langkah mundur bagi rakyat Indonesia, sekaligus kemunduran bagi peradaban dunia.

Terlebih lagi dalam ajaran para tokoh agama, selain terdapat persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islamiyyah*), juga ada persaudaraan sesama anak bangsa (*ukhuwwah wathaniyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah basyariyah*). Penghargaan terhadap sesama manusia ditunjukkan Nabi saat ada mayat Yahudi digotong di jalan. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Mereka yang bukan saudaramu seiman, adalah saudara dalam kemanusiaan."

Dengan demikian, hendaknya menghindari cara pandang bahwa non-muslim di Indonesia adalah musuh yang harus dibasmi. Untuk itu, para elit tidak mengipasi kepada pemuda milenial dengan isu-isu negatif. Pemuda milenial adalah bagian dari kita, anak turun kita, pelanjut Indonesia untuk menjadi jaya. []

IDEOLOGI TIDAK BISA DIUBAH?

ENTAH DARI mana asal-usul statemen di atas. Namun beberapa tokoh dan intelektual mempercayainya sehingga seakan menjadi postulasi dalam diskusi-diskusi yang menggamit ranah gerakan radikal. Tentu ujaran yang telah dianggap aksiomatik tersebut harus ditolak dengan argumen pembanding, mulai dari perspektif epistemologi, realitas sosial dan agama.

Dalam kajian epistemologi terdapat wacana *paradigm shift* yang dicetuskan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menunjukkan, paradigma bisa bergeser dan berubah selanjutnya berganti paradigma baru. Pembuktian lain dapat juga membaca analisis dekonstruksi ala Derrida, dan masih banyak lagi wacana yang ditelorkan tidak hanya oleh intelektual Barat, tapi juga dari Timur Tengah seperti Arkoun, Al Jabiri, Nasr Abu Zaid dan lain-lain.

Walhasil, ideologi bisa diubah. John B. Thompson dalam karyanya *Studies in the Theory of Ideology* (1984) di pengantarnya menjelaskan tentang arti ideologi bisa berupa

neutral conception maupun *critical conception of ideology*. Merunut penjelasan Thompson, dapat disimpulkan bahwa ideologi bisa dibangun dan dibongkar.

Tidak hanya dalam perspektif epistemologi. Dalam studi agama, terdapat nomenklatur yang disebut dengan dakwah. Dakwah berfungsi sebagai sarana melakukan transformasi dalam segala arasnya, mulai dari perilaku, amal ibadah, akhlak, keyakinan, hingga cara berfikir. Banyak teks suci yang mendedah hal tersebut.

Demikian juga dalam realitas masyarakat, dapat dijumpai konversi dalam beragama. Tercatat pula seseorang yang dulu menjadi simpatisan PKI berubah menjadi warga NU. Demikian juga banyak pengikut HTI yang hijrah menuju pangkuan NKRI.

Asumsi bahwa ideologi yang menempel pada seseorang tidak bisa diubah adalah *missing link* cara memahami ideologi. Meminjam Althusser bahwa yang tidak berubah itu hanya kenyataan bahwa setiap orang pasti berideologi (lama ataupun baru). Kekeliruan asumsi ini bisa berakibat pada '*collateral damage*' yang berupa pelestarian stigma negatif yang terus menerus hingga ke anak cucu dari orang yang pernah meyakini ideologi tertentu. Entah orang tersebut dari kelompok kiri seperti keturunan PKI, maupun kelompok kanan seperti keturunan DI/TII dan NII. []

MENUJU KAUM MILENIAL YANG MODERAT

Sidang di pengadilan Tata Usaha Negara awal tahun lalu, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) kalah. Selanjutnya HTI melakukan banding tapi juga kalah, lalu melakukan proses kasasi dan tetap kalah. Dalam hal ini pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi pendekatan kepada para *khilafers*, secara khusus bagi aktivis milenialnya.

Jelas, penanganan untuk aktivis *khilafers* berbeda dibanding dengan aktivis eks-PKI. Mantan anggota PKI saat itu turut bubar karena banyak yang diekskusi. Hanya tersisa sedikit, itupun masuk penjara. Adapun *khilafers* tidak ada yang diekskusi, masih hidup bebas sebagai warga negara, bahkan yang menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tetap bekerja seperti biasa. Tentu realitas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada upaya pendekatan agar mereka kembali mengakui NKRI dan ikut membangun Indonesia serta tidak membuat jaringan di bawah tanah untuk memperbesar anggotanya. Sekalipun pemerintah telah menjalankan program deradikalisasi, namun secara khusus masih perlu melakukan pendekatan kepada para *khilafers* untuk 'meruwat' *mindset* ideologinya.

Pendekatan Dialogis

Pembubaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap HTI adalah langkah yang tepat dari sisi hukum. Hanya saja bagi pemerintah tidak boleh berhenti di 'stasiun' pembubaran ini. Kalau di Timur Tengah dan Asia Tengah saat organisasi Hizbut Tahrir dilarang, maka para pentolan aktivisnya ditangkap, dipenjara, bahkan diekskusi. Hizbut Tahrir sendiri mengakui banyak aktivisnya yang dipenjara dan dibunuh seperti dijelaskan dalam situs, majalah dan buku mereka, semisal buku resmi Hizbut Tahrir yang berjudul *Al-Ta'rif* (2010). Pemerintah Indonesia yang moderat tentu tidak melakukan hal tersebut, juga tidak membuat peraturan untuk menangkap, memenjarakan dan mengekskusi aktivisnya, karena bukan diktator. Walaupun pembela hukum HTI di pengadilan menulis buku *Perjuangan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia melawan Rezim Diktator Konstitusional* (2018). Sudah dapat dipastikan bila Hizbut Tahrir mempunyai khilafah, maka penentangnya akan bernasib tragis.

Karena aktivis *khilafers* masih bebas di seluruh Indonesia walaupun mereka menentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia, maka penting melakukan strategi lain sebagai pendekatan. Pendekatan penting kepada *khilafers* dari generasi milenial adalah anjuran agar mereka mau berkontemplasi dan melakukan refleksi terhadap sepak terjangnya selama ini. Semisal dengan mengalkulasi apakah tujuan utama penegakan khilafah telah tercapai? Apa dampak dari upaya penegakan khilafah saat ini? Lihat di Suriah, Libya, Mesir, dan Indonesia.

Dalam kaitan dengan negara-negara tersebut, Hizbut Tahrir ingin menunggangi kasus politik yang sedang memanas, akan tetapi Hizbut Tahrir malah ganti ditunggangi pihak lain, akhirnya semua umat dan rakyat rugi baik harta maupun nyawa. Kalau masih dijawab bahwa hal di atas sebagai resiko perjuangan mendirikan khilafah, tentu jawaban itu hanya doktrin yang rapuh basis argumen dan tidak konsisten dengan strategi penegakan khilafah yang mereka konstruksi dalam kitab yang berjudul *Manhaj Hizb al-Tahrir* (2009).

Selain anjuran di atas, bagi pemerintah perlu melakukan pendekatan dialogis. Pendekatan ini bukan mengarah kepada pengumpulan massa aktivis *khilafers* di suatu lokasi, lalu diajak debat. Forum ini sulit terwujud karena akan banyak kendala psikologis maupun politis.

Maksud dari pendekatan dialogis di sini adalah upaya membangun wacana balik atau kontranarasi di ruang publik yang hal ini berguna untuk memberi gambaran utuh kepada generasi milenial aktivis *khilafers* bahwa Islam yang diajarkan dalam kitab-kitab otoritatif milik HTI adalah hasil konstruksi atau olahan dari pendiri Hizbut Tahrir. Jadi tidak otomatis sama dan identik dengan Islam itu sendiri. Semisal kitab *Nizam al-Islam* (2001) karya Taqiyuddin an-Nabhani yang mengkonstruksi Islam lebih ke arah politik, yakni Islam politik. Taqiyuddin an-Nabhani mengurai tentang ideologi atau mabda' yang selanjutnya dikontraskan dengan ideologi politik lain yang ada di dunia seperti kapitalisme dan komunisme. Jadi menurut Taqiyuddin an-Nabhani, di dunia ini hanya ada tiga ideologi; Islam, kapitalisme dan komunisme.

Paparan tersebut dapat disimpulkan "wajah" Islam ala Hizbut Tahrir sangat kental dengan nuansa Islam politik. Kentalnya penonjolan Islam politik dapat ditelusuri dari buku-buku otiritatif lain milik Hizbut Tahrir yang hampir semuanya dikaitkan dengan Islam politik. Teringat sewaktu masih menjadi anggota Hizbut Tahrir, banyak kritikan dari pihak aktivis Islam diluar Hizbut Tahrir, bahwa HT dianggap kering spiritual karena fokus politik.

Dari sini dapat dibedah narasi yang mengkonstruksi Islam politik Hizbut Tahrir. Pembongkaran ini untuk mencerahkan nalar para *khilafers* dari indoktrinisasi yang dilakukan dalam forum kajian atau *halaqah* mereka. Islam yang diajarkan kepada mereka inilah yang perlu dijelaskan untuk selanjutnya bias membetot narasi Islam politik ala Hizbut Tahrir yang mengakar dalam alam bawah sadar mereka.

Tidak hanya masalah ideologi yang berupa Islam politik, derivasi dari Islam politik ala HTI yang berupa konsep khilafah secara otomatis juga merupakan konstruksi Taqiyuddin an-Nabhani dan para pimpinan Hizbut Tahrir setelah an-Nabhani. Pembuktian paling gampang dari statemen tersebut bisa dengan mengkomparasikan struktur dan alur argumen konsep khilafah yang diajarkan dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir dengan semisal kitab Imam al Mawardi yang berjudul *al Ahkam al-Sultaniyyah*. Dapat dipastikan konstruksinya tidak sama dan berbeda. Belum lagi kalau dikomparasikan dengan konsep *wilayatul faqih* model Iran, atau model kerajaan ala Arab Saudi, yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan.
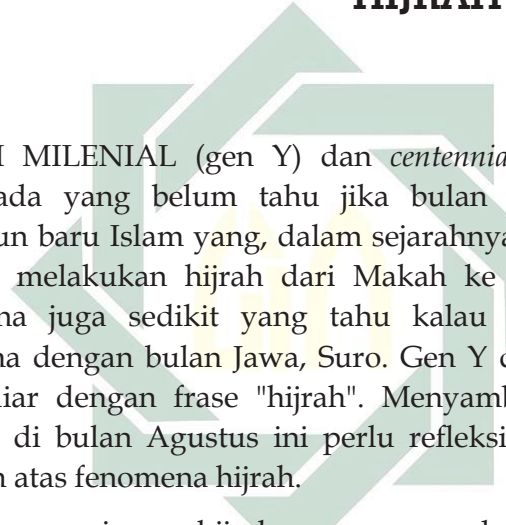
Dengan demikian, monopoli pemikiran khilafah ala Hizbut Tahrir yang selalu digaungkan sebagai ajaran Islam bisa dipatahkan, dan untuk selanjutnya tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Terlebih kalau menggunakan kaidah fiqih yang dipegang oleh Hizbut Tahrir seperti yang dikutip dalam kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (2005) yang tertulis kaedah "Suatu ijitihad tidak bisa diganti dengan ijtihad yang lain". Dalam relasi ini, NKRI yang merupakan hasil ijtihad para ulama tentu tidak bisa digugurkan dan diganti dengan ide khilafah yang merupakan hasil ijtihad para tokoh Hizbut Tahrir.

Pembongkaran wacana ideologi Islam politik yang melahirkan konsep khilafah yang khas ala Hizbut Tahrir inilah yang perlu didialogkan dengan generasi milenial aktivis *khilafers*. Di antara sasaran dialog adalah para rohis atau unit kegiatan Islam di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa menggandeng berbagai elemen ormas Islam dan para intelektual. Selain itu, perlu juga menyuarakan kontranarasi secara terus menerus di dunia maya agar sampai ke telinga dan mata para aktivis *khilafers*. []

DARI MALAHIJRAH MENUJU HIJRAH CINTA

GENERASI MILENIAL (gen Y) dan *centennial* (gen Z) mungkin ada yang belum tahu jika bulan Muharam adalah tahun baru Islam yang, dalam sejarahnya dihitung sejak Nabi melakukan hijrah dari Makah ke Madinah. Sebagaimana juga sedikit yang tahu kalau Muharam adalah sama dengan bulan Jawa, Suro. Gen Y dan gen Z lebih familiar dengan frase "hijrah". Menyambut tahun baru Islam di bulan Agustus ini perlu refleksi terhadap pemaknaan atas fenomena hijrah.

Era sekarang, jargon hijrah memang marak mewarnai kehidupan sosial-keagamaan, bahkan ekonomi dan politik. “Manifestasi” hijrah bisa dirunut dari yang paling superfisial seperti cara berkomunikasi dengan memakai diksi kata tertentu. Semisal, panggilan ke sesama dengan kata-kata *akhi* (saudara), *ukhti* (saudari), *antum* (anda). Demikian pula pelabelan pada produk atau perilaku dengan *syar'i* (kompatibel dengan syariat), pun dalam *ngaji* atau taklim menamainya dengan *liqa', halaqah, daurah*, dan *jalsah*. Tidak ketinggalan, tampilan pisik baik pakaian maupun

"ornamen" seputar wajah menjadi "destinasi" sentral bagi para penghijrah. Walhasil hijrah akan melahirkan beberapa konsekuensi ikutan yang "berbau" agama.

Misinterpretasi dan Anomali Hijrah

Mayoritas "*stakeholders*" hijrah kontemporer sudah beranjak memaknai hijrah bukan lagi harus berupa pergerakan pisik menuju ke suatu tempat tertentu, seperti ajakan "pelanjut" NII/DI/TII Kartosuwiryo maupun agitasi gerombolan ISIS/DAESH untuk pindah ke negara khilafah di Suriah dan Irak. Namun yang menjadi problem adalah saat mereka mengaku berhijrah, lalu diikuti upaya mengalienasi diri, atau berperilaku eksklusif. Sikap dan perilaku demikian potensial mengarah tersemainya benih intoleran dan radikal.

Tentu motif hijrah pindah tempat maupun hijrah alienatif di atas tidak sama dengan apa yang dijelaskan Nurcholish Madjid dalam magnum opusnya *Islam Doktrin dan Peradaban* (1995). Madjid menegaskan, kelompok pesantren mempunyai semangat pengucilan. Tapi pengucilan dari kolonial yang terbukti mampu menjadikan pesantren sebagai pesaing sekolah formal kolonial. Bahkan pesantren menjadi "r*eservoir*" terpenting kesadaran kebangsaan dan patriotisme.

Ada juga model hijrah tidak matang yang terbaca dari sikap jumawa dengan merasa paling *syar'i.* Semisal saat sebelum hijrah dia merasa pendosa entah karena jarang shalat, tidak berhijab, atau tanpa berjenggot dan lain-lain, tapi setelah hijrah merasa otoritatif dan dekat dengan Allah yang hal itu terindikasi dan terdeteksi dari ucapan dan

tingkah lakunya yang gampang memberi stigma negatif ke *liyan* yang berbeda

Saat ini marak investasi dan bisnis bodong karena tergiur keuntungan cepat dan tinggi. Tercatat, investasi ilegal tahun 2016 sebanyak 71 kasus, tahun 2017 sebanyak 80 kasus, tahun 2018 sebanyak 108 kasus, dan tahun 2019 naik drastis sebanyak 444 kasus. Beberapa investasi bodong telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti *Ghaniyyu100, PT Kawasan Kurma Indonesia,* dan investasi *MeMiles* yang membuat geger pada awal tahun 2020 karena nominal yang besar dengan ratusan ribu nasabah. Atau juga *PT Kampoeng Kurma* yang berlabel syariah dengan janji akan dibangun masjid, pesantren dan pacuan kuda. Modus di atas akan semakin mulus -karena melemahkan deteksi akal kritis- apabila para penipu menggunakan nomenklatur syariah yang berjalin kelindan dengan "balutan" hijrah. "Menjual" hijrah dengan berbagai turunannya untuk penglaris bisnis dengan menawarkan berbagai produknya adalah "hijrah" model kapitalis, karena tuntutan pasar bukan motif agama. Di atas adalah wajah lain dari anomali hijrah.

Berbagai malahijrah di atas menodai makna hijrah dan bisa membuat petaka dalam kehidupan sosial, politik dan agama. Demikian pula pada sisi lain bersifat paliatif atau hanya meringankan beban mental penghijrah yagn sebekumnya "galau" tapi bersifat menipu (*deceptive*). Munculnya model hijrah di atas selain karena ada pihak yang memanfatkan untuk bisnis dan politik, juga disebabkan pelaku hijrah tidak menggunakan pertimbangan nalar yang matang.

Dalam dunia *marketing* dikenal apa yang dalam psikologi disebut dengan *impulse buying,* yakni keinginan untuk membeli tanpa pertimbangan yang matang. Penyebabnya kata David Levis dalam bukunya *Impulse: Why We Do What We Do Without Knowing Why We Do It* (2013) karena jaringan bisnis besar telah meningkatkan seni dan ilmu persuasi hingga ke derajat yang sebelumnya tak terbayangkan. Demikian pula dalam konteks hijrah, muncul yang saya namakan dengan "impuls beragama", artinya pada saat seseorang timbul kesadaran untuk menjadi pribadi saleh, lalu datang tawaran hijrah yang kuat mempengaruhinya baik dari lingkungan maupun medsos dan televisi, maka dengan cepat akan dipilihnya tanpa menalar kritis dan berdiskusi dulu dengan ahli agama.

Kalau sudah demikian, karena beragama adalah naluri manusia, maka mereka akan mudah mengikuti impuls dari naluri tersebut. Repotnya lagi, kalau naluri sudah berada di garda depan, maka "akal" pun akan menjadi *follower*nya, bukan sebagai suluh yang kritis.Tentu kalau hijrah bersifat demikian, hasilnya berbanding lurus dengan hijrah ikut-ikutan karena tren yang muncul, sama-sama tidak substansial dan potensial menyimpang.

Hijrah Beralas Cinta
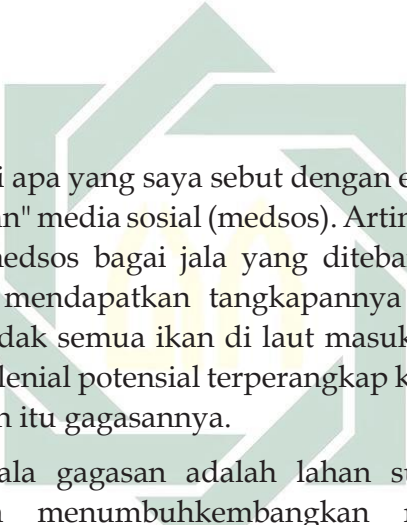
Gen Y dan gen Z yang di antara cirinya adalah kritis dan suka diskusi pasti akan muncul pertanyaan, apakah setelah hijrah justeru merasa terkerangkeng oleh pemahaman sendiri dengan memandang pihak lain kotor dan bercela. Tentu ini pemahaman yang tidak "asyik". Seharusnya generasi milenial di saat hijrah tetap punya prinsip, tapi tetap terbuka wawasan dan pergaulannya.

Cara yang demikian akan menjadikannya sebagai pemeluk agama yang membebaskan baik bagi diri maupun orang lain, bukan malah menjadi pemeluk agama yang membelenggu diri dan orang lain. Kalau sudah seperti itu, mereka masuk dalam katagori beragama dengan cinta seperti penjelasan KH Husein Muhammad tentang Rumi dalam bukunya *Kaidah Cinta dan Kearifan* (2019).

Berhijrah dengan beralas cinta pasti konstruktif, karena mereka berpijak pada sabda Nabi tentang (ber)agama yang paling dicintai Allah dengan karakter *al-hanifiyyah al-samhah.* Dalam kitab monumental *Fathul Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani dijelaskan *al-hanifiyyah al-samhah* adalah kecenderungan kepada kebenaran dan kemudahan. Maknanya kita harus berjiwa cinta kepada kebenaran tapi tetap moderat (*tawassuth*), tidak mempersempit dan mempersulit dalam mengamalkan agama, dan berlapang dada atau *nyegoro* terhadap perbedaan. Hijrah yang demikian akan mampu menerjemahkan ajaran universal Islam yang "ramah" dengan liyan dan lingkungan supaya memberi manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. []

KOMODIFIKASI RADIKALISME DI ERA DISRUPTIF

SAAT INI terjadi apa yang saya sebut dengan era tebar jala gagasan di "lautan" media sosial (medsos). Artinya, gagasan disebar lewat medsos bagai jala yang ditebar ke tengah lautan. Potensi mendapatkan tangkapannya pasti lebih banyak walau tidak semua ikan di laut masuk perangkap jala. Generasi milenial potensial terperangkap ke dalam jala gagasan, apa pun itu gagasannya.

Era tebar jala gagasan adalah lahan subur untuk menyemai dan menumbuhkembangkan radikalisme. Pengemban panji radikalisme menyadari hal tersebut sehingga terlibat ikut "kontestasi" di dunia maya. Dengan demikian, tidak aneh bila pada tahun 2019 ini ditemukan fenomena baru, atau bidah dalam radikalisme, yakni ikrar kesetiaan atau baiat kelompok radikal yang dilakukan melalui online.

Radikalisme di Era Disruptif

Kenyataan radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah berbahaya sudah dimaklumi. Potensi bahayanya

akan semakin besar di saat gagasan tersebut berjalin kelindan dengan fenomena populisme Islam. Radikalisme yang menunggangi populisme Islam dan disebarkan di dunia maya lalu bertemu atau diramu dalam "bejana" *firehose of falsehood*, tentu daya pikat dan daya "destruksinya" lebih kuat dan masif.

Dalam kondisi demikian, dunia maya melahirkan fakta yang aneh, ganjil, tidak masuk akal, tapi nyata. Fakta tidak masuk akal tersebut antara lain adalah matinya kepakaran seseorang seperti ditulis oleh Tom Nichols dalam bukunya *The Death of Expertise* (2017). Fenomena "pengebirian" keahlian seseorang yang telah diakui otoritas keilmuannya yang dilakukan oleh mereka yang bukan pakar dengan berpetualang di medsos. Kasus penolakan imunisasi dengan alasan siasat Yahudi adalah buktinya.

Terkait dengan radikalisme agama, matinya kepakaran dapat dicontohkan fenomena ustad dadakan yang selalu bicara khilafah, jihad, hijrah dan sejenisnya malah lebih diakui otoritasnya daripada ulama yang telah belajar di kampus agama otoritatif maupun pesantren karena kekuatan penggunaan medsos. Fenomena yang bernuansa "tipuan" ini mirip nubuat Nabi Muhammad tentang apa yang disebut dengan *ruwaibidlah*, yakni munculnya seorang yang bodoh tapi percaya diri bicara apa pun di muka umum dan absurdnya, dipercaya oleh orang lain.

Di saat demikian, muncul fenomena lain, yakni kematian kebenaran. *The death of truth* (kematian kebenaran) dalam tulisan Michiko Kakutani (2018) sebenarnya mengkaji matinya kebenaran dikaitkan dengan statemen-statemen Donald Trump. Sekalipun demikian, fenomena di

atas juga ditemui di negara lain. Matinya kebenaran karena kebenaran terkubur, tidak berharga atau tidak dihargai lagi karena bisa jadi diragukan bahwa hal itu hakekatnya adalah benar akibat arus kuat *firehose of falsehood* yang menggiring opini. Dalam aras yang demikian, radikalisme agama juga bisa ikut "berkontestasi" dengan misinya, atau dijadikan wahana tunggangan oleh kelompok elit yang membutuhkannya.

Komodifikasi dan Kapitalisasi Radikalisme

Di antara problem politik yang sudah lama dibincangkan adalah komodifikasi agama untuk kepentingan politik dan bisnis. Namun ada sisi lain yang saya sebut dengan komodifikasi radikalisme. Radikalisme dikomodifikasi dan dikapitalisasi untuk kepentingannya. Santer terdengar bahwa di antara elit ada yang memelihara kelompok radikal untuk kepentingan politiknya. Dalam tingkat global, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Abu Bakar Al Baghdady adalah "*a US creation*" atau "buatan" Amerika. Jauh sebelumnya (2016), Trump menuduh Obama yang menciptakan ISIS. Artinya, Al-Baghdadi digunakan Amerika untuk kepentingannya.

Dalam tingkat nasional, salah satunya Front Pembela Islam (FPI) dimanfaatkan elit politik. Pemanfaatan FPI oleh elit seperti diungkap Ian Douglas Wilson penulis buku *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru* menceritakan tentang Front Pembela Islam (FPI) sekitar tahun 1998/1999. FPI saat itu dirangkul oleh beberapa elit dari TNI, dalam konteks Pamswakarsa. FPI dan kelompok lain didayagunakan untuk menghalangi

gerakan reformasi mahasiswa. Di sini aparat memelihara sekaligus bermain api dengan radikalisme.

Komodifikasi radikalisme juga terjadi saat pemilihan presiden 2019 ini. HTI dan FPI yang selalu mendengungkan muatan agama selama pilpres “digunakan” beberapa elit politisi untuk membantu memenangkan pilpres. Saat pilpres berlangsung, dapat disaksikan bagaimana kelompok ini getol melakukan banyak manuver berbungkus agama. Sekalipun pada akhirnya calonnya gagal dalam kontestasi pilpres, dan justeru akhirnya bersatu dengan Jokowi. Hal ini patut disyukuri karena bisa menyatukan.

Bentuk lain dari komodifikasi dan kapitalisasi radikalisme adalah kemungkinan pemanfaatan isu radikalisme. Tujuannya antara lain adalah untuk keberlanjutan “proyek” yang mereka tangani. Perilaku "industrialisasi" radikalisme seperti ini tentu tercela, berbahaya dan naif.

Tidak kalah naifnya di saat terjadi tindakan terorisme di Indonesia, lalu muncul beberapa spekulasi seperti asumsi bahwa negara ikut terlibat. Kalau asumsi itu bisa dibuktikan bahwa kasus-kasus bom bunuh diri adalah buatan negara, tentu akan membantu mengurai dan memperjelas sisik melik terorisme yang terjadi di era reformasi. Walakin, kalau hanya asumsi semata yang kemudian viral dan mempengaruhi opini publik, maka hal itu juga bisa beresiko negatif. Teroris untung dan secara tidak sadar kita ikut terlibat menyemai, memelihara dan membela kelompok teroris.

Pada prinsipnya, upaya komodifikasi dan kapitalisasi radikalisme dan terorisme adalah tidak bijak, emosional

dan wujud dari pendek nalar. Masih banyak isu lain yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik yang positif. Mengkapitalisasi dan mengkomodifikasi radikalisme, dampaknya dapat menggoyahkan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berakibat mundur ke belakang di saat generasi milenial sedang menatap ke depan.

JIHAD PALSU DAN JIHAD OTENTIK

JIHAD DALAM Islam adalah sarana restorasi menuju keadilan dan kedamaian. Sayangnya, terjadi upaya pengebirian dan pengkerdilan makna jihad oleh sebagian kecil masyarakat kita, terutama saat pra dan pascapilpres 2019 lalu.

Khazanah Wacana Jihad

Jihad dalam kitab kuning yang secara khusus membahas politik, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya al-Mawardi dimaknai sebagai peperangan melawan kelompok paganisme atau musyrik (al-Mawardi tidak menyebut kaum kafir), *ahlur riddah*, kelompok makar, dan kelompok pengganggu keamanan negara. Untuk kelompok makar ini al-Mawardi mengidentifikasi di antaranya adalah faksi yang menentang pendapat politik mayoritas muslim dengan menciptakan pemikiran politik sendiri dan masih taat kepada kepala negara. Golongan makar yang demikian tidak boleh diperangi. Akan tetapi jika mereka mempromosikan pemikiran makarnya di depan umum dan sulit disadarkan, maka negara bisa menjatuhkan hukuman, tapi tidak boleh

sampai hukuman mati. Baru boleh diperangi bila mereka tidak taat kepada kepala negara, tapi justeru menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri.

Hizbut Tahrir (HT) mengelaborasi makna jihad lebih rigit dan "primitif". Dalam kitab *Ajhizah fi Dawlah al-Khilafah* dijelaskan bahwa jihad adalah metode untuk dakwah ke manca negera. Dalam buku *Al-Ta'rif*, HT menjelaskan bahwa memulai jihad walau musuh belum menyerang adalah fardlu kifayah. Tapi jika musuh sudah menyerang, maka fardlu ain. Selanjutnya apabila tidak ada kaum muslim yang memulai jihad, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Jadi, bagi HT, tiada hari tanpa ekspansi atas nama jihad untuk dakwah.

Selanjutnya HT menyimpulkan bahwa jihad adalah ofensif, bukan defensif. Jihad ofensif ini harus dilakukan sekalipun orang kafir tidak sedang menyerang Islam. Jihad sasarannya adalah *darul kufur* (negara kufur) atau *darul harbi* (negara yang bisa diperangi). Bagi HT, seluruh negara di dunia saat ini, termasuk NKRI adalah *darul kufur* walau penduduknya muslim. *Darul kufur* dengan penduduk mayoritas muslim yang ada saat ini harus disatukan dalam bentuk khilafah baik dengan sukarela maupun dengan jihad.

Pemaknaan jihad yang ekspansif dan ambisius di atas berbeda dengan formulasi Murtadha Muthahhari. Dalam buku *Falsafah Pergerakan Islam,* Mutahhari menjelaskan falsafah jihad adalah untuk mempertahankan hak dan melawan suatu agresi semisal wilayah kita diduduki negara lain, atau mereka hendak merampas kekayaan dan hak milik kita, atau kebebasan serta harga diri kita. Saat permulaan

Islam pun jihad adalah untuk melawan rezim penindas dan menyelamatkan orang dari perbudakan. Ayat ayat al Quran tentang jihad oleh Mutahhari diformulasi secara bagus dengan ayat jihad tak bersyarat harus digabungkan dengan ayat jihad yang bersyarat. Dari gabungan pemahaman tentang ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi jihad adalah pertahanan.

Senada dengan Mutahhari, dalam buku karya Alumni Lirboyo yang mengupas *Dimensi Doktrinal dalam Islam* dijelaskan, bila ditelaah sejarah perang yang terjadi pada masa Rasul, dapat disimpulkan, tidak satupun peperangan yang motifnya adalah *hujumi* (ofensif). Sekalipun ada yang bernuansa penyerbuan, tapi hanya sekadar taktik dan strategi perang untuk mematahkan sejak dini rencana musuh.

Jihad Palsu

Maksud dari jihad palsu adalah upaya memaknai jihad sebagai perang fisik lalu mengkorelasikan Indonesia sebagai ladang jihad. Saya pernah bertanya kepada pengamat teroris dan mantan pimpinan pusat gerakan pengusung khilafah, Harits Abu Ulya tentang fenomena bom bunuh diri. Jawabannya, mereka menganggap Indonesia wilayah perang. Pendapat seperti itu berjailin kelindan dengan ajaran kelompok radikal, NKRI adalah *darul kufur*, pemerintahan berikut aparaturnya adalah *thaghut* yang wajib diperangi.

Jihad palsu yang lain adalah memaknai jihad tidak hanya perang fisik, tapi juga perang pemikiran dengan memandang Indonesia sebagai medan perang pemikiran. Dimensi jihad palsunya adalah saat mengkonstruksi perang pemikiran lalu mereka "racik" dengan hadis Nabi

yang disalahpahami, “Perang itu tipu muslihat.” Dengani demikian, bagi mereka, dalam upaya memenangkan perang pemikiran ini absah melakukan tipu muslihat. Di antara muslihat yang dianggap absah adalah propaganda dengan menyebar hoaks untuk melumpuhkan lawan. Bahkan adu domba terhadap lawan akan dianggap boleh karena merupakan jihad dengan bingkai hadis di atas.

Maka tidak aneh bila Jamaluddin Mohammad menceritakan dalam islami.co adanya seorang terdidik yang aktif mengirim berita-berita hoaks di hampir semua group medsos yang ia ikuti. saat diingatkan oleh kawannya bahwa berita-berita yang disebar adalah hoaks, dia justeru menanggapi, “Saya tahu. Sekarang kita sedang berperang. Dalam perang apa pun boleh dilakukan.”

Kelompok seperti ini telah kehilangan basis historis dan filosofis tentang jihad. Jihad fisik (perang) yang ditujukan untuk melawan kelompok musyrik yang mau menyerang muslim dan kelompok makar serta pengacau, makna dan sasarannya diperluas secara serampangan. Penguasa muslim atau lawan politik yang hakekatnya sesama anak bangsa bisa menjadi sasaran mereka. Perbuatan menyalahi aturan maupun kejujuran bisa disingkirkan atas nama jihad yang picik.

Jihad Otentik

Kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir, ISIS dan lain-lain hanya memaknai jihad sebagai perang pisik. Ada juga di antara mereka yang memaknai jihad secara palsu. Hal ini berbeda dengan pemaknaan oleh ulama moderat. Jihad maknanya tidak hanya perang. Quraish Shihab dalam *Wawasan Alquran* menjelaskan adanya kesalahpahaman

bahwa jihad hanya dimaknai perlawanan bersenjata. Kesalahan ini antara lain karena terjamahan Al Quran tentang *anfus* yang hanya diartikan nyawa, padahal banyak makna. Lebih lanjut Shihab menjelaskan, Rasul diperintah berjihad sejak beliau di Makkah yang ini jauh sebelum adanya izin angkat senjata untuk membela diri dan agama. Perang pertama baru terjadi pada tahun kedua hijrah. Dengan demikian makna jihad lebih luas. Dengan demikian, jihad yang dalam Alquran terulang 41 kali dengan berbagai bentuknya bermakna lebih luas tidak hanya berperang, tapi bisa upaya sunguh-sungguh yang akan dihadang kesulitan untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit.

Ketua PBNU, KH Said Agil mengelaborasi empat makna jihad. *Pertama*, menyeru umat untuk beriman kepada Allah dengan iman yang argumentatif. *Kedua*, ajakan melaksanakan perintah-perintah agama. *Ketiga*, kalau umat Islam diganggu, kita boleh berperang. *Keempat,* memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat tanpa sekat agama yang memiliki kepribadian baik (www.nu.or.id). Menurut Tarjih Muhammadiyah, jihad bukanlah perang saja, melainkan juga dapat diartikan dengan bersabar, sebab sabar termasuk perjuangan yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula Muhammadiyah sejak berdirinya telah melaksanakan jihad dalam arti berjuang dengan sungguh-sungguh membela agama Islam sekalipun tidak dengan senjata (https://tarjih.or.id).

Dengan demikian, makna jihad lebih universal, progresif, humanis, dan berpijak di atas nilai keadilan serta kedamaian. Inilah jihad yang otentik. Dalam menyambut bulan Ramadhan yang sebentar lagi, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu dengan segala dimensinya.

Bersungguh memerangi syahwat perut, seksual, syahwat kuasa hingga syahwat merasa dirinya menjadi muslim yang paling yang berhak mengadili kebaikan muslim lain. Benarlah sabda Nabi, "Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah." []

THE DEATH OF EXPERTISE BERAGAMA 2020

ERA REVOLUSI industri 4.0 membawa perubahan di banyak bidang. Dunia semakin *borderless* dan mengerucut sebagai *global village* yang mudah terkoneksi dan terdeteksi melalui media daring, dunia dalam genggaman. Arus informasi dan pengetahuan yang menjadi mudah diakses ini ternyata tidak hanya memacu kebebasan berfikir, bersikap dan bertindak, tapi di sisi lain juga memicu apa yang saya sebut "pembelahan" lalu "pemagaran" beragama seorang muslim.

Media daring sebagai *free marketplace of ideas* yang dipenuhi beragam ustaz dan wacana keagamaan yang dapat diakses siapa, kapan dan dimana saja ternyata berkontribusi mengerucutkan dan memagari zona beragama generasi milenial dan *centennial,* bahkan generasi lebih awal. Pengerucutan ini sebenarnya bukan masalah, karena sebagai konsekuensi logis dari rasa *curiosity* melakukan pencarian wacana sehingga menemukan patron pemikiran yang cocok. Problemnya adalah lahirnya keciutan cara memandang perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya bukan masalah, tapi karena ciut pandang,

akhirnya gampang membeda-membedakan dan diiringi dengan menstigma liyan sebagai lawan.

Hal yang tidak disadari dari efek pembelahan dan pemagaran adalah timbulnya kelabilan beragama gen Y dan gen Z yang indikasinya adalah munculnya kecurigaan, ketakutan, putus harapan untuk hidup, dan malah pada tingkat tertentu memilih cepat mati dengan bungkus sebagai martir.

Korona, Kiamat, dan Khilafah (K3)

Korona di 2020 ini menjungkirbalikkan tata hidup, terutama tata relasi antar manusia se-dunia sehingga memunculkan banyak statemen aneh, naif dan absurd. Semisal, hadirnya lontaran teori konspirasi dan tawaran resep melawan korona seperti suntik disinfektan, makan garam, dan berjibun hoaks tentangnya.

Tidak ketinggalan, dalam beragama juga melahirkan sikap dan tindakan nyleneh. Mulai dari keyakinan bahwa korona adalah tanda akhir zaman, korona dianggap tentara Tuhan untuk memerangi China, seruan masuk tempat ibadah agar aman dari korona, kalau rutin salat bisa terhindar korona, ajakan agar jangan takut korona tapi hanya takut Tuhan saja. Ada juga yang menyatakan dengan *ruqyah*, korona bisa ambyar. Bahkan ada ustaz yang mempercayai ucapan setan yang bicara lewat medium manusia tentang korona.

Individu yang sudah terbius doktrin demikian pada umumnya sulit diajak bicara secara akal sehat. Bahkan himbauan pemerintah plus MUI agar beribadah di rumah dianggap oleh para tokohnya sebagai skenario

menyingkirkan Islam. Memang benar, terkadang ada tokoh agama yang justeru menggunakan isu agama secara tidak bertanggungjawab untuk melakukan hal berefek negatif, semisal memusuhi pemerintahan dan bahkan memusuhi kelompok yang tidak sepaham. Menarik penjelasan Najib Burhani dalam buku *Menemani Minoritas* (2019), kadang tokoh agama yang kurang terpelajar dan relatif tertutup justru menganggap bahwa dengan menghancurkan aliran atau kelompok lain yang tidak sepaham adalah kebajikan yang tinggi dan tolok ukur keimanan ditimbang dari situ.

Masih di tengah pagebluk korona, viral pesan bahwa pada tanggal 15 Ramadan berdasar huru-hara yang telah terjadi, akan ada hantaman meteor sangat dahsyat yang menyebabkan gulita 40 hari, maka perlu mempersiapkan makanan yang cukup untuk satu tahun, dan hal ini sebagai tanda kiamat. Beberapa orang yang digelari ustaz "hari akhir" atau ustaz "kiamat" mengekploitasi narasi di atas dengan cara *otak-atik matuk*. Sebelumnya pada tahun 2019 juga viral 52 warga mengungsi ke Malang karena isu kiamat.

Tanggapan netizen atas narasi kiamat karena ada oknum yang menjual isu kiamat untuk bisnis *subscribe* kanal *youtube*. Menurutnya, hal itu mempermalukan agama. Ada juga yang bertanya kenapa narasi di atas masih ada yang percaya. Tentu disebabkan efek pembelahan dan pemagaran di atas. Orang yang mempercayainya berada satu frekuensi dengan kelompok yang “nutrisi” beragamanya monoton dan terbatas. Sebenarnya telah banyak terjadi, karena “nutrisi” beragamanya monoton dan terbatas akhirnya tertipu dengan banyak hal “berbau” agama, seperti bisnis yang beralas hijrah dan syariah, komodifikasi hijrah.

Masih terkait dengan tahun 2020, dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* (2019) dijelaskan laporan dari National Intelligence Council (NIC) dalam publikasinya yang berjudul *Mapping the Global Future* (2004) dipaparkan skenario hipotetis munculnya khilafah tahun 2020 yang digagas keturunan fiksi bin Laden. Banyak tokoh eks-HTI yang menggunakan argumen pengokoh munculnya khilafah pada 2020 dengan bersandar pada prediksi NIC ini.

Seperti Ismail Yusanto yang mengkritik penulis buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* karena menolak gagasan khilafah dengan menjelaskan prediksi NIC. Yusanto mengatakan bahwa NIC yang tidak mengenal al-Quran dan hadis saja berpikir sangat rasional, futuristik dan antisipatif tentang bakal berdirinya khilafah, maka tepat bila orang-orang seperti penulis buku di atas dan siapa saja yang meragukan bakal berdirinya khilafah disebut orang telmi (telat mikir).

Ulama yang Ulama
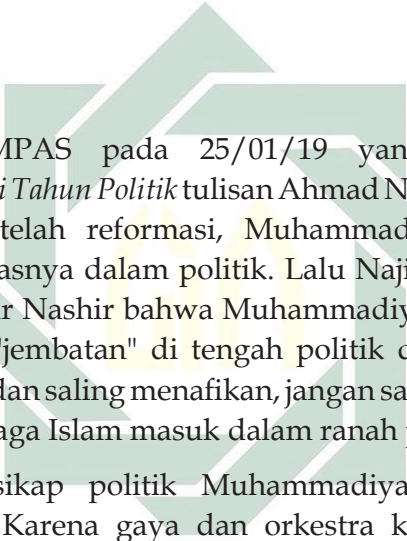
Dengan realitas di atas, akan muncul pertanyaan dari gen Y dan gen Z tentang siapa ulama yang bisa menuntun ke arah masa depan yang kompatibel dengan agama dan NKRI. Tentu jawabannya panjang, namun secara ringkas, penjelasan Rumadi Ahmad ini bisa dijadikan acuan. Saat ini muncul fenomena pasar gelap ustaz yang berasal dari *pertama*, para mualaf yang fakir ilmu keislaman tapi tiba-tiba menjadi ustaz. Dia berceramah yang kontennya biasanya menjelek-jelekkan keyakinan lamanya. Dia ingin menunjukkan sekarang sudah mendapat "hidayah". Tak lupa, menebar ketakutan, bahwa agama lamanya menjadi ancaman terhadap Islam.

Kedua, orang-orang yang dulu jauh dari Islam karena suka maksiat, kemudian berubah lebih religious dengan mengubah penampilan. Mereka menyebut diri sebagai orang yang sudah "hijrah". Modal kegelapan masa lalu dieksploitasi, seolah sekarang sudah hidup dalam terang. Dengan modal bisa pidato, punya tim media sosial untuk menaikkan popularitasnya, mereka tiba-tiba dipanggil ustaz dan dijadikan rujukan dalam beragama.

Pungkasannya, di era *post-truth* yang berkelindan dengan penyebaran *firehose of falsehood* yang dibumbui dengan narasi agama akan bisa menghasilkan salah satunya *the death of expertise,* termasuk kematian kepakaran agama. Dengan demikian, dalam kaitan dengan suluh agama, Gen Y dan gen Z perlu mencari ulama yang mencintai NKRI, tidak menebar permusuhan dan kecurigaan, dan menurut KH Musthofa Bisri, mereka selalu melihat manusia (apa pun agamanya) dengan mata kasih sayang, bukan mata curiga dan kebencian. Problem bangsa saat korona semakin bertambah, tentu kita butuh ulama yang tidak menambah kebingungan dan ketakutan, tapi membangun optimisme dan menyejukkan. []

NU DI PUSARAN PILPRES 2019

ARTIKEL KOMPAS pada 25/01/19 yang berjudul *Muhammadiyah di Tahun Politik* tulisan Ahmad Najib Burhani menjelaskan, setelah reformasi, Muhammadiyah selalu menjaga netralitasnya dalam politik. Lalu Najib mengutip pendapat Haedar Nashir bahwa Muhammadiyah memilih untuk menjadi "jembatan" di tengah politik di Indonesia yang dikotomis dan saling menafikan, jangan sampai semua ormas dan lembaga Islam masuk dalam ranah politik.

Membaca sikap politik Muhammadiyah memang lebih "mudah". Karena gaya dan orkestra kebijakannya sudah dalam "irama" yang "koordinatif". Hal ini berbeda saat membaca sikap politik Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kaitan ini, relevan menyimak statemen Robert Hefner dalam pengantar untuk buku karya Andree Feillard bahwa selama sepuluh tahun hingga saat ini, NU terlibat dalam inisiatif politik dan ekonomi, bukan malah menghindari resiko cari aman dan cari peluang, tapi justeru upaya NU banyak ditandai dengan kontroversi dan eksperimentasi yang berani. Kata kunci menghindari resiko, eksperimentasi dan

kontroversi tampaknya relatif tepat untuk menggambarkan suasana pilpres dari internal warga NU.

Cancut Taliwondo

Realitas sejarah NU dan secara khusus para elitnya, banyak bersentuhan dengan hal yang seakan eksperimental dan kontroversial. Suatu waktu di era Orde Lama, NU lekat dengan Soekarno, bahkan bisa dikatagorikan dalam lintasan yang "*vivere pericoloso*" terkait dengan akomodasi ide Nasakom, yakni campuran antara theis, nasionalis dan sosialis ala Bung Karno seperti ditulis oleh Choirul Anam dalam *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. NU Melalui Kiai Wahab Chasbullah akhirnya duduk dalam DPR-GR dan juga dalam kabinet Nasakom yang hal ini menjadikan Kiai Wahab dilabeli oleh lawan politiknya sebagai "Kiai Nasakom" (Saifullah Ma'shum ed, *Karisma Ulama*). Saat itulah dikenal jargon "*enter first; leaving is easy*" (Masuk dulu, keluar mudah) terkait dengan partisipasinya dalam DPR-GR (Greg Fealy dalam *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia)*.

Di saat lain pada era Orde Baru, seperti ditulis Andree Feillard dalam *NU vis a vis Negara,* NU menjadi oposisi. NU secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling mengkritik Soeharto, bahkan KH. Mahrus Ali, pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri mengatakan secara *bloko suto* bahwa penyerahan kekuasaan kepada Soeharto adalah "fajar dalam kegelapan". Pungkasannya, saat Muktamar terpanas NU di Cipasung 1994, elit NU dengan Gus Dur sebagai tokohnya membikin Soeharto kelimpungan karena kesulitan memahami karakter dan strategi elit NU sehingga gagal menyingkirkan Gus Dur dari tampuk kepemimpinan

di PBNU. Strategi Gus Dur ini bukan model lempang yang *predictable*, tapi zig-zag, ibaratnya zaman sekarang, "*sein ke kanan, tapi belok ke kiri*", wujud strategi yang sulit ditebak dan dijebak.

Demikian juga dalam pilpres kali ini, arus besar elit NU juga menunjukkan eksperimen yang menantang. Jajaran tertinggi dalam hierarki kepemimpinan di PBNU, maju menjadi calon wakil presiden. Namun apakah tidak ada pro dan kontra dari kalangan internal NU terkait pencalonan tersebut? Tentu dan pasti ada.

Bagi yang tidak setuju pencalonannya beralasan bahwa KH. Ma'ruf Amin adalah Rais Syuriyah PBNU yang kedudukannya lebih tinggi dari jabatan politik. Dengan demikian, tidak tepat bila dicalonkan, apalagi "sekadar" wakil presiden. Lebih dari itu, dalam sejarah NU, tidak ada rais syuriyah yang melepas kedudukannya untuk selanjutnya menjadi calon wakil presiden.

Adapun bagi yang setuju dengan pencalonannya berargumen, karena situasi saat ini muncul kelompok radikal yang turut serta memainkan isu agama di arena pilpres, dengan bukti saat terjadi demo, kelompok ini turut menumpang untuk mencapai kepentingannya. Untuk itu, KH. Ma'ruf Amin rela "menurunkan" posisinya dengan menjadi cawapres. Lebih dari itu, mencalonkan diri menjadi cawapres tidak menyalahi khittah atau aturan yang ada di AD/ART NU, karena KH. Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai Rais Am PBNU setelah dicalonkan sebagai cawapres. Tentu argumen yang pro maupun yang kontra tidak hanya terbatas di atas, dan masing-masing argumen bisa diperdebatkan.

Tampaknya para kiai sepuh NU pun juga bergerak pada aras yang sama dengan menyatakan dukungan baik secara tertutup maupun terbuka kepada KH. Ma'ruf Amin. Para kiai sepuh NU tersebut diantaranya, KH. Anwar Manshur (pengasuh pesantren Lirboyo), KH. Zainuddin Djazuli (pengasuh pesantren Al Falah), KH. Anwar Iskandar (Pengasuh Pesantren Al Amin), KH. Abuya Muhtadi Dimyathy (pengasuh pesantren Raudlatul Ulum), serta KH. Miftahul Akhyar (saat ini menjadi Rais Am PBNU menggantikan KH. Ma'ruf Amin). Keputusan yang bagi pihak eksternal akan dianggap berani dan kontroversial yang biasanya akan dibuat pengandaian, bagaimana bila KH. Ma'ruf Amin kalah. Tampaknya masalah hasil (kalah dan menang) menjadi hal lain, karena bagi mereka, kondisi saat ini mengharuskan turun cancut taliwondo dengan pertimbangan politik kebangsaan dan keumatan yang *wasatiyyah* (moderat). Inilah *point of view* yang tidak bisa diabaikan dari sekian pertimbangan politik yang ada.

Konsiderans misi politik keumatan dan kebangsaan yang *wasatiyyah* ini terafirmasi dengan konfirmasi KH. Ma'ruf Amin setelah ada sinyalemen Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bahwa kelompok radikal sudah masuk ke salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019. KH. Ma'ruf Amin lalu menegaskan bahwa pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf tidak menampung kelompok radikal tersebut, bahkan menyatakan bahwa Pilpres 2019 sebagai momentum pertaruhan menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan bangsa karena adanya gerakan radikalisme dan gerakan transnasional yang ingin mengganti sistem politik. Entah terkait dengan isu di atas atau tidak, baru-baru ini Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pasangannya

menerima seluruh dukungan untuk kakaknya, Prabowo Subianto termasuk anak turun simpatisan PKI. Terkait dengan FPI dan HTI, Hasyim menjelaskan bahwa mereka menawarkan dukungan kepada Prabowo.

Horizon Politik Kebangsaan NU

Mungkin akan muncul pembacaan bahwa orientasi politik NU (lebih tepatnya elit dan warga NU) membingungkan karena tidak konsisten dan justru menjadi bagian dari problem, tidak menjadi katub pengaman friksi politik saat ini. Pembacaan bahwa NU inkonsisten adalah kurang tepat, karena memang tidak ada aturan internal NU yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilainya, atau dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang dilanggar.

Pembacaan yang tepat adalah memahami fenomena sikap politik elit dan warga NU saat jelang pilpres 2019 ini memang tidak tunggal baik dari aspek pilihan, maupun dari aspek kedalaman memahami fenomena yang melingkupinya. Dengan bukti walau tampak elit kiai sepuhnya cenderung ke salah satu pasangan, akan tetapi juga dijumpai elit NU yang berada di pasangan lain seperti KH. Hasib Wahhab.

Adapun asumsi bahwa NU justeru menjadi problem di tengah friksi politik yang tajam, maka cara membacanya akan lebih bijak bila mengaca kepada sejarah seperti diurai dalam buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah Memetik Uswah* yang menjelaskan bagaimana NU justeru mengajak tokoh Muhammadiyah KH. Hajid untuk masuk kabinet Hatta yang kontroversial; ataupun NU masuk DPR-GR yang juga terjadi silang sengkarut seperti narasi di atas. Jadi terlibat dan terjun dalam politik praktis dalam perspektif

elit NU pada saat tertentu justeru bisa menjadi stabilisator, mediator dan konduktor politik kebangsaan seperti sejarah di atas. Itulah eksperimentasi berani dan menantang ala NU.
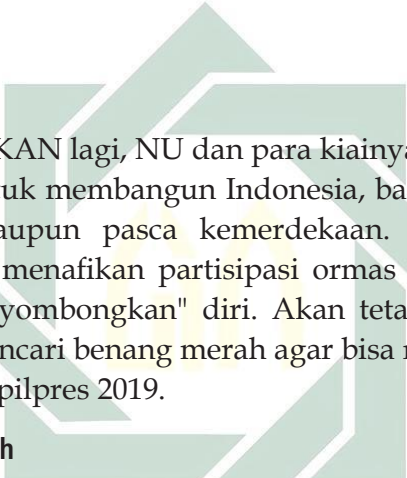
Poin pentingnya, hendaknya dipahami walau elit NU berbeda, akan tetapi mempunyai cara pandang di titik horizon yang satu dan sama terkait dengan NU sebagai organisasi Islam yang menjaga Pancasila dan NKRI. Semua elit NU di manapun posisi politiknya sepakat untuk menjadi kelompok moderat yang mengayomi rakyat dengan kebhinekaannya, mereka akan konsisten seperti itu. Dalam sudut pandang kiai NU, semua rakyat adalah sama kedudukan, bukan dibedakan antara Muslim dan non Muslim. NU telah menciptakan cara pandang persaudaraan yang komprehensif; ukhuwah *islamiyyah* (persaudaraan seiman), ukhuwah *wathaniyyah* (persaudaraan setanah air), maupun ukhuwah *basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Ketiganya merupakan kesatuan yang saling menguatkan. Dalam kamus politik NU, posisi kelompok liyan yang negatif sebenarnya tidak ada. Bila terjadi, hal itu tidak lain adalah upaya untuk mencari keseimbangan ke arah tengah (*wasatiyyah*). Saat kelompok radikal disinyalir menguat, NU sebagai pendulum akan bergerak menuju ekuilibrium. Itulah sebentuk ijtihad politik NU. Maka seperti sejarah di atas, NU bisa berdekatan dengan ide Nasakom, NU juga bisa bergabung dengan Masyumi. Tapi NU juga akan menciptakan front *vis a vis* saat terjadi kegoncangan. Terbukti NU melawan PKI dan menyatakan makar kepada orang Masyumi yang ikut PRRI/Permesta. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan ekuilibrium tadi.

Pendulum keseimbangan tersebut berporos kepada upaya menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan tradisi-amaliah ala NU. Bila poros tersebut digoyahkan, NU akan bersikap tegas. Maka dalam konteks ini bisa dipahami saat NU menolak ide khilafah HTI. Atau saat Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi, kelompok Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan dalih purifikasi melarang mazhab lain dan membasmi tradisi yang telah dilakukan kaum Muslim di Hijaz, sehingga dibentuklah Komite Hijaz oleh para kiai untuk menghadap Raja Ibn Saud. Garis merah NU ini sejalan seperti yang ditulis KH. Abdul Halim dalam buku beraksara pegon pada tahun 1970 bahwa satu dari dua tujuan berdirinya NU selain kemerdekaan dari penjajah adalah kemerdekaan dalam beribadah dan beramaliah. []
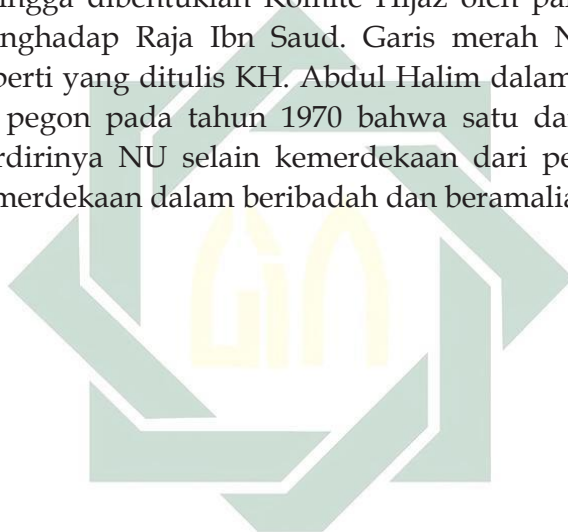
IJTIHAD POLITIK ELIT NU

TIDAK DIRAGUKAN lagi, NU dan para kiainya telah ikut berpartisipasi untuk membangun Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Tentu hal ini bukan untuk menafikan partisipasi ormas Islam lain, atau untuk "menyombongkan" diri. Akan tetapi sekadar mengulik dan mencari benang merah agar bisa memahami ijtihad elit NU di pilpres 2019.

Ukhuwwah Kusiriyah

Ijtihad politik elit NU setelah berakhirnya perang melawan penjajah bisa diteropong dari peristiwa yang disebut dengan *ukhuwah kusiriyah*. Abdul Munim DZ seperti dikutip dari buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah* (2018) menjelaskan, istilah *ukhuwah kusiriyah* digunakan oleh KH Wahab Chasbullah untuk menggambarkan hubungan keorganisasian di dalam Partai Masyumi dengan NU. Semula hubungan ulama sebagai Dewan Syuro dengan kelompok cendekiawan sebagai dewan eksekutif berlangsung harmonis. Tetapi, menjadi memburuk ketika kelompok cendekiawan di Masyumi

tidak lagi menghiraukan posisi ulama dalam menjalankan kebijakan politik partai.

Melihat kenyataan itu, NU mengusulkan adanya restrukturisasi Partai Masyumi dengan bentuk federasi sehingga posisi masing-masing anggota menjadi setara. Namun, usulan itu ditolak, sehingga para ulama NU merasa hanya dijadikan alat politik. Puncak kegusaran ulama NU muncul ketika NU tidak dilibatkan dalam Musyawarah Masyumi tentang politik luar negeri. Alasannya, NU dianggap tidak tahu politik.

Ketika NU menyatakan hendak keluar dari Masyumi, muncul nasihat agar menjaga *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) dari kalangan Masyumi. Menyikapi hal itu, Kiai Wahab Chasbullah mengatakan bahwa Masyumi tidak lagi menerapkan *ukhuwah Islamiyah*, tetapi hanya menerapkan *ukhuwah kusiriyah*, seperti *ukhuwah* kusir kereta dengan kudanya. Sang kusir seenaknya mengendalikan kereta, sedangkan kuda terus dilecut untuk menarik kereta.

NU akhirnya keluar dari Masyumi pada 1952 sebagai konsekuensi keputusan Muktamar NU di Palembang. Tampaknya, keluarnya NU dari Masyumi masih menyisakan kebimbangan dari para tokoh NU. Dalam buku *Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng* menjelaskan bahwa KH Wahid Hasyim menyayangkan keluarnya NU dari Masyumi.

Beberapa kiai juga menyayangkan keputusan itu. Atas hal tersebut, KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya *Berangkat dari Pesantren* menjelaskan, Rais Am PBNU, KH Wahab Chasbullah berkata dengan lantang untuk mencerminkan

keteguhan pendiriannya, *"Kalau tuan-tuan ragu dengan kebenaran sikap yang kita ambil, nah silakan saja tuan-tuan tetap duduk dalam Masyumi. Biarlah saya sendiri pimpin NU sebagai partai politik yang memisahkan diri dari Masyumi. Saya cuma minta ditemani satu orang pemuda, cukup satu orang, sebagai sekretaris saya. Tuan-tuan boleh lihat nanti...*"

Ijtihad politik Kiai Wahab Chasbullah ini terbukti benar. Tiga tahun kemudian, dalam Pemilu 1955, NU menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak ketiga setelah PNI dan PKl. Lebih dari itu, banyak posisi politik strategis diduduki tokoh NU.

Merawat Moderasi dan NKRI

Saat penulis mewawancarai KH Sahal Mahfudz pada tahun 2008 tentang makna khitah NU 1926, beliau menegaskan bahwa khitah adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertingkah laku warga NU dalam semua tindak dan kegiatan organisasi serta setiap dalam pegambilan keputusan. Hal ini menurut Kiai Sahal berangkat dari awal berdirinya NU sebagai *jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah* atau ormas yang murni sosial keagamaan.

Dengan demikian, masih menurut Kiai Sahal, bagi pengurus NU harus melepaskan politik praktis dan konsentrasi untuk mengurus *maarif* dan *mabarat,* tidak lagi mengurusi politik, karena NU bukan partai politik. Sementara bagi warga NU bebas menentukan untuk berpolitik.

Tentu dalam kaitan di atas, NU bukan sama sekali anti politik. Kiai Said Aqil Siradj menyebut NU berpolitik kebangsaan. Dalam kaitan pilpres 2019, sangat mungkin

politik kebangsaannya harus dimanifestasikan dalam bentuk sokongan para elit NU kepada KH Maruf Amin untuk menjadi calon wakil presiden.

Motifnya bisa ditelisik kaidah hukum Islam "*al-hukmu yaduru ma'a illatihi*" artinya hukum itu terjadi tidaknya sesuai ada tidaknya sebab yang mengharuskan hukum itu muncul. Dalam konteks ini, politik kebangsaan dan kenegaraan NU adalah sikap moderat dan NKRI adalah final. Jika saat ini hadir kelompok-kelompok keagamaan tertentu dengan ideologi anti NKRI dan non moderat, yang “menumpang” pada satu kubu, dimana kelompok itu sering menimbulkan resisten terhadap warga NU dan bahkan warga masyarakat, maka elit NU akan turun gelanggang dan cancut taliwondo menjaga nilai moderasi dan NKRI. Kelompok-kelompok itu dijelaskan oleh KH Salahuddin Wahid (Jawa Pos 18/3) sebagai kelompok HTI dan kelompok lain yang anti terhadap demokrasi. Kelompok itu sebelumnya tidak begitu demonstratif dan "ekplosif" tampil di publik seperti saat KH Sahal Mahfudz memimpin NU.

Sikap dan keputusan elit NU di atas bisa disebut sebagai sebentuk ijtihad politiknya untuk tetap menjaga nilai moderasi dan NKRI dalam merawat umat dan rakyat. Masalah kemenangan tentu diharapkan, namun faktor terpenting dari turun gelanggangnya elit NU didasari konsiderans di atas. []

BERNEGARA: ISLAM SAJA, MINUS PANCASILA?

SAYA BIASA menguji mahasiswa saat di kelas dengan melontarkan logika jebakan, "Saat Anda ditawari untuk memilih antara Islam dengan Pancasila, pilih mana?" Jawaban mereka rata-rata adalah memilih Islam. Jawaban normatif yang sangat mungkin akan dianggap benar.

Namun sebenarnya bagi kelompok radikal, pertanyaan seperti ini adalah pintu masuk untuk mencuci otak terhadap generasi muda terkait dengan politik kebangsaan. Bila ditemui generasi muda berpandangan demikian, maka hendaknya disadari bahwa hal itu sebagai sistem pendeteksi dini tentang ideologi berkebangsaan yang harus segera dibereskan sebelum generasi muda kita terjebak cara pandang dikotomis antara Islam dengan Pancasila.

Harus disadari, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya atau bahkan menolak relasi kompatibel antara Islam dengan Pancasila. Bahkan masih ada yang menginginkan mengganti Pancasila dengan Islam. Padahal kalau mereka mau membaca kilas balik sejarah perjalanan bangsa Indonesia, masalah Islam

sebagai dasar negara sudah pernah diwacanakan sebelum merdeka seperti dijelaskan KH. Saifuddin Zuhri dalam karya *masterpiece*-nya, *Berangkat dari Pesantren*.

Pasca kemerdekaan, masalah ini diulangi lagi yang akhirnya menurut KH. Sholahuddin Wahid dalam buku *Nasionalisme Islam Nusantara,* muncul tiga tokoh Islam bermusyawarah dan akhirnya tanpa ragu menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta.

Puncaknya saat rapat-rapat konstituante (1956-1959) wacana Islam sebagai dasar negara tetap disurakan oleh partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti dan lain-lain), dan pada akhirnya terjadi Dekrit Presiden 1959. Dekrit ini disetujui oleh para tokoh bangsa termasuk tokoh dari kalangan umat Islam. Abdul Mun'im DZ dalam buku *Fragmen Sejarah NU* menjelaskan tentang KH. Wahab Chasbullah, pahlawan nasional yang menyetujui Dekrit Presiden, asalkan nilai nilai dalam Piagam Jakarta menjiwai Dekrit Presiden. Bung Karno pun sepakat dengan usul KH. Wahab Chasbullah.

Sejarah di atas sebenarnya amat cukup bagi yang mau mengambil pelajaran. Namun faktanya tidak demikian. Terdapat sebagian kecil masyarakat yang masih mempertanyakan relasi Pancasila dengan Islam dengan melontarkan pernyataan, kenapa tidak langsung menerima Islam saja. Muncul ujaran, jika muatan Pancasila sejalan atau malah bagian dari ajaran Islam, lalu kenapa tidak langsung memilih Islam saja? Pendapat seperti ini tidak menyadari atau malah tidak membaca konteks historis proses panjang perjalanan bangsa Indonesia yang melalui banyak liku dan berakhir dengan kesepakatan yang begitu rumit dan melelahkan serta "berdarah-darah".

Kesepakatan agung yang menghasilkan Pancasila, UUD 1945 inilah yang seharusnya disadari semua pihak. Melepas konteks sejarah di atas sama dengan memutar kembali jarum sejarah dan tentu gambaran debat panjang dan melelahkan akan menghambat cita-cita besar bangsa Indonesia. Seandainya slogan kembali ke Islam tersebut dterima, jangan dikira selesai masalah kenegaraan bangsa Indonesia.

Pertanyaan lanjutan adalah, Islam ala mazhab atau aliran mana yang akan dijadikan landasan konstitusi? Islam ala puritan atau Islam ala mayoritas yang dipegang rakyat Indonesia, atau kalau mengacu di dunia Islam, mau meniru Islam ala Arab Saudi atau meniru Islam ala Republik Islam Iran. Ini satu masalah lagi yang bisa menimbulkan friksi sesama umat Islam.

Belum lagi ketika mereka yang getol menyuarakan kembali ke Islam ini diminta menjelaskan nalar argumentasinya. Apakah kembali ke Islam artinya kembali kepada apa yang tertulis di dalam al-Quran hadis saja. Kalau hal ini yang mereka maksud, maka akan banyak hal yang tidak tercatat dalam al Quran dan hadis. Inovasi dan perkembangan teknologi dan budaya begitu massif tidak semuanya tertulis dalam teks suci.

Namun kalau yang dimaksud adalah Islam dengan berbekal ijtihad dengan mengakomodasi penalaran, maka para ulama yang ikut mendirikan NKRI dan membangun pondasinya juga telah melakuka hal yang sama dalam menerima Pancasila. Maka tepat yang diurai Ali Haidar dalam bukunya *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan

perwujudan upaya umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya.
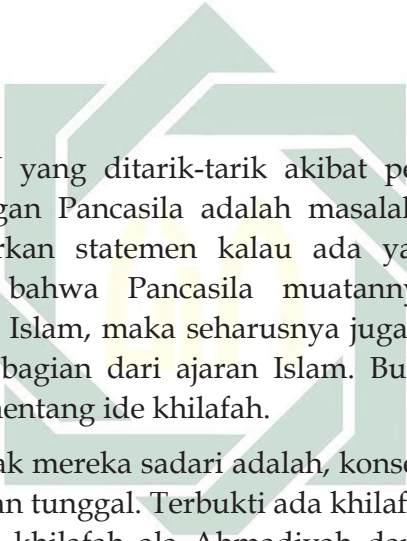
Untuk itu, dalam memahami Islam tentu perlu nalar. Kalau nalar digunakan, maka anda tidak akan sulit menerima kesepakatan bangsa yang nanti disebut dengan Pancasila. Ilmu menalar ajaran agama ini terakomodasi dan terkompilasi dalam nomenklatur yang disebut usul fiqh. Ternyata masih ada juga pertanyaan, lebih tinggi mana Pancasila dengan Islam? Tentu sang penanya tidak paham fungsi hierarki dalam konteks pertanyaan tersebut. Hierarki dalam masalah tersebut adalah apabila ada pertentangan. Padahal sudah dijelaskan di atas tentang kompatibel antara Islam dengan Pancasila. Dengan demikian, pertanyaan tersebut adalah sia-sia.

Terkadang juga muncul pernyataan bahwa jika Pancasila sesuai dengan Islam, kenapa negara muslim lain tidak menggunakan Pancasila. Statemen sederhana ini jangan dianggap main-main, generasi milenial yang sedang dalam tahap pencarian identitas pasti hal tersebut akan dianggap problem yang perlu diselesaikan.

Intinya diperlukan penjelasan konteks keindonesian, kenusantaraan, dan pendedahan masalah budaya dan tradisi sehingga bisa memahami posisi Pancasila yang hanya digunakan bangsa Indonesia. Atas itu semua, kalau mereka menuntut keseragaman, ternyata realitas dunia muslim juga tidak seragam dalam memaknai ajaran Islam, terbukti banyak aliran dan mazhab. []

PANCASILA DAN KHILAFAH

PROBLEM LAIN yang ditarik-tarik akibat pembahasan relasi Islam dengan Pancasila adalah masalah khilafah. Mereka melontarkan statemen kalau ada yang berani mengkonstruksi bahwa Pancasila muatannya adalah bagian dariajaran Islam, maka seharusnya juga menerima khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Bukan malah menolak dan menentang ide khilafah.

Hal yang tidak mereka sadari adalah, konsep khilafah itu beragam, bukan tunggal. Terbukti ada khilafah ala ISIS, khilafah ala HTI, khilafah ala Ahmadiyah dan lain lain. Selanjutnya, pertanyaan lanjutan adalah, apakah seluruh yang disebut ajaran Islam harus diterapkan dan wajib dilaksanakan? Tentu tidak demikian.

Masalah poligami, urusan makan-minum, dan-lain-lain tercantum dalam teks suci Islam. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah suatu yang wajib dilaksanakan. Masalah tersebut dikaitkan dengan kajian dalam usul fiqih yang masuk dalam wacana perintah (*amr*).
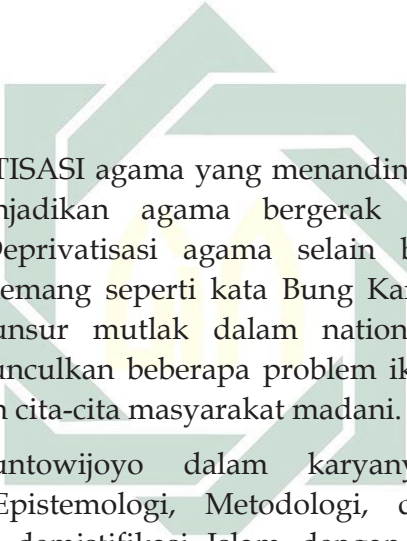
Perintah dalam teks auci Islam bisa merupakan hal yang wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekalipun masalah khilafah menjadi bahasan para ulama dalam fiqih politik, tapi bukan hal yang wajib diterapkan. Terlebih lagi khilafah bukan merupakan satu-satunya sistem politik Islam baik dalam sejarah Islam, maupun dalam kajian *turats* Islam.

Buku yang berjudul *The New Islamic Dynasties* karya Clifford Edmund Bosworth cukup jelas menyajikan ragam nama dinasti (bukan khilafah saja) yang muncul sepanjang sejarah di dunia muslim. Maka wajar bila dalam kajian fiqih siyasah, banyak nomenklatur sistem politik yang telah dan sedang diaplikasikan oleh negara-negara muslim, semisal khilafah, kerajaan, kesultanan, *wilayatul faqih*, dan tentu NKRI. []

SAKRALISASI POLITIK

TREN DEPRIVATISASI agama yang menandingi gagasan sekularisasi menjadikan agama bergerak ke ranah publik-politik. Deprivatisasi agama selain berdampak positif, karena memang seperti kata Bung Karno bahwa agama adalah unsur mutlak dalam nation building, tetapi juga memunculkan beberapa problem ikutan yang mengkhawatirkan cita-cita masyarakat madani.

Apabila Kuntowijoyo dalam karyanya, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, memperkenalkan demistifikasi Islam dengan bangunan narasi yang khas, saat ini berkembang apa yang saya sebut sakralisasi politik atau mistifikasi politik.

Sakralisasi politik adalah upaya membingkai politik praktis dengan baluran ajaran agama yang berimplikasi bagi orang tertentu tak berani mendiskusikan, apalagi mendebatnya karena bernuansa "langit" walau sebenarnya bingkai argumennya naif.

Sakralisasi politik bertujuan menghentikan bekerjanya nalar kritis di medan kontestasi politik. Politik yang pada dasarnya baik akan menjadi absurd jika disakralisasi. Apalagi jika sakralisasinya mengandung muatan kebencian.

Sakralisasi politik yang berupaya mengomodifikasi agama dalam politik ini akan bermuara di antara dua dimensi. Pertama, dimensi negatif karena memuat ujaran kebencian. Kedua, berdimensi di ranah diskursus yang saya sebut "*bener tapi ora pener*": apa yang disampaikan adalah benar, tetapi tidak tepat lokasi dan waktu sehingga dimensi ini akhirnya juga menjadi negatif.

Karena kepentingan politik praktis, tak jarang hukum positif yang telah disepakati dalam palagan konstitusional (institusi DPR) termarjinalkan. Contohnya saat pemilihan pemimpin, diembuskan isu Muslim, kafir, calon taat agama, calon pilihan agamawan, dan sejenisnya. Padahal, kriteria itu tak/belum tercantum di hukum positif. Hal ini potensial manipulatif karena pada titik tertentu isu ini bisa menafikan kualifikasi profesionalitas dan integritas kontestan.

Ragam sakralisasi politik ini selanjutnya diamplifikasi ke masyarakat oleh beberapa elite, termasuk agamawan, entah karena kesadaran sendiri atau karena ketakpahaman terhadap fenomena post truth dengan gerakan *firehose of falsehood* maupun apa yang saya namakan gerakan tebar jala hoaks.

Dalam area ini, agamawan jadi konduktor yang baik untuk menghantarkan "asupan" buruk ke otak dan emosi masyarakat. Absurdnya, amplifikasi juga dilakukan di tempat ibadah yang di situ menjadi titik kumpul umat dari

berbagai latar, termasuk simpatisan beragam partai politik. Mereka tidak sadar telah menyegregasi masyarakat.

Karena politik sudah dibuat "sakral" dan "melangit", maka ceramah yang mencela, bahkan menghasut, akan menjadi suatu yang permisif dan ditoleran. Menyeru nama Tuhan sambil mempersekusi atau bahkan melakukan tindakan destruktif akan dianggap biasa oleh sebagian orang karena sudah dibalut dengan nilai "langit". Ceramah yang garang pun akan dianggap wajar walau para jemaah setelah pulang akan tertanam rasa kebencian kepada lawan politik.

Jika sudah demikian, ceramah lucu dan riang yang ada di kampung jauh lebih bijak, bermanfaat, walau bisa jadi sebagian kecil jemaah sepulang dari pengajian hanya mengingat hal yang lucu dari penceramah. Namun, yang pasti, sepulang pengajian, jemaah membawa kegembiraan, bukan kebencian ke sesama.

Dampak Ikutan

Banyak politisi yang kesadaran "ruang"-nya terbatas. Politisi yang sebenarnya banyak berkiprah di ruang masyarakat, terutama menggamit ruang agama di masyarakat, tak menyadari peran itu. Mereka berasumsi, "permainan" di ruang politik yang mereka jalani selama ini, seperti debat dan "bertengkar" di forum resmi para politisi, akan selesai "pertengkarannya" saat selesai forum resminya.

Sikap dan perilaku di "ruang" sesama politisi ini mereka coba jalankan saat terjun ke masyarakat. Para politisi mempraktikkan sakralisasi politik dalam kampanyenya.

Sakralisasi politik hanya dianggap sebagai satu dari sekian amunisi kampanye yang efek emosionalnya diasumsikan akan berhenti jika hajat pemilu selesai.

Cara pandang politikus ini naif karena tak menyelami ruang lain dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian orang, apalagi di akar rumput, isu yang bermuatan agama dianggap serius, ideologis, dan berefek panjang. Bukti hal tersebut melimpah sejak sekian tahun lalu. Isu-isu sampah yang merupakan residu politik ini memunculkan sejenis "collateral damage" yang seharusnya disadari.

Potensi konflik horizontal bisa terjadi. Pelajaran penting dari efek sakralisasi politik ini bisa diperhatikan di Timur Tengah. Campuran isu politik dan agama mampu membuat orang berani melakukan bom bunuh diri hingga berperang dengan sesama sehingga muncul radikalisasi atas nama agama. Peristiwa bom bunuh diri yang berulang kali terjadi di Indonesia hampir bisa dipastikan terkait pelaku yang menganggap taghut pada pemerintah.

Dampak ikutan yang lain adalah terjadinya desakralisasi agama. Karena sakralisasi politik, ajaran agama yang sebenarnya sakral jadi profan. Nomenklatur agama tentang jihad, bertakbir, hijrah, ghuraba (anti-mainstream) akan dianggap sebagian umat Islam tak sakral lagi dan berkurang bobot spiritualitasnya, bahkan cenderung dibuat lelucon seperti yang beredar di medsos.

Seruan takbir yang diucapkan saat resolusi jihad akan berbeda dengan seruan takbir yang diiringi kemarahan saat kampanye. Hal ini karena mereka yang menyerukan adalah individu yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi moral, apalagi spiritual.

Tak hanya terjadi desakralisasi agama, sakralisasi politik juga menginisiasi kemunculan ateisme seperti di Arab. Para Islamis adalah pihak yang paling sering menyuarakan sakralisasi politik dengan muatan kebencian di ruang publik.
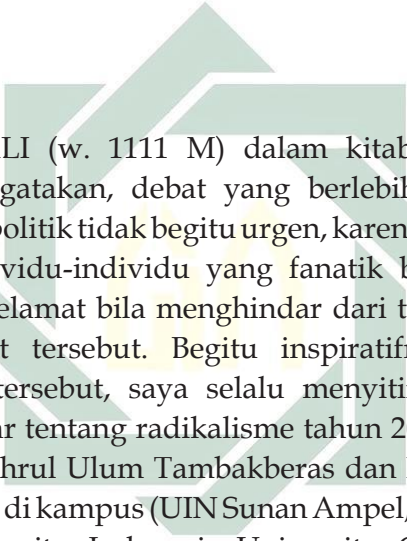
Dikutip dari laman medium.com (31/7/2017), Brian Whitaker menjelaskan, salah satu sebab munculnya ateis di negara Arab adalah realitas Islamisme yang punya gagasan bahwa Tuhan menginginkan sebuah bangsa atas nama-Nya dan memerintahkan membunuh dan menghancurkan manusia lain.

Tentu relasi ateisme dengan sakralisasi politik ini belum diteliti di Indonesia, tetapi benih apatisme telah terjadi. Tulisan Zastrouw al Ngatawi tentang warga desa yang kerja di kota besar yang tak mau shalat Jumat lagi karena sebelumnya saat Jumatan di beberapa masjid yang terjadi adalah khotbah kebencian, adalah contoh yang perlu diperhatikan.

Walhasil, mari kembalikan fungsi agama sebagai rahmat semesta alam. Dalam konteks pesta demokrasi 2019, ceramah agama hendaknya tak membuat sekat ideologis masyarakat jadi lebih tebal karena saling berbalas "aksi-reaksi" yang akan merembet hingga akar rumput. Agama harus jadi katalisator persatuan dan kedamaian bagi rakyat dalam menyongsong kontestasi politik dalam ajang menggembirakan, yakni pesta demokrasi. []

OVERDOSIS BERPOLITIK

IMAM GHAZALI (w. 1111 M) dalam kitab *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* mengatakan, debat yang berlebihan tentang kepemimpinan politik tidak begitu urgen, karena berpotensi melahirkan individu-individu yang fanatik buta. Untuk itu, akan lebih selamat bila menghindar dari terlibat lebih jauh dari debat tersebut. Begitu inspiratifnya petuah Imam Ghazali tersebut, saya selalu menyitirnya dalam beberapa seminar tentang radikalisme tahun 2018 ini, baik di pesantren (Bahrul Ulum Tambakberas dan Nurul Jadid Paiton), maupun di kampus (UIN Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jember). Bahkan saat menjadi saksi ahli pihak pemerintah di sidang pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembubaran HTI bulan Maret lalu, petuah tersebut saya sampaikan di depan hakim dan juru bicara HTI.

Wejangan Imam Ghazali tersebut hendaknya dipahami dari dua sisi; *pertama*, bukan berarti Imam Ghazali menafikan sama sekali membahas tentang kepemimpinan politik. Buktinya, beliau mencetuskan *state leadership*

theory yang unik. Munawir Sjadzali dalam bukunya, *Islam and Governmental System* menjelaskan hal tersebut. Selain itu, Imam Ghazali juga menulis satu buku sebagai pegangan untuk pemimpin politik yang berjudul *Al Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Kedua*, sekalipun petuah Imam Ghazali tersebut terkait dengan wacana dan konteks kepemimpinan saat beliau hidup, namun hal itu masih relevan dihubungkan dengan era sekarang bila ditilik dari imbas debat yang overdosis (promosi dan kampanye) atas kepemimpinan politik yang ternyata memproduksi manusia-manusia yang fanatik buta.

Politik yang "Berdarah-darah"

Saat politik tidak diapresiasi secara bijak, dan tidak diliputi akal sehat, serta tidak ada pancaran energi keagamaan yang ramah dan *rahmah* (kasih sayang), maka yang muncul adalah politik saling menafikan dengan segala bentuk dan tingkatannya. Hal seperti itu terjadi pada masa lalu dan masa sekarang. Pada masa lalu, Shahrastani dalam bukunya *Al Milal wa al Nihal* mengatakan bahwa debat dan perselisihan tentang masalah kepemimpinan (politik) menjadi perselisihan umat Islam yang terbesar. Pedang sering terhunus untuk mengatasi masalah kepemimpinan politik.

Kebenaran ujaran Shahrastani ini bisa ditelusuri dalam kitab-kitab *tarikh* (sejarah) seperti *Tarikh al-Khulafa'* karya Imam Suyuthi, *Tarikh Al Umam wa al-Muluk* karya Imam Thabari, dan segudang kitab *tarikh* lain yang membahas tentang *khilafah* (kepemimpinan politik). Di situ banyak diungkap bagaimana darah mudah ditumpahkan, dan bagaimana martabat manusia seakan tiada berharga.

Kisah di atas terjadi pada masa lalu. Untuk saat sekarang pun juga demikian. Kasus di Timur Tengah bisa diidentifikasi bagaimana isu politik yang melibatkan kelompok radikal (ISIS, Al Qaidah, Hizbut Tahrir, dan lain-lain) yang dalam jargonnya selalu mengeluarkan dalil-dalil agama. Lalu yang terjadi adalah sesama muslim dan sesama manusia saling membunuh. Anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa menjadi korban. Kasus Suriah, Irak, Libya, dan Yaman adalah contohnya. Sekian ratus ribu nyawa melayang. Naifnya, mereka merasa "berjuang" dan tidak terasa kalau sedang ditunggangi pihak ketiga yang hendak menangguk untung dengan terjadinya friksi itu (seperti menjual senjata atau hendak menguasai ladang minyak yang berlimpah).

Demikian juga untuk Indonesia. Masalah kontestasi kepemimpinan politik menjadikan masyarakat terbelah karena saling saling mengolok dan mencaci, semisal sematan kata kecebong dan kampret atau kata-kata sarkastik yang lain. Olokan dan hujatan semakin tajam saat para politikus berikut para pengikutnya berupaya dengan segala cara untuk memenuhi nafsu politiknya yang dengan tanpa rasa malu bergaya "berbaju agama" dan tega mengeksplorasi isu SARA, ditambah memproduksi isu *hoax* dengan berbagai ragam bentuknya mulai dari tipuan gambar dan video, daur ulang berita usang, dan lain-lain.

Naifnya, ada di antara rakyat baik yang alit maupun yang elit termakan isu *hoax* itu, bahkan ikut menyebarkannya. Ada juga yang tertipu oleh baju agama para politikus tadi sehingga mereka merasa "berjihad" untuk membela dan memenangkan tokohnya dalam kontestasi politik, bahkan siap syahid.

Padahal, realitas politik Indonesia adalah seperti yang dikatakan salah seorang kiai NU, bahwa saat ini gerakan transnasional dan kelompok transaksional menunggangi percaturan politik Indonesia. Gerakan Transnasional hendak mengganti NKRI menjadi khilafah, atau menjadikan NKRI sebagai negara Islam. Sedang kelompok transaksional adalah mereka yang hendak memuaskan nafsu serakahnya untuk memperoleh akses kekuasaan-kekayaan tanpa peduli dengan cara yang negatif, mulai dari model "ijon" politik, bandar politik dan berbagai modus canggih lainnya.

Moderat dalam Berpolitik

Imam Ghazali dalam kitab *Al-Iqtishad fial-I' tiqad* tersebut berupaya memoderasikan tujuan politik tidak semata-mata mengejar kekuasaan, tapi memandang kekuasaan hanya sebatas jalan menuju kebahagiaan di akherat. Dengan demikian, berpolitik ala Machiavelli tidak bisa diterima. Dalam konteks Indonesia, tentu kita menginginkan agar bisa berpolitik yang moderat, damai, dan tidak main SARA. Kita perlu menjaga keharmonisan dalam berpolitik agar masing-masing umat dapat menjalankan ibadahnya secara damai. Karena seperti kata Imam Ghazali, berpolitik adalah agar kita dapat menjalankan ajaran agama secara normal. Untuk itu, dibutuhkan suasana damai. Tanpa kedamaian, maka sulit bisa mengamalkan ajaran agama.

Dengan demikian, pasti kita tidak ingin ikut andil menciptakan friksi di negeri tercinta NKRI. Kita tidak menginginkan Indonesia menjadi beberapa negara di Timur Tengah. Di era media sosial yang labil untuk terjadinya disrupsi yang destruktif, andil kita cukup besar. Mari menjaga mulut kita, dan menahan jemari-jemari kita saat

'*nutul*' *keyboard* dari berita yang bisa memanaskan situasi. Pemilihan presiden yang akan datang diharapkan menjadi ajang demokrasi yang mendidik dan menyenangkan untuk semua anak bangsa. Harapan kita, dengan terjadinya rangkulan Jokowi dan Prabowo saat menyaksikan pertandingan pencak silat Asian Games lalu, menjadikan para pengikut dan pembela yang fanatik akut akan berfikir ulang untuk kampanye yang "panas panas" yang akibatnya tidak bisa kita prediksi.

Sungguh bagus bila pondasi yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik adalah seperti yang digaungkan oleh pahlawan nasional, Kiai Wahab Chasbullah. Dalam buku *Tambakberas: menelisik Sejarah, Memetik Uswah* terdapat penggalan bait-bait syair Kiai Wahab yang ditulis saat Indonesia masih dijajah Belanda. Kiai Wahab meminta agar kita mencintai tanah air sepenuh hati, karena cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta NKRI harus dijadikan pondasi dalam kontestasi politik.

Kiai Wahab melanjutkan, "*Inna al-kamal bi al-a'mal, wa laysa dzalika bi al-aqwal. Fa'mal tanal ma fi al-amal, wala takun mahdla al-qawal*." Kiai Wahab mengingatkan agar kita berbuat dan bekerja untuk tanah air, jangan hanya pandai debat saja. Karena kesempurnaan seseorang akan diperoleh bila mau bekerja, bukan hanya mau bicara melulu. Dengan bekerja, akan tergapai cita-cita. Bicara yang baik saja menurut Kiai Wabab belum cukup, apalagi bicara jelek yang provokatif yang bisa membakar emosi umat. []

NEGARA AGAMA DAN PALAGAN KONSTITUSIONAL

DI BALIK GEMURUH Pilpres 2019, ditemukan perbincangan di dunia maya tentang relasi NKRI dan agama, secara khusus dengan Islam. Wacana usang itu kalau tidak bijak menyikapinya, alih-alih mengabaikan, bisa menjadi bumerang. Sebab, konklusi relasi antara negara dan Islam yang naif bisa menjadi *trigger* lahirnya radikalisme yang tentu destruktif. Ujaran bahwa sistem politik Indonesia adalah *thaghut* dan *kufur* sebagai contohnya.

Dengan demikian, masalah klasik dan laten itu harus didedah secara transparan, jangan dibiarkan mengambang dengan jenis kelamin yang tidak terang. Karena bisa menjadi bara dalam sekam yang potensial membakar sendi-sendi bernegara yang telah tertanam.

Indonesia Negara Agama?

Mengatakan kepada generasi milenial bahwa Indonesia bukan negara agama adalah riskan karena akan sering disalahpahami. Berdasar pengalaman dan pengamatan saya, gagasan dikotomis itu akan ditentang.

Tampaknya, lebih tepat bila disampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang selaras dengan agama. Dalam konteks sebagai muslim, bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sesuai dan selaras dengan Islam (bagi nonmuslim bisa membangun argumen yang sama sesuai keyakinannya). Menjelaskan hal ini penting untuk menggiring perdebatannya masuk dalam bingkai, koridor, dan rel Pancasila; UUD 1945; serta NKRI.

Lalu, konstruksi nalar yang bagaimana untuk melabeli Indonesia sebagai negara yang selaras dengan agama? *Pertama*, sila ketuhanan jelas menunjukkan negara berketuhanan. *Kedua*, Pancasila kompatibel dengan Islam.

Tentang kompatibilitas antara Pancasila dan Islam ini disokong fakta historis saat NU masih menjadi partai politik, lewat siaran XXI tahun 1959 tertulis, "*Djadi, atas dasar pengertian bahwa UUD 45 jang telah didjiwai oleh Piagam Djakartalah maka fraksi kita di parlemen bersedia mengambil sumpah sebagai anggota DPR dalam rangka UUD 45. Inilah satu-satunja stemotivering dalam Parlemen oleh fraksi-fraksi jang ada di DPR itu dan diantara fraksi-fraksi Islam, hanja NU-Iah jang mengemukakan stemotivering di atas*."

Hal di atas diperkuat pidato KH Wahab Chasbullah pada 1959 bahwa Piagam Jakarta, selain menjiwai UUD 1945, juga merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Akhirnya, seperti dijelaskan KH Salahuddin Wahid (Jawa Pos, 18/2/2019), PM Juanda mengatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, oleh karena itu memberikan dasar bagi pelaksanaan hukum agama.

Bangunan argumen di atas bisa dijadikan acuan bahwa Indonesia adalah negara yang selaras dengan agama tanpa

harus ditulis dalam konstitusi. Bilamana ada pihak yang menerima Pancasila, tapi masih syak wasangka terhadap hukum positif tentang kesesuaiannya dengan ajaran agama, baginya perlu formula jawaban yang rasional. Tentu problem ideologis itu tidak bisa dijawab hanya dengan 'kalau asasnya sudah sesuai dengan Islam, maka bisa disimpulkan peraturan yang dibuat sesuai dengan Islam. Ada pertanyaan lanjutan yang sering dilontarkan terkait penerapan *jinayat* (hukum pidana) dalam konteks hukum di Indonesia.

Problem di atas akan lebih krusial bila ditambahi dengan narasi yang dulu juga bisa memantik saya untuk menjadi bagian dari gerakan radikal. Narasi tersebut adalah penekanan bila menerapkan sanksi *jinayat* ala Islam selain sebagai *zawajir* (pencegah dari kejahatan) juga sebagai penebus dosa di akherat (*jawabir*). Selanjutnya mereka mendoktrinkan bahwa sanksi yang berlaku di hukum positif tidak bisa berfungsi sebagai jawabir karena bukan hukum Islam.

Menghadapi pandangan tersebut tidak bisa dengan sebatas mengatakan, kita sepakat bahwa hukum Islam harus diterapkan, yang beda adalah diterapkan secara tekstual-formal atau diterapkan secara kontekstual-esensial. Kalau sekadar jawaban seperti itu, yang muncul adalah stigma sebagai liberalis. Suatu stigma yang tidak bisa membuka horizon pemikiran.

Untuk itu, harus ditegaskan, cara pandang yang sempit bila mengatakan bahwa syariat Islam baru benar-benar diterapkan di Indonesia dengan ukuran apabila yang tekstual diterapkan, sebagaimana juga sempitnya

pandangan yang mengatakan bahwa tekstual tidak perlu, yang penting substansial.

Seharusnya campuran dari dua pendekatan itu yang digunakan. Tentu tugas para ulama dan akademisi untuk membuat formulasi yang jitu. Diskusi itu pasti sangat menantang apabila meminjam metode dalam ushul fiqh yang menyediakan sarana kontekstualisasi hukum. termasuk apresiasi terhadap tradisi, Juga menggamit sosiologi hukum yang menyajikan pendapat Friedrich Carl Von Savigny tentang *volkgeist* (hukum menyerap nilai dari pegangan publik), juga pendapat Eugen Ehrlich yang melontarkan tentang *the living law*.

Dalam kaitan dengan regulasi hukum di Indonesia, jalan terbaik untuk mempertemukan dua kelompok itu adalah di ranah legislatif. Sebab, di situ terdapat mekanisme konstitusional yang absah untuk mengajukan dan berdebat tentang rancangan hukum.

Dengan demikian, silakan mengaktualisasikan semangat keislaman dengan menjadi anggota parlemen. Itulah gelanggang pertarungan untuk mencari *meeting point* sekaligus *melting point* antara literalis dan liberalis (atau bahkan antara sesama agama) dalam panji kesepakatan di bawah Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. Produk dari pertarungan ide ini, entah dengan mufakat atau voting, harus diterima secara *gentlemen*.

Walhasil, harus dihindari cara berisiko dengan mencantumkan NKRI bersyariah atau menambah asas Islam dalam konstitusi, apalagi menjadi negara khilafah. Upaya itu kontraproduktif, eksklusif, dan membuat gamang umat lain. []

KONTRANARASI PONDOK-PONDOK NU ATAS ISU NII

PERLU DIPAHAMI, munculnya darul Islam atau negara Islam Indonesia (DI/NII) yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo saat itu cukup menjadi magnet bagi sebagian umat Islam, bahkan termasuk beberapa kiai NU. Mungkin kalau sekarang kayak isu khilafah atau penghembusan trend hijrah salah kaprah yang juga menjadi daya tarik beberapa orang.

Di Jombang saja seperti dalam buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah* ada kiai yang menjadi simpatisan DI/NII. Sebut saja Kiai Baihaqi Sambong, Jombang (Guru Gus Dur) dan Kiai Thoha, Perak, Jombang. Termasuk KH Hasbullah Salim (menantu Kiai Bisri Syansuri dan juga pernah menikah dengan cucu dari Mbah Abdussalam/Mbah Sechah Tambakberas). Sedang KH Qolyubi Dahlan (83 tahun) dari Keringan, Nganjuk, menyebut nama-nama yang apresiatif terhadap DI/TII adalah KH Toha, KH Karim Banjarsari Perak dan bahkan KH. Yusuf Hasyim. KH Qolyubi yang juga akrab dengan KH Toha mendapatkan kisah bagaimana senjata yang dipreteli dan dinaikkan becak dengan dikawal oleh KH

Thoha ternyata tertangkap oleh tentara Indonesia yang akhirnya KH Toha diburu tentara.

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa saat itu, tahun 1950-an, isu negara Islam Indonesia sempat menjadi *trending topic* karena "diviralkan" oleh Kartosuwiryo dan pengikutnya. Dalam kondisi demikian, para kiai NU perlu melakukan wacana tandingan atau kontranarasi atas isu negara Islam Kartosuwiryo tersebut.

Saat itu, yang menjadi rais syuriyah NU adalah KH Wahab Chasbullah dari Pondok Tambakberas. Beliau sebagai penggerak NU nan cekatan mengambil langkah untuk melakukan kontrawacana terhadap isu negara Islam Kartosuwiryo dengan mendatangi para kiai pesantren agar mengadakan bahtsul masail. Tidak ketinggalan, KH Masjkur sebagai Menteri Agama, meminta ulama-ulama di daerah untuk menyadarkan orang-orang yang terlanjur terpapar gagasan negara Islam ala Kartosuwiryo. Tercatat ada beberapa pesantren yang terlibat dalam mengkajinya.

Pertama, saya dapat kisah dari KH Qolyubi Dahlan yang pada 6 Desember 2019 saya wawancarai di pondok beliau. Beliau yang saat ini menjadi wakil rais syuriyah NU Nganjuk masih kuat daya ingatnya. Beliau mondok di Mojosari tahun 1951-1956 selanjutnya mondok di Semelo Jombang bersama KH. Masduqi Perak.

Isi kisahnya adalah sekitar tahun 1952-1953 pernah terjadi *bahtsul masail* para ulama di masjid kecil di Pondok Mojosari Nganjuk. Acara itu dihadiri oleh KH Wahab Chasbullah, KH Zahid Cepoko (Rais Syuriyah NU Nganjuk), KH. Dahlan Abdul Qohhar, KH. Mahrus Ali dan banyak kiai lain. Bahtsul Masail dipimpin KH. Dahlan Abdul Qohhar.

Bahtsul masail membahas tentang apa yang dilakukan Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar adalah *bughat. Bahtsul Masail* juga memutuskan bahwa Soekarno wajib dibela walau belum terpilih dalam pemilu, hal ini karena legitimasi dan kekuatan real beliau. Selanjutnya KH Qomaruddin, pengasuh pondok Mangunsari, Nganjuk yang juga ikut *bahtsul masail* menyatakan Bung Karno sebagai *waliyyul amri addlaruri bisysyaukah*. Hasil inilah yang kemudian dibawa KH Wahab dalam pidatonya tahun 1954.

Ada kisah unik, saat para kiai masih di lokasi acara dan waktu dhuhur sudah masuk, karena belum adzan, maka KH Zainuddin sambil membawa sapu berteriak, "Hei sudah duhur, kalau mati dan masuk neraka bagaimana? Siapa yang menjamin masuk surga?" Sontak para kiai yang kebanyakan juga santri Kiai Zainuddin termasuk KH Wahab, langsung semburat.

Kedua, saya juga dapat informasi dari Bapak Abdullah Hamid, Kepala perpustakaan Masjid Jami' Lasem. Bapak Abdullah Hamid mendapat penjelasan langsung dari KH Abdul Hamid Baedlowi Lasem. Adapun KH Abdul Hamid Baedlowi mendapatkan kisahnya dari KH. Ahmad Marzuki Langitan yang pada waktu itu turut hadir di Denanyar untuk mendampingi KH. Abdul Hadi Langitan.

Pada waktu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Dl/Tll dengan pimpinan Kartosuwiryo dan lain-lain, Soekarno meminta fatwa dari para ulama tentang status legalitas kedudukan beliau sebagai Presiden Republik lndonesia dari pandangan syariat Islam.

NU kemudian bersidang di Pesantren Denanyar untuk membahas persoalan tersebut. Muncul perdebatan yang

sengit dalam sidang itu sehingga musyawarah mengalami kebuntuan. Pada saat itu, KH. Baidlowi yang duduk di teras tempat musyawarah diadakan tidak menyampaikan pendapat, sampai akhirnya sidang diskors dan KH. Wahab Chasbullah mendatangi KH. Baidlowi dan memintanya untuk menyampaikan gagasannya. KH Baidlowi menjawab "*Soekarno huwa waliyyul amri Adl dlaruri bisysyaukah*".

Setelah sidang dibuka kembali, KH A Wahab Chasbullah menyampaikan pendapat tersebut. Akhirnya para kiai yang bemusyawarah sepakat menerima pendapat KH. Baidlowi. Kemudian keputusan Denanyar tersebut dibawa ke pertemuan Alim Ulama Tingkat Nasional di Bogor dan akhirnya ditetapkan menjadi keputusan di pertemuan Alim Ulama tersebut.

Dari dua pertemuan para kiai di pondok Mojosari dan pondok Denanyar (dan sangat mungkin juga dari pondok lain), hasilnya terlegitimasi dengan konferensi alim ulama yang dihelat oleh menteri agama, KH Masjkur serta digongi oleh KH Wahab dalam pidatonya di parlemen pada 29 Maret 1954. Mungkin ada pertanyaan, apakah kontranarasi yang dilakukan para kiai berhasil? Tentu ada hasilnya. Semisal, KH Hasbulloh Salim akhirnya membenarkan keputusan Kiai Wahab.

Kalau zaman dahulu para pahlawan nasional kita seperti KH Wahab Chasbullah dan KH Masjkur menyadari urgennya kontranarasi, maka generasi milenial dan *centennial* tentu perlu meniru melakukan kontranarasi terhadap isu hoaks ataupun isu radikalisme yang saat ini menjadi bagian dari problem kita semua.

WALIYYUL AMRI BISSYAUKAH BERIMPLIKASI PADA PERNIKAHAN SAJA?

DALAM BEDAH buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah* di IAIN Tulungagung 26 November 2019 bersama Gus Jabbar, Dr. Muntahibun Nafis, Dr. Kholid dan moderator Dr. Syafi, saya menyampaikan bahwa Menteri agama RI, KH Masjkur pernah mengadakan konferensi alim ulama sejak tahun 1952, 1953 dan 1954 yang di antaranya berkaitan dengan masalah *tauliyah* (pengangkatan) wali hakim.

Hasil keputusannya, presiden dalam perspektif fikih adalah *waliyyul amri addlaruri bisysyaukah.* Konsekuensinya menurut Andree Feillard dalam NU vis-à-vis Negara, menjadikan Soekarno sebagai seorang kepala negara yang sah dan ipso facto harus dipatuhi semua umat Islam. Implikasi logis selanjutnya adalah pengangkatan wali hakim oleh presiden kepada menteri agama dan kepada siapa saja yang diberi otoritas adalah absah secara Islam.

Ali Haidar dalam bukunya *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* menjelaskan, alasan penyematan Presiden Soekarno sebagai *waliyyul amri* saja tidak tepat dalam konteks fikih tentang imamah (kepemimpinan). Adapun yang tepat adalah diberi tambahan *addlaruri bisysyaukah* yakni kekuasaan temporer yang secara *de facto* mempunyai kekuatan.

Ringkasnya, dalam pandangan ulama, Presiden Soekarno secara fikih adalah pemimpin yang belum memenuhi kualifikasi sempurna, sehingga disebut darurat atau temporer. Sekalipun demikian, kepemimpinannya tetap diterima karena memang faktanya dia mempunyai kekuatan baik berupa kekuatan aparat maupun pengaruh di masyarkat.

Tentu narasi di atas tidak "nyaman", tapi dalam data sejarah tidak ada laporan Presiden Soekarno mereaksi negatif, tapi justeru menerima penyematan sebagai *waliyyul amri* yang ditambahi dengan *addlaruri bisysyaukah*. Tampaknya konstruksi politik dalam bingkai fikih ini tidak bisa diabaikan dalam konteks masyarakat muslim.
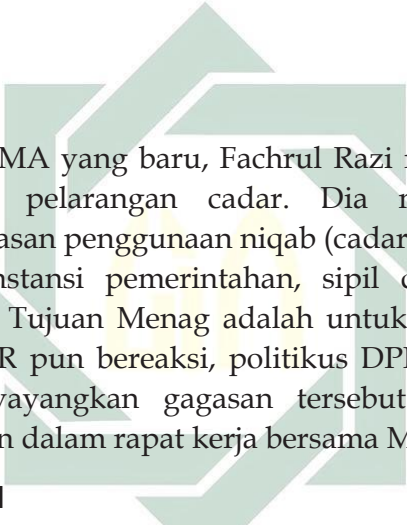
Kembali ke masalah *waliyyul amri addlaruri bisysyaukah*. Penyematan ini juga berfungsi untuk menandingi gagasan Kartosuwiryo. Artinya, pemberian "gelar" tersebut mempunyai makna politis lain. Choirul Anam dalam bukunya *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* menjelaskan, pemberian gelar kepada Presiden Soekarno karena umat mempunyai tanggung jawab menjaga ketenangan berbangsa dan bernegara. Keputusan hukum tersebut menjadi ekspektasi umat Islam yang bingung dengan gelar "Imam" Negara Islam yang disandang oleh Kartosuwiryo.

Sehingga dengan keputusan Muktamar Cipanas, kaum muslim mempunyai pedoman fikih bahwa Presiden Indonesia adalah Soekarno.

Senada dengan Choirul Anam, Abdul Mun'im DZ dalam bukunya *Fragmen Sejarah NU* menjelaskan, NU sebagai jamiyyah Islam yang berakar pada tradisi dan budaya setempat, mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Saat diadakan Muktamar di Banjarmasin pada tahun 1936, NU menerima wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Darul Islam. Namun hal tersebut bukan diartikan sebagai daulah lslam (pemerintahan Islam), akan tetapi dalam pengertian walayah Islam (daerah Islam) mengacu kepada realitas mayoritas rakyat di Nusantara adalah muslim karena beberapa abad dalam kekuasaan kerajaan Islam. Sejak deklarasi tersebut, NU getol berjuang untuk kemerdekaan hingga lahir Indonesia. Beberapa kelompok menuntut negara Islam, seperti kelompok Darul Islam (DI). Akan tetapi mayoritas umat menolak bergabung dengan alasan telah memiliki negara Indonesia yang berdasar Pancasila. Keputusan DI dianggap tindakan *bughat* atau pemberontakan. Soekarno dinobatkan sebagai pemimpin negara yang absah yang secara darurat dianggap sebagai pemimpin umat Islam. Dengan penobatan ini pengaruh DI bisa diredusir. []

CADAR DAN RADIKALISME-TERORISME

MENTERI AGAMA yang baru, Fachrul Razi menyatakan akan mengkaji pelarangan cadar. Dia melontarkan gagasan pembatasan penggunaan niqab (cadar) dan celana cingkrang di instansi pemerintahan, sipil dan militer. Apa tujuannya? Tujuan Menag adalah untuk menangkal radikalisme. DPR pun bereaksi, politikus DPR dari PAN dan PKS menyayangkan gagasan tersebut dan akan mempertanyakan dalam rapat kerja bersama Menag.

Identifikasi Radikal

Supaya mempunyai persepsi yang sama, orang radikal dalam konteks Indonesia, radikal adalah mereka yang anti terhadap Pancasila, ingin mengganti dan memisahkan diri dari NKRI dan berideologi takfiri yakni gampang mengkafirkan kelompok liyan yang beda pemahaman terkait fragmen ajaran agama. Saat ujaran pengkafiran yang penuh kebencian sering disuarakan, maka hal itu selangkah menuju tindakan terorisme. Dengan ciri tersebut, radikal tidak dalam katagori makna leksikal tapi terkait politik dan kedangkalan pemahaman agama.

Dengan makna yang demikian, mengkaji relasi cadar dengan radikalisme dan terorisme memerlukan elaborasi lebih lanjut. Kalau ditanya apakah cadar identik dengan radikalisme-terorisme?

Tentu kalau dikatakan identik dalam arti sama sebangun tidak berbeda sedikit pun, adalah identifikasi yang salah. Dalam konteks global, Yaman yang rerata perempuannya bercadar, namun mereka tidak disebut dan tidak menjadi radikal serta teroris, demikian pula di Saudi. Dalam konteks Indonesia, tetap salah kalau dikatakan cadar identik dengan radikalisme. Saya mempunyai teman bercadar, dan dia mengaku warga NU (perlu dicatat juga, sangat jarang atau kecil persentase warga NU yang bercadar. Mereka yang bercadar pun biasanya fleksibel dalam perilakunya sebagaimana warga NU pada umumnya).

Sekalipun demikian, dengan menggunakan perspektif ciri terdekat, di Indonesia pada galibnya yang disebut teroris adalah seseorang yang relasi terdekatnya adalah kelompok kecil dan eksklusif dari masyarakat yang berbeda tampilan "asesoris" pisik dengan mayoritas masyarakat. Beda tampilan "asesoris" pisik perempuannya adalah cadar. Menelisik berita yang beredar, setelah era reformasi bergulir, terjadi fenomena munculnya pelaku bom bunuh diri di Indonesia, setelah digerebek rumahnya, ditemukan istrinya bercadar.

Dengan penjelasan di atas bisa dikatakan, para pelaku bom bunuh diri di bumi Nusantara berkaitan erat dengan lingkungan famili eksklusif yang ciri luarnya adalah cadar. Sangat nadir atau garib bila tidak demikian. Walhasil, famili eksklusif bercadar adalah ciri terdekat pelaku terorisme,

namun tidak semua perempuan yang bercadar pasti radikal dan potensial menjadi teroris.

Antara Legalitas Larangan dengan Kebijakan Antisipatif

Karena wacana cadar dilekatkan dengan fiqih, dalam arti pemakaian cadar dan penentangan larangan wacana bercadar juga dalam ranah fiqih, maka menggunakan kajian fiqih siyasah (politik) adalah penting untuk memberi perspektif lain terkait gagasan larangan pemakaian cadar.

Bolehkah pemerintah melarang pegawai berpakaian tertentu, atau mengharuskan berpakaian tertentu juga? Dalam kaidah hukum Islam disebutkan, "*hukm al-hakim yarfa'u al-khilaf*" atau kaedah "*amr al-imam yarfa'u al-khilaf*", yakni perintah imam (pemimpin) itu menghilangkan silang sengkarut pendapat di kalangan rakyat. Artinya, dalam konteks berpakaian, pemimpin bisa memerintahkan pakaian tertentu dan bisa melarang pakaian tertentu.

Eks-HTI dalam kitab-kitabnya banyak mengutip kaedah di atas, bahkan dalam kitab Nizam al-Islam karya Taqiyuddin an-Nabhani ditambahi jika seorang mujtahid (ulama) mempunyai pendapat dalam ajaran agama yang berbeda dengan mujtahid lain, maka mujtahid tersebut tidak boleh melepaskan pendapatnya kecuali apabila seorang imam (pemimpin) telah menetapkan hasil keputusan hukumnya, maka seluruh mujtahid harus melepaskan pendapatnya dan mengikuti pendapat hukum dari imam.

Dalam konteks Indonesia dan dalam kajian fikih politik, presiden adalah pemimpin yang secara fikih wajib ditaati karena dia adalah waliyyul amri, sehingga seperti dikutip oleh Andree Feillard dalam *NU vis-à-vis Negara*, pada tahun

1954, Menteri agama dan para alim ulama menggelar konferensi yang menghasilkan keputusan bahwa Presiden Soekarno adalah waliyyul amri addlaruri bisysyaukah, seorang kepala negara yang sah dan karenanya, ipso facto, harus dipatuhi semua umat Islam.

Dengan alur argumen di atas, pemimpin di Indonesia dalam kacamata fikih politik bisa melarang pegawai memakai pakaian tertentu semisal sarung, daster, celana pendek, kaos pada waktu jam kerja. Demikian juga pemimpin bisa melarang wanita bercadar dengan mengganti pakaian yang lain yang tetap dalam koridor etika Islam dan budaya sopan santun. Perlu diketahui, hukum memakai cadar dalam konteks fiqih adalah khilafiyah (banyak pendapat) yang memungkinkan pemimpin memilih hukum yang relevan dengan konteks sosial-politik yang melingkupinya.

Sekalipun pemimpin bisa melakukan larangan dalam model pakaian, harus tetap diperhatikan motif larangannya apakah linier dengan akal sehat atau dalam kaedah fikih siyasah seperti termuat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadzair* karya Imam al-Suyuthi disebutkan "*tasharruf al-imam ala al-raiyyah manuth bi al-mashlahah*" yakni kebijakan (termasuk perintah dan larangan) pemimpin terhadap rakyatnya mengikuti asas kemaslahatan. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan kajian mendalam tentang maslahat tidaknya rencana larangan tersebut?

Lebih dari itu, apakah di instansi pemerintahan banyak pegawai bercadar yang berpotensi menjadi radikal-teroris? Dalam pembacaan saya, simpatisan kelompok radikal eks-HTI, banyak yang bekerja di instansi pemerintahan yang mereka anggap kufur seperti Indonesia. Dalam disertasi

Umi Chaidaroh yang berjudul Fikih Perempuan Hizb al-Tahrir dijelaskan dalam sistem khilafah, perempuan haram menjadi kepala negara, gubernur, bupati, jaksa, militer, polisi, hakim dan sejenisnya. Kalau dalam sistem khilafah saja haram, apalagi dalam sistem negara yang mereka nilai bukan khilafah. Sekalipun demikian, bagi simpatisan eks-HTI, menjadi buruh, tukang sapu, dosen, dokter, guru, peneliti, perawat, pegawai BUMN dan lain-lain di instansi pemerintahan Indonesia adalah dibolehkan, tentu ini tindakan oportunis.

Namun perlu dipahami, tidak ada (selama saya terlibat dan mengamati, kalau ada mungkin sangat jarang) perempuan pengikut eks-HTI yang bercadar karena bagi mereka bercadar tidak wajib seperti dijelaskan Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Al-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam*. Justeru sebaliknya, dalam pembacaan pendek saya, perempuan yang melakukan tindakan terorisme tidak ditemukan yang berlatar pegawai pemerintahan. Hal ini karena mereka menolak tegas bekerja di sistem taghut.

Dengan demikian, melarang pegawai pemerintah yang bercadar dengan alasan untuk membasmi radikalisme adalah tidak tepat sasaran. Apalagi mengaca pada peristiwa bom bunuh diri, tempat atau lokasinya di fasilitas umum bukan kantor pemerintahan, kecuali kantor kepolisian, namun di kepolisian juga tidak ada polwan aktif yang bercadar.

Seandainya hendak dilakukan pelarangan, semisal dengan argumen *sadd al-dzariah* (menutup celah potensial berbahaya), maka yang tepat lokasi larangannya adalah di tempat umum. Tentu larangan baru bisa diterapkan apabila sudah dilakukan studi mendalam. []
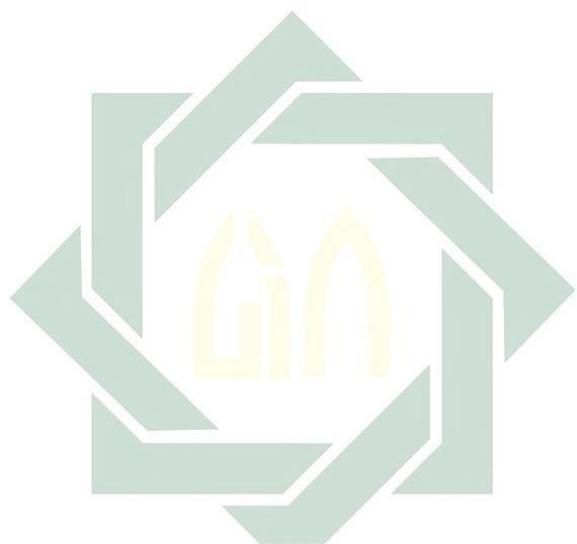
Saat di Hizbut Tahrir, Gus Rofiq sudah menerjemahkan kitab karya aktivis Hizbut Tahrir. Dengan demikian, tidak diragukan kemampuannya mengkritisi data dari kitab Hizbut Tahrir.
__Ali Subagiyo, Mantan *Hizbiyyin*, Alumni ITS

Saya mengenal Mas Rofiq kala itu sebagai pribadi yang gemar mengenalkan Hizbut Tahrir, dan dari beliau juga saya belajar "berani" mengakui "kesesatan" Hizbut Tahrir. Buku ini menjadi sangat kaya (*fruitfull*) karena tidak sekadar diulas secara akademis, namun juga dibingkai dalam perjalanan beliau sebagai bagian dari *in group* (saat itu) dan *out group* (saat ini).
__Nurlaela Widyarini, Mantan *Hizbiyyin*, Alumni Unair

Buku ini bisa membuka mata dan menyadarkan para aktivis HTI karena kritiknya memakai nalar, bukan berdasar kebencian.
__Hery Rusmanto, Mantan *Hizbiyyin*, Alumni ITATS

Aku ingat betul Mas Ainur Rofiq berusaha untuk menyebarkan ide Hizbut Tahrir di internal kampus dan fakultas Unair tahun 93-an. Salah satunya dengan membuat bulletin yang disebarkan dan menjadi salah satu program kegiatan di Senat Mahasiswa. Aktivitas tersebut sempat dicurigai pihak dekanat, namun relatif aman karena ada kesepahaman dan sedikit pemakluman dari salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus.
__Samsu Rijal, Mantan *Hizbiyyin*, Alumni Unair

Sejak semester awal, saya sudah dengar nama Gus Rofiq yang pandai mengorganisir kegiatan antarkampus se-Surabaya untuk kepentingan Hizbut Tahrir. Pernah juga Gus Rofiq menjadi moderator di FK Unair dengan pembicara, antara lain, Ismail Yusanto. Saya masih ingat Gus Rofiq mendoktrin para mahasiswa baru dengan dibawa ke pondok di Lamongan. Alhamdulillah, saat ini putra saya mondok di Tambakberas agar dibekali ilmu agama dan ilmu tentang radikalisme.
__Hanani, Mantan *Hizbiyyin*, Alumni Unair